Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011—2020

by Anak Agung Gede Raka

Submission date: 13-Jul-2020 07:19PM (UTC+0700)
Submission ID: 1356969959
File name: E-Book_Dinamikan_Pembangunan_Kabupaten_Bangli.pdf (3.8M)
Word count: 68639
Character count: 421480

DINAMIKA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011-- 2020

Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si. ~ Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., M.Si
Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si. ~ Made Yaya Sawitri S.HI.,M.A.

DINAMIKA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI 2011—2020

Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si.
Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., M.Si
Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si.
Made Yaya Sawitri S.HI.,M.A.

Pemerintah Kabupaten Bangli
2020

Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli
Tahun 2011—2020

Penyusun
Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si.
Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., M.Si
Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si.
Made Yaya Sawitri S.HI.,M.A.

Pracetak
Slamat Trisila

Penerbit
Cakra Media Utama
(Anggoka IKAPI Bali)
Jalan Diponegoro No. 256
Denpasar, Bali 80114
Ponsel: 081239937772
Email: cakra.mediatama@gmail.com

Bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten Bangli

Cetakan Pertama
2020

ISBN 978-623-7575-09-2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka Buku **Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011—2020** ini dapat diselesaikan.

Buku ini menggambarkan dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam rangka pelaksananan pembangunan di Kabupaten Bangli selama satu dasawarsa terakhir. Perspektif diakronik pembangunan Kabupaten Bangli sudah dikelola dengan keseriusan dan komitmen yang tinggi baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, sehingga masalah kehidupan masyarakat menjadi persoalan bersama.

Dalam pelaksanaannya diharapkan tercipta suatu sistem pembangunan yang terintegrasi sehingga sasaran tercapai secara menyeluruh, tahapan-tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara berurutan, bertahap, dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada parapihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi sehingga penyusunan buku ini bisa diselesaikan sesuai dengan rencana.

Bangli, 15 Januari 2020
Penyusun

SAMBUTAN BUPATI BANGLI

OM SWASTYASTU

Buku *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011 -- 2021* merupakan sebuah dokumen yang menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah kabupaten pada dua periode pembangunan di Kabupaten Bangli. Buku ini memuat secara lengkap mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan, rencana program dan pendanaan, serta indikator target dan capaian pembangunan di Kabupaten Bangli. Terbitnya buku ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Bupati Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama dua periode pemerintahan yaitu tahun 2011 s.d 2021, terhadap seluruh *stakeholder* yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan sehingga seluruh rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan progres yang cenderung mengalami kemajuan yang signifikan sesuai dengan data dan fakta yang telah diungkap dan diuraikan oleh team penulis.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang senyatanya dan jelas mengenai kinerja pemerintahan selama dua periode pemerintahan, sekaligus memberikan gambaran mengenai program kerja yang masih harus ditingkatkan kinerjanya, terutama terkait dengan berbagai hambatan dan keterbatasan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program pembangunan, untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan program dan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Bangli untuk periode berikutnya. Melalui buku ini pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat Bangli yang telah memberikan kontribusi dan dukungan bagi pemerintah kabupaten, sehingga seluruh program yang telah direncanakan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada dua periode pembangunan dapat terealisasi dengan hasil yang baik. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa "tiada gading yang tak retak," maka selama dua periode pemerintahan di Kabupaten Bangli, sudah tentu masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan dimasa mendatang, maka buku ini diharapkan menjadi salah satu pedoman penting bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan di Kabupaten Bangli untuk periode mendatang.

Akhir kata semoga buku ini mendapat tempat di hati masyarakat Bangli pada khususnya dan seluruh pengambil kebijakan di Kabupaten Bangli dalam mewujudkan berbagai terobosan program pembangunan yang komprehensif, untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang GITA SANTI.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

Bangli, April 2020

I Made Gianyar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
SAMBUTAN BUPATI GIANYAR iv
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Landasan Hukum 3
1.4 Tatacara Penyusunan Buku 5
1.5 Tahapan Penyusunan Buku 5

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 7
2.1 Geografis dan Demografis 7
2.2 Potensi Pengembangan Wilayah 11
2.3 Demografis 20
2.4 Kesejahteraan Masyarakat 23

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 43
3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 43
3.2 Pendapatan Daerah 43
3.3 Pembiayaan Daerah 52
3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan 52

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 55
4.1 Pendahuluan 55
4.2 Isu Strategis Global 55
4.3 Isu Strategis di Tingkat Nasional 57
4.4 RPJM Nasional 2010-2014 58
4.5 Prioritas RPJM Nasional 2015-2019 61
4.6 Isu Strategis di Tingkat Daerah 63

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 75
5.1 Visi 75
5.2 Misi 78
5.3 Tujuan Pembangunan Daerah 79
5.4 Sasaran Pembangunan Daerah 88

BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 87
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 87
6.2 Kebijakan Pembangunan Daerah 94
6.3 Program Pembangunan Daerah 96

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN 99
7.1 Rencana Progam 99
7.2 Pendanaan 107

BAB VIII INDIKATOR TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 117
8.1 Indikator Target dan Capaian Kinerja Urusan Wajib 2010-2015. 117
8.2 Indikator Target dan Capaian Kinerja Urusan Wajib 2016-2021. 161

BAB XI PENUTUP 195
9.1 Kesimpulan 195
9.2 Rekomendasi 197

DAFTAR PUSTAKA 199
INDEKS 201
TENTANG PENULIS 203

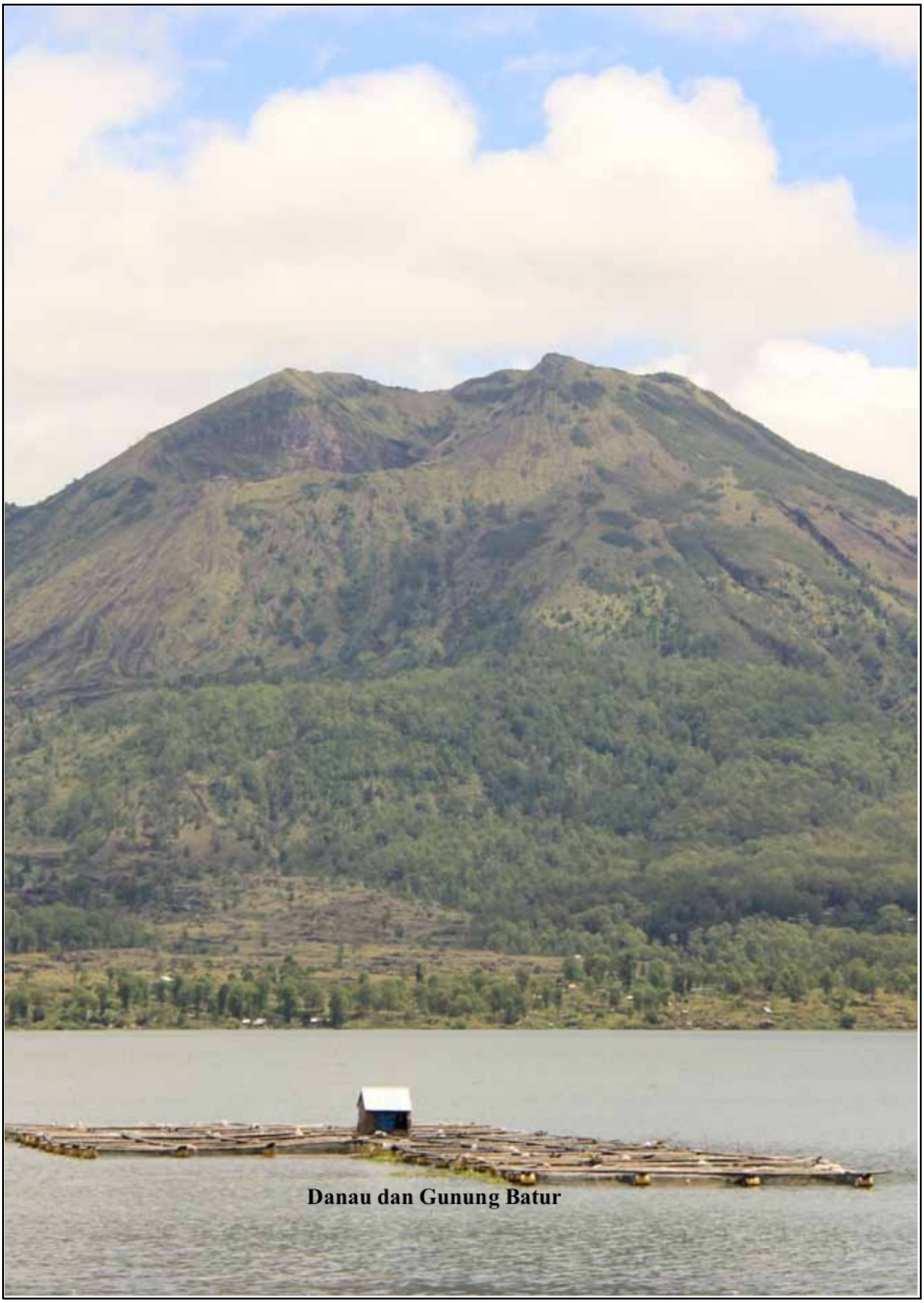

Danau dan Gunung Batur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara di tingkat nasional terdiri atas berbagai satuan kerja, seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal, badan biro, dan sebagainya, sebagian diantaranya memilki satuan-satuan unit kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara, juga dikenal aparatur birokrasi pemerintahan daerah dengan aneka ragam nomenklatur, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa. Keseluruhan jajaran pemerintahan negara merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah *civil service*.

Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik selalu ada dinamika sesuai situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Penekanan peranan pemerintah Kabupaten Bangli sebagai fasilitator, dengan sepuluh prinsip mewirausahakan birokrasi memperkenalkan paradigma baru dengan menempatkan birokrasi sebagai fasilitator bukan sebagai ruler atau patron. Walaupun upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang responsif, inovatif, dan akuntabel dengan memposisikan diri sebagai fasilitator bukan pekerjaan yang mudah, namun upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah diupayakan demi memberikan pelayanan yang baik terhadap publik dan mampu memperbaiki citra birokrasi yang selama ini banyak menjadi sorotan dan citra negatif di mata publik (masyarakat).

BPS Kabupaten Bangli mencatat jumlah penduduk miskin di Bangli masih berfluktuasi, setelah ada peningkatan di tahun 2009 (13,8 juta atau 5,18% dari 13,3 juta atau 6,1% pada tahun 2008), tahun 2010 keadaan kemiskinan kembali memburuk ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin yaitu 13,8 juta atau atau sekitar 6,41 persen dari total penduduk Kabupaten Bangli. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam sepuluh tahun terakhir telah berupaya memformulasikan kebijakan pembangunan desa dengan menjadikan desa sebagai "ujung tombak" pembangunan. Motto yang diusung *"Membangun Bali dari Bangli, Membangun Bangli dari Desa dan Membangun Desa dari Keluarga"*. Berdasarkan motto tersebut berbagai kebijakan pembangunan telah ditetapkan untuk peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program yang berbasiskan desa, seperti ADD (Alokasi Dana Desa), PNPM Mandiri Perdesaan,

pemberdayaan aparatur desa, serta TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa).

Dengan kebijakan pembangunan di/ dari desa itu pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli memiliki berperspektif sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa yang khas. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi pendekatan yang tepat digunakan. Hal ini telah memberikan hasil yang lebih sesuai dan memuaskan, karena masyarakat desa diposisikan sebagai subyek (bukan obyek) pembangunan.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pembangunan desa secara partisipatif, diantaranya melalui Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (GERBANGDESSIGOT), Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) *Nyama Anyar*. Dalam pendekatan ini, penyusunan program pembangunan dilakukan melalui analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan kelompok dalam masyarakat, dengan menggunakan kriteria yang terukur, sehingga menghasilkan rumusan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai bentuk respons dari kekeliruan pendekatan selama ini. Dengan adanya ruang untuk berpartisipasi, dimana anggota masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya, maka bias perencanaan pembangunan desa selama ini karena menggunakan "kacamata orang luar" dapat diminimalkan.

Dengan Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (GERBANGDESSIGOT), Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) *Nyama Anyar* diharapkan mampu mencapai Visi Kabupaten Bangli yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangli tahun 2010-2015 adalah **Terwujudnya Masyarakat Bangli yang GITA SANTI (gigih, ikhlas, taqwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah) berdasarkan *Tri Hita Karana***.

Disamping itu juga bisa melaksanakan **Misi** Kabupaten Bangli, yaitu:

1. Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata, industri kecil, dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengembangkan menejemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata

dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) program pembangunan.

6. Meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.
7. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, dan efektif serta mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada.
8. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, dan indah atau SANTI.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Buku *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli 2011--2020* ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang, serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Buku *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli 2011-2020* disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli selama masa 10 tahun. Disamping itu juga bisa diketahui strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menggambarkan situasi saat itu, sistem peramalan serta proyeksi pembangunan yang dipakai, serta beberapa sasaran yang pembangunan sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Buku *Dinamika Pembangunan Bangli 2011--2020*, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasan Ideal
   Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional
   Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional
   a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

q. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014;

1.4 Tatacara Penyusunan Buku

Penyusunan Buku *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli 2011--2020* diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bangli dari tahun 2011 s.d. 2020

1.5 Sistematika Buku Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli

Buku Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli memuat:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Wilayah
BAB III	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	:	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI	:	Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan
BAB VII	:	Rencana Program dan Pendanaan
BAB VIII	:	Indikator Target dan Capaian
BAB IX	:	Penutup.

Pura Kehen Batur

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografis dan Demografis

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pantai. Letak Geografisnya Kabupaten Bangli di antara 08^0 08$'$ 30$''$ - 08^0 31$'$ 07$''$ Lintang Selatan dan 115^0 13$'$ 43$''$ – 115^0 27$'$ 24$''$ Bujur Timur. Suhu udara rata-rata berkisar 24,9^0 C dengan tingkat kelembaban 88 serta curah hujan berkisar 797 mm per tahun, dengan ketinggian 100 - 2.152 m dari permukaan laut, dibagian selatan dataran rendah dan di utara merupakan pegunungan yaitu puncak penulisan dan Gunung Batur dengan kepundannya. Danau Batur yang memiliki luas 1.067,50 Ha, serta pegunungan berelief halus sampai kasar batuannya terdiri dari endapan vulkanik Gunung Batur berupa lahar yang bersifat agak kompak. Secara administrasi Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Buleleng
Timur : Kabupaten Karangasem
Selatan : Kabupaten Klungkung
Barat : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah Kecamatan dan 72 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Susut, Bangli, Tembuku, dan Kintamani. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli. Data administrasi wilayah, jumlah desa dan luas Luas wilayah ilihat Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Administrasi Wilayah Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase	Jml Desa	Persentase
1	Susut	4.930	9,47	9	12,50
2	Bangli	5.630	10,81	9	12,50
3	Tembuku	4.830	9,27	6	8,33
4	Kintamani	36.690	70,45	48	66,67
	Kabupaten Bangli	52.080	100,00	72	100,00
	Provinsi Bali	563.666	9,24	616	11,69

Sumber: Kabupaten Bangli Dalam Angka 2018

Gambar 2.1.
Persentase Luas Wilayah Masing-masing Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangli

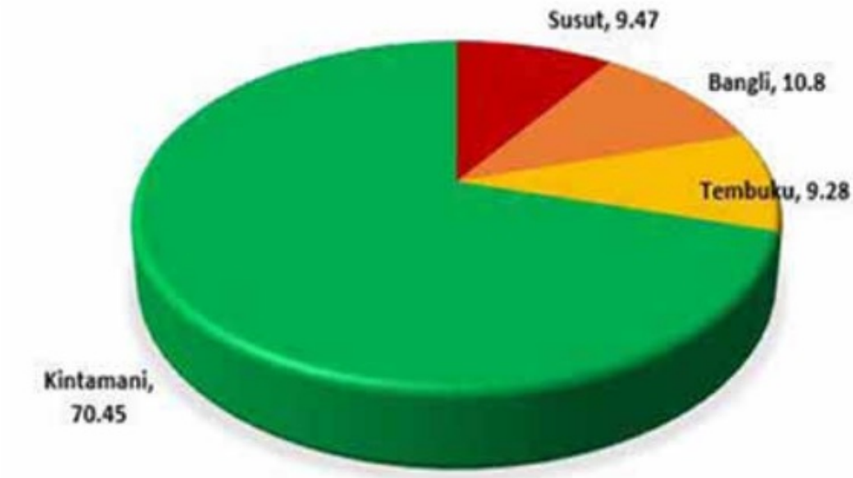

Sumber: Kabupaten Bangli Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 2.1. dan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kecamatan Kintamani adalah 70,45 % dari luas wilayah kabupaten dan bahkan merupakan kecamatan terluas di Provinsi Bali (6,51% dari luas wilayah Provinsi Bali), lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Klungkung (31.500 Ha) dan hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Gianyar (36.800 Ha).

b. Kondisi Fisik Dasar Wilayah

Kondisi fisik dasar wilayah kabupaten berdasarkan aspek topografi, geologi, hidrologi, dan iklim. Topografi wilayah berada pada ketinggian antara 100 – 2.152 meter dpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah kecamatan Susut (100–920 m), Kecamatan Bangli (100 – 1200 m), Kecamatan Tembuku (320 – 920 m), dan Kecamatan Kintamani 920 – 2.152 m. Kelerengan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran (0–2%), landai (2-15%), bergelombang (15-30%), curam (30-40%) dan sangat curam (>40%). Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan di kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan Susut, Bangli, dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Bangli

No	Nama Kecamatan	Ketinggian Wilayah (m dpl)					Jumlah (Ha)
		100 - 250	250 - 500	500 - 750	750 - 1000	>1000	
1	Susut	62,50	2.446,00	1.297,50	1.125,00	-	4.931,00
2	Bangli	340,00	1.412,50	917,50	2.053,50	902,50	5.626,00
3	Tembuku	-	1.650,00	2.539,50	642,50	-	4.832,00
4	Kintamani	162,50	362,50	1.312,50	9.476,50	35.378,50	46.692,50
	Kabupaten Bangli	565,00	5.871,00	6.067,00	13.297,50	36.281,00	62.081,50
	Persentase (%)	0,91	9,46	9,77	21,42	58,44	100,00

Sumber : Kabupaten Bangli dalam angka 2018

Berdasarkan aspek Geologi, Kabupaten Bangli secara umum termasuk dalam formasi Buyan, Beratan, dan Gunung Batur (Qpbb) yang berumur kuarter. Formasi ini pada bagian permukaan didominasi oleh tufa pasiran dan di beberapa tempat dijumpai tufa batu apung dan endapan lahar. Tufa pasiran umumnya melapuk menengah – tinggi berwarna kuning kecoklatan, berukuran pasir halus – kasar. Tufa batu apung berwarna putih kecoklatan, agak rapuh dan mudah lepas. Endapan lahar berwarna abu-abu sampai abu-abu kehitaman terdiri dari batuan beku andesit dan batuapung dengan masa tufa pasiran bersifat agak rapuh. Pada kaldera batur formasi geologi terdiri dari formasi geologi Batuan Gunung api Batur yang mengandung aglomerat, lava, dan tufa.

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah Pulau Bali, didapatkan bahwa terdapat zona kerentanan gerakan tanah tinggi pada kawasan sekitar Kaldera Batur yang memiliki kelerengan curam dan sangat curam. Selanjutnya tersebar luas zona kerentanan gerakan tanah menengah (terdapat gerakan tanah terutama pada kawasan yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir (pinggir jurang), pada wilayah tebing bagian barat laut, utara dan timur laut Kaldera Batur, dan tersebar sedikit di selatan kaldera Batur.

Hidrologi wilayah terdiri atas air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari Danau Batur dengan luas 1.607 Ha, kedalaman 70 meter, volume 815,58 juta/m^3, panjang panjang garis pantai *(shoreline)* 21,4 km dengan daerah tangkapan seluas 10.535 Ha. Sungai yang ada di Kabupaten Bangli berjumlah 14 buah yang merupakan hulu-hulu sungai utama yang bermuara di bagian selatan Pulau Bali. Air tanah di Kabupaten Bangli berdasarkan Peta Pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan (Dep. ESDM), menyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Bangli dari bagian utara Kota Bangli ke arah utara merupakan Daerah Resapan Air yang mengisi Cekungan Air Tanah (CAT) wilayah Kabupaten/Kota Sarbagita termasuk wilayah Kabupaten Bangli bagian selatan. Jumlah potensi mata air di Kabupaten Bangli tersebar di 88 buah titik di 42 desa dengan debit total 1.561,30 ltr/dt. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah umumnya pendek dan jenis alirannya

bersifat ephemeral, yang sebagian besar terletak di sebelah utara, sedangkan yang mengalir ke bagian Selatan lebih panjang, aliran sungainya kebanyakan bersifat perennial.

Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif rendah berkisar antara 15^0 – 30^0 C, semakin ke utara suhu semakin dingin. Angka curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi 3.500 mm. Penyebaran curah hujan relatif tinggi (2.500 - 3.500 mm) meliputi bagian utara (lereng Gunung Batur) dan semakin rendah ke arah selatan wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember – Maret dan terendah pada bulan Agustus.

Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bangli pada tahun 2018 didominasi berturut-turut (Tabel 2.3) penggunaan untuk lahan tegalan atau kebun campuran 45,55%, hutan negara 17,94%, perkebunan 14,52%, permukiman dengan pekarangannya 6,38%, lahan kering lainnya 5,84%, persawahan 5,55%, hutan rakyat 4,2% dan lainnya. Pemanfaatan sawah hanya terdapat di Kecamatan Bangli, Susut, dan Tembuku sedangkan Kecamatan Kintamani didominasi pemanfaatan hutan, tegalan dan kebun.

Komposisi guna lahan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangli bukanlah kawasan sentra budidaya tanaman pangan (sawah), namun berdasarkan potensi fisik alamnya merupakan kawasan yang berpotensi dikembangkan untuk perkebunan dan kehutanan. Sebaran persawahan hanya terdapat di Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku dengan komposisi 5,55% dari luas wilayah.

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangli dilayani pusat-pusat kegiatan yang telah bekembang terutama Kawasan Perkotaan Bangli sebagai ibukota Kabupaten Bangli, Ibukota-ibukota Kecamatan (Susut, Bangli, Tembuku, Kintamani), pusat-pusat kegiatan wisata (Penelokan, Toyabungkah), pusat-pusat pertanian (Catur, Belantih), Pusat Kegiatan Spiritual (Batur) dan lainnya. Beberapa Permukiman perdesaan atau kawasan perdesaan terutama di wilayah Kecamatan Kintamani jaraknya cukup jauh dari pusat pelayanan.

Sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada Tabel 2.3. Komposisi kawasan lindung adalah 20,49% dan Kawasan Budidaya 79,51%, namun dalam Komponen Kawasan Budidaya terdapat Kawasan Perkebunan dan Kehutanan yang berfungsi perlindungan sebesar 60,79%.

Hutan negara di wilayah Kabupaten Bangli seluas 9.341,28 Ha, merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Wisata Alam (TWA) terdiri atas HL Penulisan-Kintamani (4.219,3 Ha), HL Munduk Pengajaran (613 Ha), HL Gunung Abang-Agung 1.406,71 Ha), HPT Batur Bukit Payang (453 Ha), TWA Batur Bukit Payang (2.075 Ha) dan TWA Gunung Abang-Agung 574,27 Ha), berfungsi perlindungan sebesar 60,79%.

Tabel 2. 3
Rencana Pola Ruang Wilayah

NO	JENIS POLA RUANG	LUAS (HA)	%
A	**KAWASAN LINDUNG**	**10,672.10**	**20.49**
1	Hutan Lindung	6,239.01	11.98
2	Taman Wisata Alam	2,649.27	5.09
3	Danau	1,667.00	3.20
4	Sempadan Sungai	14.96	0.03
5	Sempadan Danau	101.86	0.20
B	**KAWASAN BUDIDAYA**	**41,408.90**	**79.51**
1	Permukiman	5,072.58	9.74
2	Kaw. Budidaya Tanaman Pangan	2,734.76	5.25
3	Kaw Budidaya Pekebunan	25,291.64	48.56
4	Kaw Budidaya Hortikultura	1,522.99	2.92
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	453.00	0.87
6	Kawasan Hutan Rakyat	4,550.43	8.74
7	Kaw. Efektif Daya Tarik Wisata Khusus	1,783.50	3.42
TOTAL		**52,081.00**	**100.00**
C	**KAWASAN BUDIDAYA BERFUNGSI LINDUNG**		
1	Hutan Produksi Terbatas	453.00	0.87
2	Kawasan Hutan Rakyat	4,550.43	8.74
3	Kawasan Budidaya Perkebunan	25,291.64	48.56
4	Kawasan Budidaya Hortikultura	1,522.99	2.92
TOTAL		**31,818.06**	**61.09**

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusunan RTEWK Bangli, 2009

2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan pertanian lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya. Pengembangan pertanian lahan basah adalah seluas 2.734,76 Ha atau 5.25% dari luas Kabupaten Bangli tetap diarahkan pada lokasi yang telah ada, yaitu di Kecamatan Susut, Bangli, dan Tembuku. Arahan ini didasarkan pada pertimbangan produktivitas lahan, ketersediaan prasarana irigasi, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan yang sedang berlangsung. Arahan pengelolaan

kawasan budidaya tanaman pangan dilaksanakan melalui:

1) Pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan (irigasi) tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah,;
2) Pengoptimalan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi;
3) Pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
4) Pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi;
5) Pengembangan target luas lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan 90% dari luas lahan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini, di luar kebutuhan alih fungsi untuk fasilitas umum prioritas;
6) Pengembangan luasan kawasan pertanian lahan basah organik secara bertahap pada tiap subak dan dan desa/kelurahan sesuai potensinya.

Kawasan budidaya tanaman pangan, ditetapkan dengan kriteria:

1) Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian.
2) Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi.
3) Mendukung ketahanan pangan wilayah dan nasional, dan/atau
4) Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan jaringan prasarana irigasi.

2. Kawasan Budidaya Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman semusim dan tahunan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Bangli sebagian besar bercampur dengan kawasan perkebunan, namun di beberapa lokasi berupa khusus tanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan dengan luas 1.522,99 ha atau 2,92% dari luas wilayah Kabupaten Bangli diarahkan di seluruh kecamatan, terutama lahan yang diusahakan secara intensif untuk kegiatan tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura yang berkembang di Kabupaten Bangli adalah tanaman jeruk. Jeruk Kintamani telah mampu bersaing sebagai komoditas lokal unggulan Kabupaten Bangli dengan jeruk-jeruk import, sehingga peningkatan kualitas dan luasan areal perlu ditingkatkan. Arahan pengelolaan kawasan budidaya hortikultura dilaksanakan melalui:

a. Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk budidaya hortikultura unggulan secara optimal;
b. Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
c. Pemilihan jenis komoditi yang memilki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;
d. Pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
e. Pengendalian kegiatan budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki

kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), untuk diarahkan bercampur atau dikembalikan kepada tanaman budiaya perkebunan atau tanaman kehutanan (agroforestry) untuk mendukung kestabilan lereng dan mencegah kerawanan longsor;

f. Pemantapan kawasan agropolitan berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
g. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
h. Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organic secara bertahap pada tiap subak dan dan desa sesuai potensinya.

Kawasan budidaya hortikultura, ditetapkan dengan kriteria:

a. Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai bahan pertanian lahan kering secara optimal;
b. Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
c. Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.

3. Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan rakyat baik perkebunan dengan komoditi khusus. Komoditi perkebunan di Kabupaten Bangli yang telah terkenal adalah kopi arabika. Keberadaan kopi arabika di Kabupaten Bangli telah mendapat pengakuan nasional dan internasional dengan dikembangkananya sertifikat indikasi geografis. Luas perkebunan rakyat untuk kopi arabika memang terluas, dan secara total luas perkebunan pada 2007 adalah 7.652 ha atau 14.88% dari luas wilayah. Mengingat ketersediaan lahan yang masih luas, potensi alami dan geografis yang dimiliki serta upaya pelestarian lingkungan dengan tetap mengembangkan komoditi yang mempunyai nilai jual secara internasional, maka perluasan areal perkebunan menjadi alternatif peningkatan nilai tambah wilayah.

Perluasan areal perkebunan diarahkan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang masuh tersedia yaitu 25.291,64 Ha atau 48,567% dari luas wilayah. Pengelolaan kawasan budidaya perkebunan dilaksanakan melalui:

a. Pengembangan luas areal tambahan dari luas yang ada pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/ tahunan secara optimal dan dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan;
b. Pengembangan kegiatan perkebunan dengan sistem agribisnis yang didukung pengembangan agroindustri dan Kawasan agropolitan ;
c. Pengembangan lahan perkebunan terintegrasi dengan dengan komoditas lainnya;
d. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas-

komoditas khas yang sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah;

e. Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
f. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
g. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
h. Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

Kawasan budidaya perkebunan, ditetapkan dengan kriteria:

a. Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan/ tanaman tahunan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan;
b. Pengembangan tanaman perkebunan diprioritaskan pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing tinggi serta mampu mendukung kelestarian lingkungan.

4. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan budidaya peternakan diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian. Kegiatan peternakan meliputi peternakan besar (sapi) dan peternakan kecil (ayam, itik, babi, dan kambing).

Arahan pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui:

a. Pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
b. Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
c. Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
d. Pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak;
e. Pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal;
f. Pemantapan pelayanan Pasar Hewan di Kelurahan Cempaga Bangli (untuk Kawasan Perkotaan Bangli dan sekitarnya serta Pasar hewan Kayuamba untuk pelayanan regional;
g. Pengembangan kawasan agropolitan promosi Tiga-Pengelumbaran untuk komoditas unggulan peternakan sapi masyarakat.

Kawasan budidaya peternakan, ditetapkan dengan kriteria:

a. Pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;
b. Pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
c. Keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
d. Kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
e. Kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan
f. Kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.

5. Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Peruntukan Perikanan Tangkap

Peruntukan kegiatan perikanan tangkap diperairan umum untuk wilayah Kabupaten Bangli seluas 1.639,90 Ha atau 3.15% dari luas Kabupaten Bangli, yang tersebar di Daerah Aliran Sungai, Kawasan Waduk dan Kawasan Danau Batur. Untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan di Kawasan Danau Batur, harus ada suatu studi penelitian ambang batas pengembangan kegiatan budidaya perikanan di Kawasan Danau Batur.

b. Peruntukan Budidaya Perikanan

Peruntukan kegiatan budidaya perikanan meliputi diperairan umum berupa danau, sawah dan kolam dengan luas total 189,77 Ha atau 0.36% dari luas Kabupaten Bangli, dimana untuk budidaya di daerah persawahan sebesar 177 Ha, budidaya dalam kolam mencapai 11,50 Ha dan budidaya perikanan di perairan umum baru mencapai 1,27 Ha.

Pengembangan budidaya perikanan di kawasan danau diarahkan maksimal 10% dari luas kawasan perairan danau. Dengan luas Danau Batur yang mencapai 1.607,50 Ha, maka luas maksimal kegiatan budidaya perikanan di danau adalah 80,38 Ha. Kondisi pengembangan keramba baru pada tahun 2009 baru mencapai 0,76 Ha, sehingga sediaan potensi yang masih sangat luas, merupakan kegiatan unggulan yang dapat dikembangkan Kabupaten Bangli dari sektor perikanan di Kawasan Danau Batur.

6. Kawasan Pertambangan

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan.

Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Bangli, mencakup:

a. Lokasi kawasan pertambangan galian C terutama di Kawasan Yeh Mampeh pada dasar kaldera Batur dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
b. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan penatagunaan air; dan
c. Lokasi kegiatan pertambangan skala kecil lainnya, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

7. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangli diarahkan pada kegiatan Sentra-Sentra Industri Kecil yang dapat bercampur dengan kawasan permukiman baik di Kawasan Permukiman Perkotaan maupun Kawasan Permukiman Perdesaan.

Kegiatan industry yang dikembangkan terkait dengan potensi sumber daya alam setempat, induatri kreatif dan industri kerajinan penunjang kepariwisataan.

Kegiatan industri yang dapat dikembanghkan adalah :

a. Industri terkait kerajinan bambu sebagai ikon produksi kerajinan Kabupaten Bangli;
b. Industri terkait pengolahan bahan makanan potensi sumber daya perkebunan yang ada seperti kopi, jeruk, buah-buahan lainnya;
c. Industri terkait bahan setengah jadi, untuk produksi barang kerajinan dari bahan hasil kehutanan (kayu);
d. Industri kecil kerajinan dan cindera mata untuk menunjang kegiatan pariwisata;
e. Industri kreatif terkait production house atau software mengingat kawasan sekitar Danau Batur mampu memberikan suasana segar untuk pengembangan keilmuan yang ditunjang teknologi komunikasi yang handal;
f. Industri kreatif lainnya.

Dengan demikian tidak dapat ditentukan deliniasi kawasan peruntukkan industri secara tegas di dalam peta Rencana tata Ruang Wilayah

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukkan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata. Sektor pariwisata di dalam ruang selanjutnya diwujudkan dalam wadah aktivitas yang secara dominan mengakomodasi kegiatan kepariwisataan, berdasarkan potensi daya tarik wisata yang ada. Wujud ruang peruntukan pariwisata juga memperhatikan ketentuan dari UU. No. 10 tentang kepariwisataan yang berupa arahan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Berdasarkan arahan kebijakan, maka kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari :

a. Kawasan Strategis Pariwisata mencakup Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), dan
b. Daya Tarik Wisata (DTW) yang tersebar dalam skala kecil

Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Bangli adalah Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) berikut.

a. Penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
b. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang ada di Kabupaten Bangli adalah KDTWK Kintamani yang memiliki luas 17.935 Ha atau 34.44 % dari luas Kabupaten Bangli, namun kawasan yang dideleniasi pada peta hanya 10% dari luas kawasan yaitu sebesar 1.793,5 Ha yang mencakup: Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahan, dan Suter.
c. Pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata.

9. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. Di Kabupaten Bangli kawasan rawan bencana yang berpotensi adalah Kawasan rawan tanah Longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran (dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 40º). Lokasi kawasan rawan tanah longsor terdiri dari kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang - tinggi yang terletak pada daerah lereng

bukit / perbukitan, lereng gunung/ pegunungan, dan tebing/lembah sungai.
Sebaran lokasi tersebut di atas terutama terdapat di :

a. Lereng kaldera Batur memutar bagian dalam;
b. Lereng kaldera Batur bagian luar arah utara, barat dan selatan;
c. Kawasan dengan kemiringan terjal di seluruh wilayah Kabupaten Bangli di luar lereng kaldera Batur;
d. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi :

Sebaran kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas :

a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Gunung batur:

Kriteria Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah :

1) Wilayah disekitar kawah atau kaldera; dan/atau
2) Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan /atau aliran gas beracun.

Kawasan gunung berapi Gunung Batur memenuhi kriteria diatas, dan penetapan Kawasan rawan letusan gunung berapinya dibagi menjadi :

1) Kawasan Rawan Bencana III (Daerah Terlarang) adalah :
   a) Kawasan terlanda aliran lava, hujan abu, pasir, lapili dan kemungkinannya adanya gas beracun terutama di daerah puncak G. Batur, Lereng bagian Tenggara, Selatan, Barat Daya, barat dan Barat laut.
   b) Luas daerah terlarang ini ± 33,6 Km2, sedangkan kampung / desa yang terkena / termasuk didalamnya yaitu Toya Bungkah, Seked, Yeh Mampeh, Pangkung Kucing, Latengaya, dan Tamansari.
   c) Untuk kawasan Rawan Bencana III (daerah terlarang) ini tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan atau untuk wisata.
2) Kawasan Rawan Bencana II (Daerah Bahaya) adalah:
   a) Kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan perluasan aliran lava serta lontaran batu pijar, bom, lapili dan pasir;
   b) Daerahnya mencakup kaki sebelah utara, Timur Laut dan Timur G. Batur hingga berbatasan dengan dinding kaldera dalam Batur dan danau Batur karena lokasi tersebut kemungkinannya berpindah-pindah;
   c) Daerahnya meliputi jari-jari ± 3 Km dari puncak G.Batur (tergantung letusan gunung api tersebut), sedangkan daerah yang diperkirakan terkena adalah Desa Songan A dan Desa Songan B.
3) Kawasan Rawan Bencana I (Daerah Waspada) adalah:
   a) Meliputi sektor antara batas kaldera II sampai batas Kaldera I; Daerah ini hanya terancam hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar, dan bilamana letusan yang kuat maka akan terjadi bom gunung api

sampai didaerah tersebut; Dearah penyebarannya meliputi kawasan kaldera Batur dengan radius ± 6 Km dari puncak Gunung Batur;

b) Daerah ini terdapat pemukiman dan kegiatan usaha, namun ada juga daerah yang rawan terkena tanah longsor seperti jalan Penelokan dan Kutadalem yang melintang sepanjang punggung yang dikiri kanannya jurang; Dan bilamana sewaktu-waktu terjadi gempa baik vulkanik maupun Tektonik yang kuat atau hujan yang sangat lebat, mungkin pada beberapa tempat tersebut akan terjadi longsor.

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah / kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah / sering terjadinya gempa bumi. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasikan mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

1) Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2) Daerah yang dilalui oleh patáhan aktif;
3) Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
4) Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
5) Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan / atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII Modified Mercally Intencity (MMI). Untuk Kabupaten Bangli, sejarah kegempaan yang ada tidak terlalu banhyak, kecuali gempa setempat terkait letusan gunung berapi batur yang berupa Gempa Vulkanik. Menurut Peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kabupaten Bangli termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah.

c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawaran Rawan Gerakan tanah adalah kawasan-kawasan yang memunyai potensi terjadinya gerakan tanah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki perbukitan dengan kemiringan terjal. Sebaran Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Pulau Bali terbagi menjadi 4 (empat) daerah Zona Kerentanan Gerakan Tanah yaitu : sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi. Kawasan yang termasuk rawan gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki Zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi, berpotensi terjadi pada kawasan dengan perbukitan yang terjal, karena pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan

gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat adanya curah hujan yang tinggi dan dibarengi dengan erosi yang kuat terutama pada kawasan perbukitan yang terjal. Sebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bangli terdapat di seluruih dinding Kaldera Gunung Batur.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan gerakan tanah meliputi:

1) Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan yaitu dengan jalan melakukan perbaikan pola tanam dan upaya konservasi lahan (sengkedan, tanaman keras dan lain-lain) untuk menahan laju gerakan tanah;
2) Membatasi kegiatan budidaya;
3) Memasang sistem peringatan dini kawasan rawan gerakan tanah;
4) Pengembangan sistem jaringan drainase;
5) Pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
6) Pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.

2.3 Demografis

1. Kependudukan

Penduduk pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yaitu penduduk sebagai beban pembangunan dan potensi pembangunan. Penduduk sebagai beban pembangunan karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penduduk sebagai potensi pembangunan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan itu sendiri karena dengan adanya penduduk yang besar akan menciptakan permintaan sehingga secara kumulatif berdampak positif terhadap kegiatan pembangunan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2015-2019, jumlah penduduk Kabupaten Bangli menunjukkan peningkatan. Dari hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk kabupaten Bangli terus bertambah dari tahun 2015 sebanyak 222.600 jiwa meningkat menjadi 228.400 jiwa pada tahun 2019. Meskipun jumlah penduduk bertambah, tapi laju pertumbuhan penduduk relative stabil yaitu rata-rata sebesar 0,57 % per tahun.

Tabel. 2.4
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	222.6	223.8	225.2	227.3	228.4
2	Pertumbuhan	0,59	0,54	0,58	-	-

Sumber : Kabupaten Bangli Dalam Angka 2018

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 0 - 14 tahun adalah sebanyak 85.000 orang pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 82.000 orang, penduduk usia 15 – 64 tahun mengalami peningkatan dari 724.000 orang di tahun 2015 menjadi 752.000 orang tahun 2019, sedangkan penduduk usia diatas 65 tahun ke atas jumlahnya kecendrungan meningkat dari 104.000 orang menjadi 115.000 orang. Dengan menurunnya kelompok umur 0 – 14 tahun dan sedikit peningkatan kelompok umur 65 tahun keatas, sedangkan kelompok umur usia produktif meningkat menyebabkan ratio ketergantungan mengalami penurunan dari 50,93 menjadi 42,53 per 100 orang usia produktif

Tabel.2.5
Jumlah Penduduk dan Ratio Ketergantungan Kabupaten Bangli Menurut Kelompok Umur Tahun 2005 – 2009

N0	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Usia 0-14	56.177	56.426	56.713	56.974	48,366
2	Usia 15-64	139.922	148.446	141.075	141.655	150,840
3	Usia 65 Keatas	15.087	15.142	14.128	15.182	15,779
4	Ketergantungan	50.93	48.21	50.22	50.94	42,53

Sumber : Bangli Dalam Angka 2010

Dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, yaitu Kecamatan Kintamani, Bangli, Susut, dan Tembuku penduduknya paling banyak adalah kecamatan Kintamani, namun tingkat kepadatannya paling rendah, karena kecamatan Kintamani merupakan daerah yang paling luas diantara empat kecamatan tersebut, sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah di Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku (Tabel.2.6).

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Km² per kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Tahun	Tingkat Kecamatan			
	Kintamani	Bangli	Susut	Tembuku
2005	242	778	866	725
2006	245	786	867	724
2007	247	790	869	724
2008	249	793	870	725
2009	250	800	872	725

Sumber: Bangli dalam angka 2010

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang dilihat dari Sex Ratio tidak mengalami banyak perubahan yaitu 99,53 di tahun 2005 tetap 99,53 di tahun 2009, seperti ditunjukan pada Tabel. 2.7

Tabel.2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Tahun 2005 – 2009

Jenis Data	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Jumlah Penduduk Kab.					
a. laki-laki	105,345	105,720	105,164	106,637	107,182
b. perempuan	105,841	114,294	106,752	107,174	107,603
2. Sex Ratio	99.53	92.50	98.51	99.50	99,53

Sumber : Bangli Dalam Angka 2010

2. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yang termasuk kelompok angkatan kerja adalah mereka yang saat pencacahan dilakukan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) bekerja sekurang-kurangnya satu jam dalam seminggu yang lalu, (2) sementara tidak bekerja karena cuti, sakit, menunggu panen dan lain-lain serta (3) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah (1) penduduk berstatus sekolah, (2) ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga dan (3) lainnya yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pensiunan, cacat, dan lain-lain yang sejenis. Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja disebut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Dilihat dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bangli terus mengalami penigkatan di tahun 2005 angkatan kerja sebesar 135.284 orang meningkat menjadi 140.025 orang ditahun 2009, dari jumlah tersebut tingkat pengganggguran terbuka sebesar 1,42% dengan TPAK sebesar 82,41%.

Tabel.2.8
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Indikator			2005	2006	2007	2008	2009
1	Penduduk Usia Kerja (15 Th Keatas) Orang		159.652	159.652	165.491	167.534	169.918
2	Angkatan Kerja		135.284	135.284	140.997	141.438	140.025
	a	Bekerja	133.060	137.805	139.067	138.040	138,040
	b	Mencari Pekerjaan	2.224	3.633	1.930	1.985	1,985

3	Pengangguran Terbuka (%)	1,64	1,64	1,37	2,57	1,42
4	TPAK (%)	84,74	74,74	85.20	84.42	82,41

Sumber : Bangli Dalam angka 2006 -2010

2.4. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan disuatu daerah yang juga merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya sehingga pembangunan secara keseluruhan juga tergerak kearah yang lebih baik.

Selama kurun periode 2005 – 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli terjadi fluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2009 dan terendah tahun 2008, dan kondisi ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, sedangkan pertumbuhan rata-rata perekonomian Kabupaten Bangli ADHK sebesar 4,58 %. Dilihat dari pertumbuhan persektor maka pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor relative melambat, sektor yang merupakan sektor unggulan yaitu sektor pertanian justru mengalami peningkatan pertumbuhan dari 6,435 di tahun 2005 menjadi 36,38% di tahun 2009 dan sektor-sektor lainnya juga mengalami peningkatan pertumbuhan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli ADHK 2000 Tahun 2005 – 2009

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1	Pertanian	6.16	5.64	4.68	0.55	36.38	5.45
2	Pertambangan dan Penggalian	7.51	2.63	1.80	1.56	1.46	3.00
3	Industri Pengolahan	3.3	5.75	5.67	7.48	8.44	6.13
4	Listrik, Gas dan Air	5.03	6.8	5.93	8.78	13.00	7.91
5	Bangunan/Konstruksi	4.93	3.83	5.88	7.44	12.83	1.86
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.16	0.81	2.88	5.40	3.23	3.10
7	Angkutan dan Komunikasi	5.15	1.31	3.99	3.80	3.11	3.47
8	Keuangan dan Persewaan	4.17	7.42	6.94	7.51	1.49	5.50
9	Jasa-jasa	3.47	5.72	5.01	5.68	5.77	5.13
	PDRB	4.46	4.25	4.48	4.02	5.71	4.58

Sumber : Bangli Dalam angka 2006 -2010

a. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah daerah adalah PDRB per kapita yang merupakan cerminan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkannya selama satu

periode (satu tahun). PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besar nilai tambah per penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan mencerminkan pertumbuhan real dari pendapatan per kapita. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bangli memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan oleh pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita Kabupaten Bangli masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali, di tahun 2005 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.6.266,3 juta,- dan ditahun 2008 meningkat menjadi Rp. 9.936,4 juta,- (ADHB). Sedangkan pendapatan perkapita riilnya ADHK tahun 2000, sebesar Rp. Rp. 4.161,5 juta di tahun 2005,- dan tahun 2009 sebesar Rp. Rp. 4.743,4 juta,-. Adapun perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Bangli dituangkan dalam Gambar 2.2.

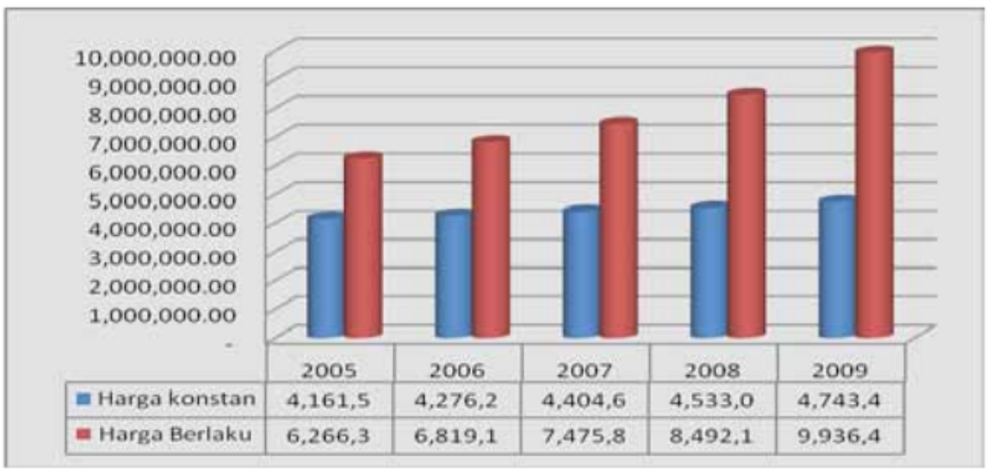

Gambar 2.2
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 – 2009

b. Pemerataan Pendapatan

Disribusi pendapatan mencermikan bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk berdasarkan klasifikasinya untuk mengukur ketimpangan tersebut dapat digunakan koefisien gini atau kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat apabila nilai koefisien gini mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin timpang dan begitu sebaliknya. Selama kurun waktu tahun 2005 – 2009, Kabupaten Bangli berada pada ketimpangan rendah, karena koefisien gininya berada dibawah 0,35, dan di tahun 2009 GR sebesar 0,2263. Menurut Bank Dunia indikator ketimpangan didasarkan hanya pada 40% penduduk berpendapatan terendah minimal 17%, sedangkan di Kabupaten Bangli tahun 2008 sebesar 26,06%.

Ini berarti selama tahun 2005 – 2009 tingkat pemerataannya tergolong rendah.

Tabel 2.10
Nilai Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2005 – 2009

Tahun	Gini Ratio	40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2005	0.2331	25.20	40.22	34.58
2006	0.2179	26.40	39.70	33.90
2007	0.2761	22.82	38.95	38.24
2008	0.2365	26.06	37.72	36.22
2009	0.2263	26.34	37.69	35.97
Rata-rata	0.2380	25.36	38.86	35.78

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2010

c. Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Dari hasil pendataan rumah tangga miskin oleh BPS (dengan mempergunakan 14 variabel) diperoleh data bahwa per 31 Mei 2006 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Bangli mencapai 13.191 rumah tangga, sedangkan hasil pendataan 31 agustus 2008 jumlah RTM mencapai 13.451 rumah tangga, ini berarti ada peningkatan sebesar 260 rumah tangga miskin, sedangkan prosentasenya menurun sebesar 1,97%.

Tabel. 2.11
Perkembangan RTM di Provinsi Bali Per 31 Desember 2008

No	Kabupaten/Kota	Data per 31 Mei 2006	Data per 31 Des 2008	Penurunan	%
1	Jembrana	6,998	5,727	1,271	18.16
2	Tabanan	11,672	11,624	48	0.41
3	Badung	5,201	3,826	1,375	26.44
4	Gianyar	7,629	7,509	120	1.57
5	Klungkung	8,460	7,988	472	5.58
6	Bangli	13,191	13,451	-260	-1.97
7	Karangasem	41,826	35,921	5,905	14.12
8	Buleleng	47,908	45,187	2,721	5.68
9	Denpasar	4,159	3,571	588	14.14
JUMLAH		147,044	134,804	12,240	8.32

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2008

Tabel.2.12
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bangli Tahun 2007 – 2008

Tingkat Kemiskinan		Tahun		% Perubahan
		2007	2008	
1	Garis Kemiskinan (RP/Kap/Bulan)	151,360	172,536	13.99
2	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	15.87	13.27	(16.38)
3	% Penduduk Miskin	7.48	6.12	(18.18)

Sumber : Bangli Dalam Angka 2009

Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia semakin baik antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bangli selama kurun waktu 1996 – 2007 terus mengalami peningkatan, yaitu IPM tahun 1996 sebesar 68,1 meningkat menjadi 69,46 di tahun 2007. Untuk peringkat nasional mengalami peningkatan peringkat dari 249 tahun 2006 menjadi 247 tahun 2007, bila dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kabupaten Bangli termasuk peringkat 6 dari 9 Kota/Kabupaten, dimana IPM Provinsi Bali tahun 2007 sebesar 70,53 termasuk peringkat 16 di Indonesia.

Tabel.2.13
Komponen IPM Kabupaten Bangli Tahun 1996 – 2009

Keterangan	Tahun								
	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Umur Harapan Hidup	69	70.5	71	71.1	71.3	71.3	71.4	71.47	71.56
Angka Melek Huruf	79.2	78.5	83.1	80.7	81.5	82.1	82.11	82.11	82.13
Rata-rata Lamanya Sekolah	5.5	5.5	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.52
Daya Beli (Ribu Rp.)	585	588.9	594.8	616.8	620.3	622	621.64	630.57	635.8
IPM BANGLI	68.1	64.4	66.7	67.9	68.7	68.9	69.46	69.72	70.18

Sumber : Bangli Dalam Angka 2009 dan BPS, Jakarta 2009

d. Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan adalah satu indikator dari kualitas sumber daya manusia, sesuai tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk menyelesaikan pendidikan dasar bagi semua anak pada tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut indikatornya adalah tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan oleh

penduduk yang putus sekolah.

APS (Angka Partisipasi Sekolah) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. APS untuk kelompok SD di Kabupaten Bangli menunjukan angka 96,60% (Bali 97,16) ini berarti dari 100 orang penduduk usia 7–12 tahun, 97 orang penduduk sedang bersekolah. Semakin tinggi jenjang kependidikan, angka partisipasi sekolah menunjukan kecendrungan menurun, ini terlihat dari APS SLTP hanya sebesar 91,17 (Bali 91,36), dan SLTA 54,56 (Bali 68,54) tahun 2008

Tingkat partisipasi sekolah secara tidak langsung juga menggambarkan kemajuan pendidikan masyarakat. Tingkat partisipasi sekolah dapat berupa angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK (Angka Partisipasi Kasar) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok umur tersebut, APK digunakan untuk melihat kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat usianya, secara matematis APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di SD tanpa melihat usianya dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. APK penduduk usia 7-12 tahun 2005 – 2009 angkanya sudah melebihi 100% yang artinya bahwa jumlah murid SD sudah lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia SD 7-12 tahun, sedangkan untuk APM pada tahun yang sama menunjukkan kisaran antara 90,19 sampai 95,37, artinya bahwa dari penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun masih ada yang tidak bersekolah pada usia 7-12 tahun. Sedangkan APK SLTP sebesar 88,44 APK SLTA sebesar 57, dan APK WAJAR sebesar 99,39 (SUSEDA, 2008).

Tabel.2.14
Jumlah Murid, Penduduk, APK dan APM Kabupaten Bangli
Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Murid SD	22,812	23,189	23,164	23,454	23,723
2	Murid Usia 7-12 Th	19,980	20,183	20,583	21,461	20.776
3	Penduduk Usia 7- 12 Th	22,154	22,828	20,583	21,461	22,347
4	APK(%)	102,97	104,07	103,48	104,23	106,16
5	APM(%)	90,19	90,58	91,15	95,37	92,97

Sumber : Bangli Dalam Angka 2005 – 2009.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satu indikatornya jumlah sekolah, secara umum perkembangan jumlah sarana pendidikan (jumlah sekolah dari tahun 2005 – 2009 mengalami penigkatan yaitu jumlah sekolah TK di tahun 2005 sebanyak 54 buah meningkat menjadi 63 buah di tahun 2009,

untuk SD di tahun 2005 sebanyak 162 meningkat menjadi 163 pda tahun 2009, SMP mengalami peningkatan sebesar 6 buah dalam kurun waktu 5 tahun (2005 - 2009) dari 20 menjadi 25 dan SMU peningkatannya hanya 2 sekolah dari tahun 2005 sebanyak 15 menjadi 17 pada tahun 2009,seperti terlihat pada gambar 2. (Tabel.2.15 dan 2. 16)

Tabel. 2.15
Jumlah Sekolah menurut tingkat Pendidikan Tahun 2005 – 2009

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
TK	54	54	63	63	63
SD	162	162	163	163	163
SMP	20	23	24	25	25
SMU	15	15	15	15	17

Sumber : Bangli Dalam angka 2006 -2010

Untuk ratio guru dengan murid selama kurun waktu 5 tahun adalah antara 15 – 18 orang untuk SD, untuk SMP anatar 12 – 16 orang dan untuk SMU antara 9 – 12 orang per 1 orang guru, secara umum ratio guru dengan murid sudah cukup memadai (Tabel.2. 16)

Tabel.2.16
Perkembangan Ratio Murid SD, SMP dan SMU Dengan Guru
Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
SD	16,01	15,32	15,11	16,14	17.89
SMP	13,38	12,24	13,37	15,95	16.47
SMU	9,52	9,36	9,89	12,04	12.58

Sumber : Bangli Dalam angka 2006 -2010

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Bangli sampai dengan tahun 2009 berupa dua rumah sakit yaitu sebuah rumah sakit umum dan sebuah rumah sakit jiwa yang merupakan satu-satunya terdapat di Provinsi Bali, 11 Puskesmas dan 59 puskesmas pembantu yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli. Rasio fasilitas kesehatan rata-rata sebesar 31,43 per 100.000 penduduk artinya setiap sekitar 1 fasilitas kesehatan mampu melayani penduduk 3,173.81 jiwa penduduk.

Tabel.2.17
Fasiltas Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rumah Sakit umum	2	2	2	2	2
2	Puskekmas	10	11	11	11	11
3	Puskesmas Pembantu	55	56	56	56	59
4	Apotik	2	6	6	6	6
5	Toko Obat	5	1	1	1	1

Sumber: Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

Tabel.2.18
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2004 – 2009

TENAGA KESEHATAN (ORANG)	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dokter Umum	40	58	52	61	69
Dokter Spesialis	13	13	14	14	15
Dokter Gigi	21	22	16	23	29
Tenaga Medis, Non Medis, PM Non Perawat	818	1.088	1.012	1.051	1,192
Jumlah	892	1,181	1,094	1,149	1,303

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli

Tabel.2.19
Rasio Tenaga Medis dan Ratio Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Ratio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk		Tahun					Rata-rata
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Dokter Umum	1.89	2.74	2.44	2.85	3,21	2,46
2	Dokter Spesialis	0.62	0.61	0.66	0.65	0,70	0,64
3	Dokter Gigi	0.99	1.04	0.75	1.08	1,26	0.97
4	Lainnya*	38.73	51.32	47.53	49.16	55,45	46,69
Jumlah		42.24	55.70	51.38	53.74	60,61	50,77
Ratio Fasilitas Kesehatan per 100.000 penduduk		30.47	31.25	32.07	31.94	34,89	31,43

Sumber : Bangli Dalam Angka , Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Hasil Analisis

Keterangan.
**Lainnya (Tenaga Medis, Non Medis, PM Non Perawat)*

Gambaran situasi derajat kesehatan masyarakat secara umum diukur dengan indikator mortalitas (kematian) dan morbilitas (kesakitan). Indikator mortalitas adalah angka kematian bayi (AKB), angka kematian Balita (AKABA), angka kematian ibu maternal (AKI), angka kematian kasar (AKK) dan umur harapan hidup lahir. Angka Kematian Bayi (AKB) *atau infant mortality rate*, menggambarkan jumlah kematian anak di bawah umur satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Bangli Periode 2005-2009 cendrung berfluktuasi dari 7,38 per 1.000 KH pada tahun 2005, meningkat pada tahun 2006 hingga tahun 2009 menjadi 11,5 per 1.000 KH. Sedangkan untuk AKABA (umur 0-5 tahun) tahun 2005 adalah 12,18 meningkat menjadi 13,2 di tahun 2009 dan AKI sebesar 87,67 di tahun 2005 mengalami peningkatan pada di tahun 2007 menjadi 106,84 dan menurun di tahun 2008 menjadi 54,22 dan meningkat kembali di tahun 2009 menjadi 107,41. Data tersebut mengambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangli selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukan penurunan, namun demikian kalau dilihat dari umur harapan hidup (UHH) selama 3 tahun terakhir (2007-2009) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 68,50 tahun meningkat menjadi 69,46 tahun pada tahun 2008 dan meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 70,05 tahun .

Angka kesakitan *(morbidity rate*) dan rata-rata lamanya sakit penduduk Kabupaten Bangli 20,39% lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Bali sebesar 22,35%, sedangkan lamanya sakit rata-rata 4,71 hari lebih tinggi dari Provinsi Bali sebesar 4,66 hari (SUSEDA, 2008). Angka kesakitan DBD mencapai 35,54% per 100.000 penduduk tahun 2008, meningkat 17,92% dari tahun 2007, TB paru 37,41% tahun 2008 menurun dibandingkan di tahun 2007 sebesar 90,67% per 100.000 penduduk. Penyakit saluran pencernaan di Kabupaten Bangli tahun 2008 adalah 1.978 per 100.000 penduduk, ini berarti menunjukan kondisi kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat perlu ditingkatkan.

Tabel. 2.20
Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Bangli
Tahun 2005 – 2009

No	Jenis Indikator	Capain				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Angka Kematian Bayi/ AKB (Bayi/1000 KH)	7.38	11.05	10.15	11.11	11,5
2	Angka Kematian Balita /AKABA (Balita/1000 KH)	12.18	7.39	11.86	10.42	13,2
3	Angka Kematian Ibu (Ibu/100.000 KH)	87.67	84.99	106.84	54.22	107,41
4	Umur Harapan Hidup (UHH)			68,50	69,46	70,05

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangli, 2006- 2010

3) Agama

Kehidupan dan kesadaran untuk menjalankan perintah agama berkembang

dengan baik. Demikian juga telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun hubungan sosial antar umat bergama baik secara intern maupun eksternal. Perkembangan fasilitas keagamaan dalam bentuk fisik seperti pura, mesjid, vihara, kelenteng dan gereja tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada fasilitas pura kayangan tiga meningkat sebanyak 24 buah pada tahun 2009 dan jumlah pemeluk agama masih tetap paling banyak adalah pemeluk Agama Hindu disusul pemeluk agama Islam, Budha, Protestan dan Katolik (Tabel 2.21)

Tabel 2.21
Perkembangan Tempat Peribadatan dan Pemeluk Agama di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Tempat Ibadah			Tahun				
			2005	2006	2007	2008	2009
Pura	1	Kayangan Tiga	506	506	506	524	748
	2	Sad Kayangan	1	2	2	2	2
	3	Dang Kayangan	101	101	101	101	101
	4	Swagina	154	429	429	429	457
	5	Paibon	683	659	553	685	652
	6	Mesjid	3	3	3	3	3
	7	Musholla	4	4	4	6	6
	8	Langgar	0	2	2	2	2
	9	Vihara	0	0	1	1	1
	10	Kelenteng	0	0	1	1	1
	11	Gereja	3	3	1	1	1
Pemeluk Agama							
	1	Hindu	209,959	211,186	211,186	211,192	215,825
	2	Islam	2,310	2,600	2,600	2,573	2,573
	3	Budha	371	382	250	386	386
	4	Protestan	126	132	310	301	301
	5	Khatolik	-	144	144	144	144

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

4) Pelayanan Umum

a) Pertanian

Titik berat pembangunan di Kabupaten Bangli masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas karena hampir 58,85 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian (primer) pada PDRB Kabupaten Bangli tahun 2008 adalah sebesar 35,05%. Komposisi sektor primer tersebut didukung oleh subsektor tanaman bahan makanan yang memberikan kontribusi sebesar 25,18% di tahun 2008. Hasil produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang sangat tergantung pada luas panen untuk bahan pangan. Dilihat dari produktivitasnya pada tahun 2009 paling tinggi untuk ubi kayu

mencapai rata-rata 22,92 ton/Ha kemudian produksi ubi jalar sebanyak 11,27 ton/Ha, padi sawah sebanyak 5,29 ton/Ha dan paling kecil adalah kacang tanah sebanyak 1,44 ton/Ha. seperti terlihat pada Tabel.2.22

Tabel.2.22
Luas Areal Panen Dan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Jenis Tanaman	2005		2006		2007		2008		2009		Rata-rata
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ton/Ha
Padi Sawah	4,798.00	23,893.50	5,845.00	31,511.82	4,963.00	25,267.47	5,219.00	26,472.00	5304	28,042.10	5.29
Padi Ladang	714.00	1,353.03	796.00	1,528.00	750.00	1,983.15	718.65	1,693.55	681	2,129.50	3.13
Jagung	2,911.00	14,113.82	2,956.00	16,014.15	3,218.00	14,956.39	2,566.00	10,949.84	3,185	5,314.10	4.81
Ubi Kayu	841.00	17,273.34	1,228.00	28,338.57	1,128.00	24,498.73	1,060.00	25,684.35	851	19,505.00	22.92
Ubi Jalar	2,503.00	40,618.68	2,768.00	34,881.65	3,833.00	53,302.85	3,533.00	47,054.15	3,366	37,934.60	1.27
Kacang Tanah	1,768.00	3,126.77	1,507.00	2,785.40	1,499.00	2,319.58	1,476.00	1,998.76	1,441.00	2,075.50	1.44

Sumber; Bangli Dalam Angka 2010

Tanaman sayuran sangat baik tumbuh pada iklim sejuk. Di Kabupaten Bangli daerah yang beriklim sejuk adalah daerah Kintamani, sehingga K9intamani merupakan daerah pengasil sayur-sayuran, produksi sayuran yang paling dominan adalah Kubis dengan produksi rata-rata pertahunnya mencapai 12,644.66 ton disusul oleh sayuran Bawang Merah dengan produksi rata-rata sebesar 12,545.87 ton dan yang ketiga adalah tomat dan cabai yang masing produksinya rata-ratanya sebesar 5,390.89 ton dan 3,560.88 ton seperti Tabel 2. 23

Tabel.2.23
Produksi Sayur-Sayuran Di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009 (Ton)

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)					Rata-rata
	2005	2006	2007	2008	2009	
Bawang Merah	9,643.30	8,884.56	15,432.25	18,940.70	9,828.56	12,545.87
Bawang Putih	698.88	1,339.52	871.71	1,250.65	1,185.90	1,069.33
Kentang	657.59	1,100.00	580	628.01	863,90	741.4
Kubis	14,478.47	11,728.48	10,247.77	11,479.78	15,288.82	12,644.66
Sawi	1,384.20	1,390.71	1,058.22	1,968.08	1,269.73	1,414.19
Kacang Panjang	59.8	39.48	35.7	51.81	51.29	47.62
Cabai	2,119.60	5,063.40	3,973.21	3,179.72	3,468.46	3,560.88
Buncis	2,978.70	3,530.88	3,122.60	4,104.61	4,489,30	3,434.20
Tomat	3,755.50	5,101.46	7,169.94	5,026.83	5,900.70	5,390.89

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

b) Perkebunan

Sub sektor perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bangli, karena sub sektor ini selain berperan dalam pembentukan PDRB juga mempunyai fungsi hidrorologis bagi daerah Bali, walaupun subsektor hanya memberikan kontribusi sebesar 1,34% terhadap PDRB Kabupaten Bangli. Komoditas hasil perkebunan yang potensial (unggulan) dikembangkan dan memiliki peluang ekspor daerah untuk Kabupaten Bangli adalah tanaman kopi Arabika dan Kakao (Agro industri). Pada tahun 2009 tercatat luas areal tanaman kopi 4.329 Ha meningkat bila dibanding pada tahun 2005 seluas 4.102,2 Ha dan Kakao dari 200,75 Ha di tahun 2005 meningkat menjadi 326 Ha di tahun 2008, sedangkan produktivitas rata-rata tanaman ini masing-masing 0,47 Ton/Ha untuk Kopi dan 0,52 Ton/Ha untuk Kakao.

Tabel. 2.24
Luas areal Panen dan Hasil Produksi Subsektor Perkebunan
Di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Jenis Tanaman	2005		2006		2007		2008		2009		Rata-rata
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ton
Cengkeh	526.68	85.94	290.43	86.19	194.47	15.24	194.00	55.08	194.00	22.17	0.11
Panili	23.53	0.41	23.53	0.43	26.01	0.13	29.00	2.06	26.00	1.22	0.05
Kakao	200.75	122.29	285.52	159.57	327.00	175.24	326.00	162.39	324.00	168.62	0.52
Kelapa	2,882.69	2,952,948	2,816.00	2,780,138	2,881.00	288,335	2,881.00	2,888,335	2,890.00	2,946,743	1,019.63
Kopi	4,102.20	4,521.34	5,044.60	2,226.11	4,593.00	1,811.01	4,289.00	1,912.08	4,329.00	2,029.67	0.47
Tembakau	19.00	12.85	10.42	-	19.00	9.63	26.00	14.00	26.00	17.74	0.68

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

Sektor unggulan yang lain yang mempunyai prospek adalah jeruk yang sudah terkenal yang sering disebut dengan jeruk Kintamani produksi jeruk rata-rata selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 85,602.16 ton, disamping jeruk produksi terbesar ke dua adalah pisang dimana produksinya mencapai rata-rata 71,086.76 ton.

Tabel.2.25
Produksi Buah-buahan di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009 (Ton)

Jenis Tanaman	Tahun					Rata-rata
	2005	2006	2007	2008	2009	
Apokat	272..3	172,30	343,08	1,026,20	532,90	423.92
Mangga	4,134.59	265,03	1784,58	14338,32	2,035.60	2,648.37
Rambutan	491,80	1,206.60	1,620.20	1,073.99	251,80	1,203.28
Jeruk	38,553.10	43,354,8	74,561.90	101,458.00	146,310.30	85,602.16
Nangka	4,189.80	7,746.40	9,662.08	4,374.72	3,288.50	5,822.90

Durian	1,298.60	197,10	923,78	178,46	449,20	928.1
Jambu Biji	126.1	329.4	163.1	169.7	90,3	1,677.07
Sawo	157.5	107.09	133.08	77.52	129,00	126.86
Pepaya	7,626.90	4,814.73	1,840.62	631.15	727,50	3,661.13
Pisang	125,189	57,651.67	48,204.92	56,002.33	70,775.83	71,086.76
Nenas	3,030.10	248.37	109.65	672.77	446,00	1,091.71
Salak	11,347.20	35,309.21	8,353.51	509.2	476,30	13,491.31

Sumber : Bangli Dalam Angka 2005 – 2010

c) Perikanan

Sub sektor perikanan mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pertumbuhan baru dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangli di masa mendatang terutama perikanan budidaya di perairan Danau Batur. Sub sektor ini baru memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 31,48% tahun 2009 meningkat bila dibandingkan tahun 2005 sebesar 4,66%. Komoditi perikanan yang paling potensial untuk dikembangkan di danau Batur dengan sistem Keramba Jaring apung (KJA) adalah ikan nila dengan luas lahan, yang baru dimanfaatkan rata-rata 0,8 ha pertahun dari potensi lahan perairan danau Batur yang dapat dikembangkan masih sangat luas yaitu maksimal 5 – 10% dari luas perairan Danau Batur sebesar 1.607,50 Ha. Produksi ikan rata-rata pertahunnya sebesar 162.861,42 ton untuk hasil perikanan budidaya, sedangkan hasil penangkapan rata-rata 109.709,92 (Tabel.4.6). Adapun benih ikan yang dihasilkan rata-rata pertahunnya sebesar 6.853.770 ekor/ tahun dengan luas pembenihan rata-rata 5,72 Ha, seperti Tabel 2.26

Tabel. 2.26
Luas Areal dan Hasil Benih Ikan Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
Luas Areal (Ha)	6,2	6,2	6,18	3,83	5,52
Hasil Benih (Ekor)	6,133,000	4,910,000	7,051,000	10,314,850	13,561,750

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

Tabel. 2.27
Luas Areal, Produksi Budidaya dan Penangkapan Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Keterangan	2005		2006		2007		2008		2009	
	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)
Pemeliharaan	166,24	168,400	15,451.35	203,500	161,90	224,000	188,25	259,3		
Kolam Rakyat	12,5	36,000	10,8	47,300	10,2	46,700.00	11,0	49,300		

Sawah	152,8	26,300	15,440.00	14,700	150,0	14,400.00	176,0	15,300.00		
Saluran Irigrasi	0,3	7,200	0,3	7,400	0,3	7,700.00	0,3	7,800.00		
Jaringan Kantong Apung	0,6	98,900	0,3	134,100	14	155,200	0,8	187		
Penangkapan	1,639,90	246,600	1,637,5	146,600	1,639,90	152,600	1,639,90	165,700		
Waduk/Dam	24	6,200	30	7,300	24	6,500	2,4	6,900		
Sungai/Telabah	30,0	96,800			3	8,300	30,0	9,200		
Danau	1,607.50	143.600.0	1,607.50	139,300	1,607,50	137,800.00	1,607,5	165,700.00		

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

d) Kehutanan

Sub sektor kehutanan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam penyediaan kayu-kayuan hasil hutan untuk bahan bangunan dan bahan baku kerajinan dan industri, juga sebagai penjagaan terhadap keseimbangan tata guna air wilayah Provinsi Bali umumnya dan Bangli khususnya. Luas hutan di Kabupaten Bangli sampai dengan tahun 2008 adalah 9.341,28 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan suaka alam, hutan wisata alam, dan sebaran hutan rakyat. Dari jumlah tersebut hutan lindung yang paling luas yaitu sekitar 6.239,01 Ha. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB adalah sebesar 0,05%. Pesatnya perkembangan pembangunan dan kepariwisataan menyebabkan kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan dan sebagai bahan baku untuk sovernir untuk wisatawan dimasa mendatang sangat dibutuhkan, sehingga ke depan perlu dikembangkan budidaya tanaman kayu albesia sebagai kayu serba guna. Potensi pengembangan ± 28.853,73 Ha.

e) Peternakan

Sub sektor peternakan mempunyai potensi yang sangat besar, karena kebutuhan pasar lokal terhadap ternak sangat besar, terutama untuk kebutuhan pariwisata, yang selama ini masing dipasok daging impor dan kebutuhan lokal. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB hanya sebesar 6,37% tahun 2008. Kabupaten Bangli mempunyai keunggulan di bidang peternakan antara lain penggemukan dan pembibitan Sapi Bali, peternakan ayam ras petelur dan pedaging dan penggemukan dan pembibitan Babi. Jumlah ternak sapi Bali di Kabupaten Bangli setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2009 jumlah ternak sapi sebanyak 95.818 ekor, jumlah ayam ras pedaging mencapai 1,223,600 ekor, petelur sebanyak 666,300 ekor, ayam buras mencapai 390,983 ekor dan Babi Bali sebanyak 13,917 dan Babi Sadle Back sebanyak 39,248 ekor seperti Tabel 2.28.

Tabel. 2.28
Populasi Ternak dan Unggas Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Jenis Ternak	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Sapi	81,512	82,632	88,831	93,725	95,818
Kambing	732	625	1,220	1409	1,481
Babi Bali	14,300	13,719	14,325	15,480	13,917
Babi Sadle Back	10,034	9,033	10,563	11,957	15,111
Babi Landrece	39,679	46,771	37,962	38,151	39,248
Ayam Buras	439,535	318,237	360,151	399,296	390,983
Ayam Ras	122	1,187,500	1,442,000	1,168,500	1,223,600
Ayam Petelur	900	210	399	589	666,300
Itik Bali	21.658	24.425	27.090	20.715	29.847

Sumber: Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli 2010

f) Industri

Sektor industri, yang berkembang di Kabupaten Bangli adalah industri kecil dan menengah. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB tahun 2008 sebesar 8,77%. Industri yang potensial dikembangkan adalah industri kerajinan yang berbahan baku dari bambu dan kayu mengingat Kabupaten Bangli adalah daerah yang memiliki ketersedian bahan baku yang cukup belimpah dan mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak, terutama tenaga kerja yang ada dipedesaan.

Perkembangan industri kecil selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, bahwa tahun 2005 jumlahnya 434 buah industri, sedangkan tahun 2009 jumlah industri kecil menurun menjadi 304. Penyerapan rata-rata tenaga kerja pada masing-masing industri kecil adalah antara 3 – 5 orang per industri. Kondisi yang sama juga dialami oleh industri kecil kerajinan rumah tanga dengan penyerapan tenaga kerja rata-rata antara 1 – 2 orang per industri, seperti terlihat pada Tabel 2.29. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM baik di bidang teknis produksi, disain maupun manajemen, disamping industri kecil yang berkembang juga peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian perlu mendapat perhatian.

Tabel. 2.29
Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jenis Industri					
	Industri Kecil	Tenaga Kerja	Rata-rata Tenaga per Industri	Ind. kerajinan RT	Tenaga Kerja	Rata-rata Tenaga per Industri
2005	434	1,638	4	9,956	17,484	
2006	493	2,594	5	11,162	15,346	1
2007	458	2,251	5	9,578	13,570	1

2008 *	304	-	-	-	-	-
2009*	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2006 - 2010

g) Perdagangan

Fungsi pokok dari perdagangan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarkat,sehingga semakin lancar distribusi barang dan jasa pada suatu daerah menandakan daerah tersebut dapat dikatakan perekonomian masyarkatnya sudah berkembang ke arah yan positif. Untuk mendukung tersebut maka iklim usaha perlu ditingkatkan, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu indikatornya adalah banyak SIUP yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang terkait dari jenis usaha selama 5 tahun (2005 – 2009) pengeluaran SIUP mengalami meningkatan seperti SIUP untuk perdagangan skala kecil dari 85 buah SIUP meningkat menjadi 139 buah di Tahun 2009, hal yang sama juga pada jenis usaha barang dan jasa yang meningkat cukup significant hal ini dapat dikatakan perekonomian Kabupaten Bangli mulai bergerak ke arah yang positif.

Tabel.2.30
Banyaknya SIUP Perdagangan Barang dan Jasa yang dikeluarkan di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Jenis Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kecil	85	97	134	139	139
Menengah	7	3	1	9	9
Besar	86	86	0	100	100
Barang & Jasa	9	15	0	52	52

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

h) Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Bangli dari tahun 2005 – 2009 terus mengalami peningkatan yaitu dari 142 buah koperasi pada tahun 2005 menjadi 192 buah koperasi pada tahun 2009, sedangkan jumlah anggota dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi tahun 2005 jumlah anggota koperasi sebanyak 46.503 orang dan tahun 2009 jumlah meningkat yaitu menjadi 47.235 orang dengan jumlah modal rata-rata sebanyak Rp. 5.765.928.022,89 pada tahun 2005 menjadi Rp 87.838.760.000 pada tahun 2009.

Gambar.2.31
Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Bangli
Tahun 2005 - 2009

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Koperasi	142	162	192	191	206
Banyak Anggota (Orang)	46.503	45.173	44.154	43.733	47.235
Banyaknya modal (Rp Juta)	31.484.75	38..122,68	7.879,58	68.218,92	87.838,76

Sumber : Bali Dalam Angka 2006 - 2010

i) Pariwisata

Sektor pariwisata, sebagai sektor lokomotif perekonomian Bali umumnya, walaupun sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu sosial, politik, keamanan baik regional, nasional maupun internasional. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten sebesar 23,21% pada tahun 2008, sedangkan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangli selama 5 tahun (2005 – 2009) sangat fluktuatif, namun pada tahun 2007- 2008 mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangli tahun 2008 hanya 16% dari total kunjungan ke Bali. Perkembangan sarana akomodasi serta fasilitasnya mengalami peningkatan dan penurunan tahun 2005 jumlah hotel sebanyak 24 meningkat menjadi 29,sedangkan jumlah kamar dan tempat tidur mengalami penurunan masing-masing 255 buah tahun 2005 menjadi 205 buah tahun 2009, untuk jumlah kamar penurunan hampir setengannya seperti terlihat pada Tabel. 2.32 Komposisi kunjungan antara wisatan manca negara dengan nusantara perbandingannya adalah rata-rata 80% berbanding 20%.

Tabel. 2.32
Jumlah Sarana Akomodasi, Kunjungan Wisatawan
Ke Kabupaten Bangli Tahun 2005 - 2009

Tahun	Sarana Akomodasi			Wisatawan		Total	Prosentase	
	Hotel Non Bintang	Kamar	Tempat Tidur	Manca negara	Nusatara		Manca negara	Nusatara
2005	24	255	402	252,850	63,213	316,063	80.00	20.00
2006	24	255	402	186,405	46,603	233,008	80.00	20.00
2007	28	275	436	255,887	62,972	318,859	80.25	19.75
2008	29	205	286	315,476	78,936	394,412	79.99	20.01
2009	29	205	286	386,705	96,676	483381	80,00	20,00

Sumber: Bangli Dalam Angka 2006-2010

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara tidak terlepas dari obyek wisata yang dimiliki oleh kabupaten Bangli. Untuk obyek wisata yang ada di kabupaten Bangli dapat di katagorikan menjadi 3 katagori yaitu (1) Obyek wisata yang sudah dikembangkan, (2) obyek wisata sedang diikembangkan dan (3) Obyek wisata yang belum dikembangkan, seperti terlihat pada Tabel. 2.33.

Tabel. 2.33

Daerah Tujuan Wisata dan Lokasi di Kabupaten Bangli

DTW	Lokasi	
I. Sudah dikembangkan	Kecamatan	Desa/ Kelurahan.
(1)	(2)	(3)
1. Penelokan	Kintamani	Batur Tengah
2.Trunyan	Kintamani	Trunyan
3. Toyobungkah	Kintamani	Batur Tengah
4. Penulisan	Kintamani	Sukawana
5. Desa Adat Pengelipuran	Bangli	Kel. Kubu
6. Kehen	Bangli	Kel. Cempaga
II. Sedang dikembangkan		
1. Pura Puncak Sari	Tembuku	Peninjoan
2. Desa Adat Pengotan	Bangli	Desa Pengotan
3. Taman Bali Raja	Bangli	Taman Bali
4. Kolam Renang Seganing	Bangli	Kel. Kawan
III Belum dikembangkan		
1. Bukit Bangli	Bangli	Kel, Cempaga
2. Bukit Jati	Bangli	Bunutin
3. Taman Sari	Bangli	Kel, Cempaga
4. Air Terjun Kuning	Bangli	Taman Bali
5. Bukit Demulih	Susut	Demulih
6. Pura Tirta Payuk	Susut	Abuan
7.Pura Dalem Bangun Lemah	Susut	Apuan
8. Bukit Serokadan	Susut	Abuan
9. Peninggalan Lesung	Susut	Abuan
10. Bukit Palasari	Tembuku	Peninjoan
11. Pura Puseh Tasik	Tembuku	Bangbang
12. LemahPantunan	Tembuku	Bangbang
13. Candi Tebing	Tembuku	Jehem
14. Panorama Desa Jehem	Tembuku	Jehem
15. Goa dan Mata Air Palasari	Tembuku	Bangbang
16. Desa Batukaang	Kintamani	Batrukaang
17. Panorama Pinggan	Kintamani	Pinggan
18. Agro Wisata Jeruk Sirsak	Kintamani	Sekaan
19. Agrowisata Taman kopi	Kintamani	Catur , Belantih
20. Air Terjun Kutuh	Kintamani	Kutuh
21. Air Terjun Desa Bunutin	Kintamani	Bunutin
22. Air Terjun Bertingkat	Kintamani	Satria

Sumber : BPS Kabupaten Bangli 2010

j) Perhubungan

Sektor perhubungan di Kabupaten Bangli ditunjukkan oleh peran angkutan umum, angkutan pribadi dan angkutan danau. Pemanfaatan angkutan umum di Kabupaten Bangli dilayani oleh keberadaan terminal Type B terdiri atas Terminal Lokasrana Bangli dan Terminal Kintamani serta sebaran Terminal Type C di Susut dan Tembuku, yang melayani angkutan antar kota dan angkutan perdesaan dengan jumlah armada yang kecenderungannya terus menurun bila dilihat data tahun 2005 berjumlah 814 buah dan tahun 2009 menurun menjadi 162 buah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli pada tahun 2004 sebanyak 28,783 unit dan pada tahun 2008 meningkat 37,570 unit, yang berarti jumlah kendaraan bermotor 5 tahun terakhir rata-rata meningkat 6,9% per tahun (lebih kecil dari Bali 12,43% pertahun).

Komposisi kendaraan bermotor pada tahun 2008 dirinci menurut jenisnya adalah mobil penumpang 1.257 unit (3,3%), mobil barang 2.944 unit (7,8%), dan sepeda motor 37.570 unit (87,6%). Komposisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap pemanfaatan sepeda motor dan mobil barang semakin tinggi dan diperkirakan dimanfaatkan sebagian untuk mengatasi kesulitan transportasi penumpang.

Angkutan danau, di Kabupaten Bangli terdapat di Danau Batur yang didukung oleh keberadaan 4 unit dermaga yaitu Dermaga Kedisan, Dermaga di Desa Trunyan, Dermaga Kuburan Trunyan, dan Dermaga Toya Bungkah. Angkutan danau selain untuk melayani kebutuhan transportasi penduduk juga untuk angkutan pariwisata. Jumlah angkutan danau relatif tetap dari data tahun 2004 sebanyak 82 dan tahun 2008 berkurang 1 buah sehingga jumlahnya sebanyak 81 buah, dan dilengkapi pula 1 buah speedboat untuk patroli keselamatan pelayaran.

Tabel. 2.34
Perkembangan Kendaraan bermotor dan Sarana Angkutan
di Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2009

Keterangan		Tahun				
Sarana Angkutan		2005	2006	2007	2008	2009
1	Angkutan Penumpang	814	814	188	162	162
2	Angkutan Barang	5,212	5,212	1,097	2,330	2,330
3	angkutan Danau	82	82	85	81	81
Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya						
1	Truck/Pick Up	2,858	2,825	2,786	2,944	2,989
2	Bus/Station	1,038	1,079	1,109	1,257	1,368
3	Jeep	272	269	286	310	309
4	Sedan	149	141	138	145	137
5	Sepeda Motor	27,746	29,260	30,531	32.914	35,078
Jumlah		28,783	32,113	33,574	34,850	39,881

Sumber: Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Bangli saat ini masih ditandai oleh tidak meratanya aksesibilitas antar desa, kualitas, ataupun cakupan pelayanan, sehingga sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan keseimbangan pembangunan wilayah. Sistem Jaringan Jalan meliputi kondisi berikut:

Panjang jalan di Kabupaten Bangli pada tahun 2008 adalah 628,404 km, terdiri atas status jalan provinsi 149.840 km (31,31%) dan jalan Kabupaten 478.564 km. Panjang jalan ini telah meningkat 32,360 km dibandingkan data 5 tahun sebelumnya, terutama penambahan pada jalan kabupaten. Jalan provinsi di Kabupaten Bangli tersebar pada 15 ruas jalan dan tidak ada jalan status nasional di Kabupaten Bangli.

Kondisi jalan Kabupaten Bangli tahun 2008 adalah kondisi baik 24,40% dan kondisi sedang 35,70%, dan 39,90% kondisi rusak, sedangkan kondisi jalan Provinsi di kabupaten Bangli adalah 58,08% baik, 41,24% sedang dan rusak 0,68%. Secara keseluruhan, jenis perkerasan permukaan jalan kabupaten di Kabupaten Bangli telah mencapai 478.564 km atau 100% sudah diaspal (Tabel.2.35)

Tingkat Pelayanan Jalan (TPJ) pada jalan-jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa sebagian menunjukkan tingkat pelayanan yang baik (tingkat pelayanan A dan B) dan hanya di beberapa ruas jalan sering mengalami perlambatan atau bahkan kemacetan pada saat-saat tertentu, seperti ruas jalan Penelokan – Batur. Kelambatan dan kemacetan pada ruas jalan tersebut kecenderungannya terjadi pada saat dilaksanakannya kegiatan pujawali di Pura Batur dan di sekitar Penelokan karena aktivitas keluar masuk parkir museum dan parkir wisata di kawasan Penelokan. Panjang jembatan di Bangli adalah 256,9 m terdiri dari 4 buah jembatan provinsi dan 9 buah jembatan kabupaten.

Tabel. 2.35

Perkembangan Panjang Jalan Dan Kondisi Jalan menurut Jenis Permukaan Serta Kondisi Jembatan Tahun 2005 – 2009

Keterangan		Tahun				
Panjang Jalan (Km)		2005	2006	2007	2008	2009
1	Aspal	446,204	446,204	467,814	478,564	478,564
2	Kerikil	-	-	-	-	-
3	Geladag	-	-	-	-	-
4	Tanah	32,360	32,360	10,750	-	-
Kondisi Jalan						
1	Baik	188,185	121,025	180,940	116,790	127,055
2	Sedang	210,997	245,754	247,850	170,842	160,243
3	Rusak	79,382	111,785	49,774	190,932	159,418
Kondisi Jembatan						
1	Baik	10	11	17	4	15
2	Sedang	14	13	9	14	3
3	Rusak	14	13	9	14	-

Sumber : Bangli Dalam Angka 2006 - 2010

Kesenian Barong Landung khas Bangli

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka dilakukan pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Koswara, 2005). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus dikurangi sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Landasan tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan tercantum dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 serta Undang-Undang no 33 tahun 2004 yang juga merupakan salah satu dasar penting penyelenggaraan otonomi daerah, Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan begitu, pengelolaan Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah

secara garis besar mencakup PAD, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Untuk itulah masing-masing daerah dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber PAD agar nantinya mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor di wilayah Republik Indonesia. PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

a. Pajak Daerah

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak, di Kabupaten Bangli terdapat enam penerimaan pajak yang masuk ke dalam kategori prima. Keenam sektor pajak yang tergolong dalam kategori prima berarti sektor tersebut telah diberdayakan secara optimal dan memiliki baik pertumbuhan maupun kontribusi di atas satu persen, diantaranya adalah:

1) Pajak Restoran
2) Pajak Reklame
3) Pajak Penerangan Jalan Umum
4) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun jenis pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk dalam kelompok prima, namun sejak tahun 2015 Kabupaten Bangli sudah tidak lagi berhak untuk menarik jenis pajak ini karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, sebagian besar wilayah pertambangan di Kabupaten Bangli berada di kawasan Geopark Batur yang merupakan kawasan dilindungi, menjadikan kegiatan pertambangan tidak lagi dilanjutkan dan dikembangkan. Karena itulah Kabupaten Bangli saat ini tengah melirik sector lain untuk digali guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Selain itu terdapat pula sektor-sektor pajak yang berada pada klasifikasi berkembang, yaitu:

1) Pajak Hotel
2) Pajak Hiburan
3) Pajak Air Bawah Tanah

Sektor-sektor pajak tersebut memiliki tingkat kontribusi yang masih rendah namun memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat. Ini menandakan sektor-sektor pajak tersebut belum digali secara optimal. Sebagai contoh, data tahun 2017 menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di Kabupaten Bangli adalah sebesar Rp. 138.399.528,60 atau berkontribusi sebesar 0,83% dari total pajak daerah Kabupaten Bangli. Sebenarnya, kontribusi pajak hotel yang hanya 0,83% dari total pajak daerah dirasakan sangat kecil mengingat Bangli memiliki banyak tempat wisata seperti Gunung Batur, Danau Batur, Penglipuran, Pura Batur, Desa Terunyan, Desa Pinggan dan lain-lain yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Rendahnya jumlah hunian hotel di Kabupaten Bangli disebabkan karena mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Bangli sangat jarang yang melakukan perjalanan lebih dari satu hari. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti fasilitas hotel yang tidak memadai, tempat wisata yang belum terintegrasi dengan baik, tidak adanya penawaran paket wisata berkeliling Bangli sebanyak 2 hari atau lebih, minimnya kegiatan yang ditawarkan pada malam hari, dan suhu udara yang cukup dingin. Tentunya dengan permasalahan tersebut perlu adanya solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Bangli untuk meningkatkan jumlah pajak hotel yang didapatkan oleh Kabupaten Bangli.

Sektor pajak hiburan di Kabupaten Bangli juga dirasa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti : (1) gaya hidup masyarakat, (2) jumlah penduduk yang rendah, dan (3) minimnya investor atau penyelenggara event yang menjadikan Bangli sebagai lokasi acara. Hiburan jenis ini cukup banyak dilaksanakan di Bangli namun sebagian besar tidak dipungut bayaran karena menyasar masyarakat lokal sebagai audiens. Kedepannya, perlu dikembangkan upaya untuk menyelenggarakan pegelaran kesenian yang menyasar wisatawan, tentunya dengan konsep dan jadwal yang lebih baik, seperti yang dilaksanakan di beberapa daerah di Bali seperti di Ubud dan Uluwatu.

Kemudian sektor pajak lain yang juga termasuk dalam kategori berkembang adalah pajak air tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 3 tahun 2011 tentang pajak air tanah dijelaskan bahwa air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian perikanan rakyat, serta peribadatan. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Air tanah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha. Adapun upaya yang dilakukan pengembangan dan peningkatan pajak air tanah di Kabupaten Bangli diantaranya adalah dengan melakukan pendataan dan pemeriksaan ke lokasi pemanfaatan air tanah serta melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada wajib pajak

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Terdapat tiga sektor retribusi di Kabupaten Bangli. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir adalah retribusi jasa usaha, dengan rata-rata kontribusi 53,68 persen. Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Subjek dari retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini. Tarif retribusi ini diitetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai. Dalam kurun waktu 2009-2017, nilai kontribusi tertinggi retribusi jasa usaha ada pada tahun 2017 yakni sebesar 83,43% dari total retribusi daerah Kabupaten Bangli.

Kontribusi terbesar kedua didapatkan dari sektor retribusi jasa umum. Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persamapahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan. Dalam kurun waktu 2009-2017, rata-rata kontribusi retribusi jasa umum sebesar 44,29 persen. Kontribusi tertinggi ada pada tahun 2009 dan 2010, dimana masing-masing kontribusi retribusi jasa umum pada tahun tersebut sebesar 68,23 persen dan 67,91 persen.

Retribusi perijinan tertentu memberikan kontribusi yang paling kecil diantara tiga kelompok retribusi yang ada. Retribusi perizinan berfungsi utama dalam pengaturan,pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dann kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Bangli meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek,

danRetribusi Perizinan Gangguan/Keramaian

Nilai rata-rata kontribusi sektor ini adalah sebesar 2,03 persen dari total retribusi daerah Kabupaten Bangli. Dalam kurun waktu tahun 2009-2017, kontribusi terbesar terhadap total retribusi daerah ada di tahun 2009 yakni sebesar 4,38 persen. Nilai kontribusi retribusi perizinan tertentu ada di titik paling rendah pada tahun 2016 dengan nilai 0,81 persen terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Bangli.

Analisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa seluruh kelompok retribusi berada pada klasifikasi prima. Namun demikian, bukan berarti retribusi-retribusi tersebut sudah tergali secara optimal. Karena jika dilihat gap rasio efektivitas dari komponen retribusi, masih terdapat komponen retribusi yang belum tergali secara optimal dimana capaian realisasinya belum sesuai dengan target, misalnya retribusi yang didapat dari pelayanan parkir.

Untuk mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah maka dapat dihitung derajat desentralisasi fiscal daerah tersebut. Reksohadiprodjo (2001) mengukur derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan rumus:

$$\textit{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan PAD Kabupaten Bangli dengan rumus tersebut telihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
PAD, Total Pendapatan dan Derajat Desentralisasi Fiskal

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	KRITERIA
2016	104.829.402.222	1.040.303.795.317	10,08	Kurang
2017	104.592.162.704	1.093.254.985.847	9,57	Sangat Kurang

Sumber: Analisis Kabupaten Bangli, 2018

Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Bangli menunjukkan nilai yang sangat rendah. Kontribusi pendapatan asli daerah pada tahun 2016 berada dalam kriteria kurang dengan nilai derajat desentralisasi fiskal 10,08, namun peningkatan pada tahun 2017 karena derajat desentralisasi kembali menurun dengan nilai desentralisasi fiskal 9,57 dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten Bangli belum mampu menjadi sumber pendapatan utama dalam pembiayaan pembangunan

daerah.

Selain itu, perlu juga diukur rasio efektivitas PAD yang terkait dengan hubungan antara output dengan tujuan. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007):

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{realisasi\ penerimaan\ PAD}{target\ penerimaan\ PAD\ yang\ ditetapkan}\ x\ 100\%$$

Perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan daerah Kabupaten Bangli yang dilihat melalui capaian realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
PAD, Target PAD dan Rasio Efektivitas

TAHUN	PAD	Target PAD	EFEKTIVITAS	KRITERIA
2009	16.301.547.341,74	13.618.376.573,00	119,70	Sangat efektif
2010	16.252.951.099,10	17.191.484.000,00	94,54	Cukup Efektif
2011	22.963.226.126,08	22.000.000.000,00	104,38	Sangat efektif
2012	40.751.049.551,70	39.000.000.000,00	104,49	Sangat efektif
2013	56.661.569.808,08	46.229.390.000,00	122,57	Sangat efektif
2014	76.141.461.018,04	66.000.000.000,00	115,37	Sangat efektif
2015	87.801.546.391,14	88.000.000.000,00	99,77	Cukup Efektif
2016	104.829.402.222,16	103.000.000.000,00	101,78	Sangat efektif
2017	104.592.162.704,09	117.499.999.999,40	89,01	Kurang Efektif

Sumber: Analisis Kabupaten Bangli, 2018

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama periode 2009 sampai dengan 2017, realisasi dari PAD Kabupaten Bangli ada yang melampaui target dan ada yang tidak. Pada tahun 2010, 2015 dan 2017 realisasi PAD Kabupaten Bangli tidak melampaui dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun-tahun lainnya realisasi PAD melampaui dari target yang ditetapkan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 122,57. Penurunan efektivitas PAD perlu mendapat perhatian khusus mengingat penurunan niilai rasio merupakan suatu alarm terjadinya penurunan kemampuan keuangan daerah dalam mencapai target penerimaan PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.

Terakhir, perlu juga diukur rasio efisiensi PAD, yakni rasio yang menggambar-

kan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.
Rasio efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2004).

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{biaya\ yang\ dikeluarkan\ untuk\ mendapatkan\ \ PAD}{realisasi\ penerimaan\ PAD}\ x\ 100\%$$

Rasio efisiensi dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok kriteria seperti terlilhat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
PAD, Biaya Peungutan dan Rasio Efisiensi

TAHUN	PAD	PERSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN		TINGKAT EFISIENSI		KRITERIA
		2%	5%			
2009	16.301.547.341,74	326.030.947	815.077.367	2%	5%	Sangat efektif
2010	16.252.951.099,10	325.059.022	812.647.555	2%	5%	Sangat efektif
2011	22.963.226.126,08	459.264.523	1.148.161.306	2%	5%	Sangat efektif
2012	40.751.049.551,70	815.020.991	2.037.552.478	2%	5%	Sangat efektif
2013	56.661.569.808,08	1.133.231.396	2.833.078.490	2%	5%	Sangat efektif
2014	76.141.461.018,04	1.522.829.220	3.807.073.051	2%	5%	Sangat efektif
2015	87.801.546.391,14	1.756.030.928	4.390.077.320	2%	5%	Sangat efektif
2016	104.829.402.222,16	2.096.588.044	5.241.470.111	2%	5%	Sangat efektif
2017	104.592.162.704,09	2.091.843.254	5.229.608.135	2%	5%	Sangat efektif

Sumber: Analisis Kabupaten Bangli, 2018

Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bangli dilakukan dengan melakukan simulasi yaitu menghitung besaran biaya pungutan dengan biaya pemungutan sebesar 2 persen dan 5 persen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa besaran biaya pemungutan 2 persen dan 5 persen merupakan besaran biaya yang masih memberikan kinerja keuangan khususnya PAD berada pada kriteria sangat efisien. Sesuai dengan pengelompokkan kriteria efisiensi, maka besaran biaya pemungutan PAD hendaknya tidak lebih dari 10 persen.

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan memiliki fungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Jumlah Dana Perimbangan untuk Kabupaten Bangli

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Hingga tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bangli sangat tinggi. Ini berarti keuangan daerah Kabupaten Bangli lebih ditopang oleh penerimaan yang berasal dari pusat dan/atau dari provinsi. Lebih dari setengah total pendapatan daerah Kabupaten Bangli berasal dari dana perimbangan.

Analisis rasio dapat menggambarkan bagaimana pola hubungan keuangan daerah dengan pusat.Identifikasi pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan sebagai landasan perencanaan keuangan daerah yang lebih mandiri. Analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan keuangan pusat dan daerah adalah:

a. Derajat ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$Rasio\ Ketergantungan = \frac{Pendapatan\ transfer}{total\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

Pendapatan transfer yang digunakan pada studi ini adalah pendapatan transfer yang yang telah disesuaikan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013. Dengan demikian, pendapatan transfer yang digunakan tidak hanya dana perimbangan namun sudah memperhitungkan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan sumbangan pihak ketiga. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Periode 2016 – 2017 adalah seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bangli 2016 – 2017

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria
2016	925.258.422.095	1.040.303.795.317	88,94%	Sangat Tinggi
2017	800.946.156.480	1.093.254.985.847	73,26%	Sangat Tinggi

Sumber: Analisa Kabupaten Bangli 2018

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah

di Kabupaten Bangli di tahun 2016 dan 2017 masih mencapai diatas 50%. Ini berarti bahwa derajat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bangli sangat tinggi, yakni lebih banyak ditopang oleh penerimaan yang berasal dari pusat dan/atau dari provinsi.

a. Derajat kemandirian

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Bisma and Susanto, 2010).

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Aasli\ Daerah}{Transfer\ pemerintah\ pusat\ atau\ provinsi\ dan\ pinjaman} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut.

TAHUN	PAD	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO KEMANDIRIAN	KRITERIA	POLA HUBUNGAN
2016	104.829.402.222	925.258.422.095	11,33	Rendah Sekali	Instruktif
2017	104.592.162.704	800.946.156.480	13,06	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Analisa Kabupaten Bangli tahun 2018

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Bangli masih rendah sekali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya Kabupaten Bangli masih belum cukup mandiri, dan justru membentuk pola instruktif (Halim, 2004) dengan Pemerintah Pusat dimana Pemerintah Pusat masih dominan dalam menunjang pemerintahan di Kabupaten Bangli.

3. Sumber Pendapatan Lain Yang Sah

Sumber pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan.

3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangli meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Rata-Rata Pertumbuhan

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	Rata2 pertum-buhan (%)
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	58.468.825.286,09	24.780.383.971,37	54.132.910.936,37	101.336.096.529,04	127.941.507.170,93	43,57
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	58.468.825.286,09	24.780.383.971,37	54.132.910.936,37	100.203.466.932,07	128.106.777.049,93	43,45
3.1.2	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-		
3.1.3	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	1.132.629.596,97	-	-25,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.664.464.473,00	1.133.363.000,00	4.489.815.153,00	4.500.000.000,00	-	59,73
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	2.576.000.000,00	500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	-	157,98
3.2.2	Pembayaran pokok utang	88.464.473,00	633.363.000,00	489.815.153,00	-	-	148,32
	PEMBIAYAAN NETTO	56.288.621.147,09	23.647.020.971,37	49.643.095.783,37	-	127.941.507.170,93	12,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	24.780.383.971,37	54.132.910.936,37	100.203.466.932,07	128.106.777.049,93	101.625.506.705,43	52,68

*sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bangli yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dan RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki resiko terkecil dan relative tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai kegiatan tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran;
3. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan.

3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun selalu diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan

dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah:

1. Menghitung kembali potensi PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Festival Desa Penglipuran, Bangli

BAB IV

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Pendahuluan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal, baik dari skala global, nasional, dan daerah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Gambar 4.1 Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Bangli

4.2 Isu Strategis Global

Kondisi geopolitik dan perekonomian global masih tetap menjadi faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan di dalam negeri. Salah satu isu terpenting dalam ruang lingkup global adalah adanya Agenda Pembangunan Paska 2015, yang lebih lanjut disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs secara resmi disahkan sebagai kesepakatan pembangunan global pada tanggal 25 September 2015 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir untuk mengesahkan agenda ini, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.

SDGs memiliki beberapa tujuan umum yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh warga dunia lewat *Myworld Survey* (*http://data.myworld2015.org/*). Adapun tujuan umum SDGs (Sustainable Development Goals) yang disahkan, yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
3. Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup;
4. Memastikan kehidupan yang sehat;
5. Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik;
6. Akses universal terhadap air dan sanitasi;
7. Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan;
8. Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil;
9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan;
10. Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif;
11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai;
12. Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global.

Agenda pembangunan Indonesia diharapkan bisa mengacu pada tujuan umum SDGs demi menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. Sejauh ini, beberapa fokus pembangunan nasional yang tercantum dalam program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menunjukkan keselarasan dengan beberapa program SDGs, di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia, seperti: kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis;
2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria;
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang

berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan;

4. Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan;
5. Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Dengan adanya desentralisasi di Indonesia, maka kesuksesan pelaksanaan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan ujung tombak implementasi kebijakan dan penyedia layanan. Tanpa peran aktif dari pemerintah daerah, maka dipastikan bahwa SDGs tidak akan terlaksana secara maksimal.

4.3 Isu Strategis di Tingkat Nasional

Setelah ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, maka arah pembangunan nasional diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang mengandung pentahapan rencana pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lebih lanjut, RPJM akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan skala prioritas dan strategi pembangunan secara bertahap. Masing-masing RPJMN merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Adapun skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah

sebagai berikut:

1. RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang seimbang.

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025

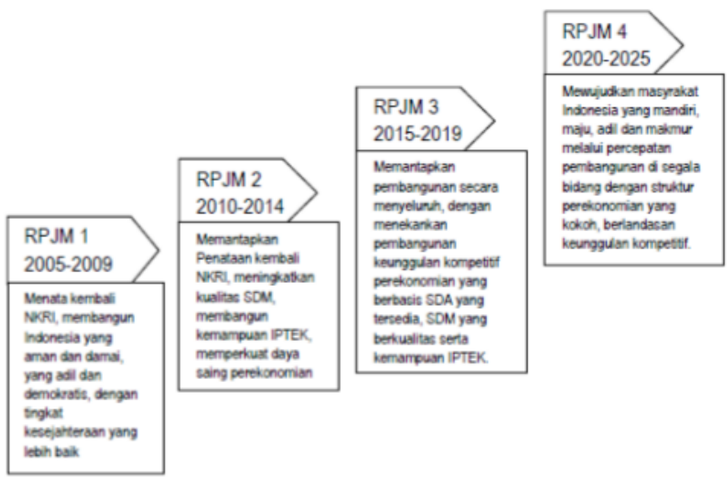

Dalam dua kali kepemimpinan Bupati Bangli, terdapat dua RPJM Nasional sebagai acuan prioritas nasional, yakni RPJM Nasional tahun 2010-2014 dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono dan RPJM Nasional 2015-2019 dibawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

4.4 Rpjm Nasional 2010-2014

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan 2009-2014 yang tertuang dalam Buku I RPJMN 2010-2014, Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

– Budiono telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Adapun prioritas yang dimaksud, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
   Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.
2. Pendidikan
   Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
3. Kesehatan;
   Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
4. Penanggulangan kemiskinan;
   Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
5. Ketahanan pangan;
   Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.
6. Infrastruktur;
   Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7. Iklim investasi dan usaha;
   Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
8. Energi;
   Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.
9. Lingkungan hidup dan bencana;
   Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik;
    Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
    Pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, meliputi karya seni, ilmu pengetahuan, teknologi tradisional, dan apresiasinya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan budaya agraris dan maritim.

Selain itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut RPJP Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Adapun prioritas dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut tidak bisa terlaksana di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan

wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Sinergi kebijakan ini menunjang terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.5 Prioritas RPJM Nasional 2015-2019

Mengawali masa jabatannya ditahun 2015, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla merumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang kemudian disebut Nawa Cita. Kesembilan agenda yang dimaksud, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

   Agenda ini mencakup dua hal yaitu tentang politik dan kedudukan Indonesia di luar negeri, serta upaya pengokohan jatidiri Indonesia sebagai negara maritime. Indonesia diharapkan mampu meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

   Sebagai sebuah negara maritim yang senantiasa memperjuangkan kepentingan nasionalnya, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, serta peningkataan kesejahteraan prajurit. Upaya penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan ini juga dilakukan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE);
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

   Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas yaitu: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, (2) meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam Politik dan Pembangunan, (3) membangun transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, (4) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

dan (5) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan public.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

   Agenda untuk membangun Indonesia dari pinggiran bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah, baik itu kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Pembangunan dari pinggiran harus dipahami secara utuh dan diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan *(linkage*), keselarasan (*harmony*) dan kemitraan (*partnership*) dengan ekonomi modern

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

   Agenda untuk memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dijabarkan melalui 6 sub agenda prioritas sebagai berikut: (1). Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (2.) Mencegah dan Memberantas Korupsi; (3.) Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (4.) Memberantas Narkoba dan Psikotropika; (5.) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan (6.) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

   Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas, yaitu: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

   Peningkatan produktivitas nasional menjadi sangat penting demi bertahan ditengah sengitnya persaingan di pasar global. Untuk itu pemerintah menyusun 11 sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda ini, yakni: (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar;

(4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (5) Menguatkan Peran Investasi; (6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; (8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; (9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

   Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik disusun 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (1) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (2) Peningkatan Ketahanan Air; (3) Peningkatan Kedaulatan Energi; (4) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (5) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (6) Penguatan Sektor Keuangan; dan (7) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

   Untuk menjadi bangsa yang maju, pendidikan Indonesia harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses membentuk karakter bangsa. Pembentukan karakter yang baik dan berdaya saing dilakukan lewat pembelajaran sepanjang hayat, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran;

9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

   Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan bisa tercapai tanpa adanya upaya memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada peranan dan fungsinya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Kebinekaan berupa keberagaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern.

4.6 Isu Strategis di Tingkat Daerah

Dalam membahas isu-isu strategis di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten Bangli sendiri, yang menjadi acuan adalah RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Kabupaten Bangli. Selama kurun waktu sepuluh tahun masa

kepemimpinan Bupati Bangli, I Made Gianyar, telah diterbitkan 2 RPJMD Provinsi, yakni RPJMD tahun 2008-2013 dan RPJMD 2014-2019. Di bawah pemerintahan Gubernur I Made Mangku Pastika, ditetapkan visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali adalah untuk mencapai **"Bali Mandara",** yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Di Kabupaten Bangli sendiri dalam jangka waktu yang sama juga diterbitkan dua RPJMD kabupaten, yakni RPJMD tahun 2010-2015 dan RPJMD tahun 2016-2021.

Bali yang Maju, diartikan adalah Bali yang dinamis dan terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap "*metaksu*" yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka.

"**Bali Aman**", adalah Bali yang "*dabdab*" teratur *sekala niskala*. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana*. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan *Tri Hita Karana,* seperti terorisme, anarkisme dan virus non-*traditional threat* lainnya yang mewarnai zaman Kali.

"**Bali Damai**", adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi "*tis*" dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana "*briyag-briyug*, *pakedek pakenyem*". Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.

"**Bali yang Sejahtera**", adalah Bali yang "*sukerta sekala niskala*" sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa.

Yang masih menjadi fokus dalam agenda pembangunan dari tahun ketahun adalah terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Artinya, proses dan hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang jelas, terarah, dan terukur, baik sasaran di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pembangunan di daerah, yakni:

1. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan berarti meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dibandingkan di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di daerah sangat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi, yang meliputi: sektor pertanian, Perikanan peternakan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa lainnya. Untuk menjamin peningkatan PDRB dari tahun ke tahun harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah. Tiga sektor penting dari semua sektor dimaksud yang harus diintensifkan sebagai upaya meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Bangli adalah sektor pertanian, perikanan,dan peternakan.

a. Pertanian

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian kabupaten Bangli. Pertanian memberikan kontribusi berupa pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Di Kabupaten Bangli, lahan pertanian terdapat sekitar 62.8% total lahan. Lahan ini dikelompokkan lagi menjadi lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Pemanfaatan sawah terdapat di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kintamani, Bangli, Susut, dan Tembuku sedangkan Kecamatan Kintamani didominasi pemanfaatan hutan, tegalan dan kebun. Data penggunaan lahan pertanian 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan Dirinci per Kecamatan

Penggunaan Lahan	*Susut*	*Bangli*	*Tembuku*	*Kintamani*	*Jumlah*	*%*
Lahan Pertanian	4.417	4.511	4.312	23.130	33.701	68,20
a. Lahan Sawah	1.241	727	808	140	2.916	5,90
b. Lahan Bukan Sawah	3.176	3.784	3.504	22.990	30.785	62,30

1) Pertanian sawah

Luas sawah di Kabupaten Bangli yaitu 2.916 Ha atau sebesar 5,90% dari luas wilayah Kabupaten Bangli. Total keseluruhan di Kabupaten Bangli terdapat 110 subak sawah yang tersebar di empat kecamatan, yaitu: 46 subak sawah di Kecamatan Bangli, 36 subak sawah di Kecamatan Susut, 23 subak sawah di Kecamatan Tembuku, dan 5 subak sawah di Kecamatan Kintamani.

Subak sawah memiliki peranan penting tidak hanya dari segi pemenuhan kebutuhan pangan dan palawija masyarakat. Keberadaan subak sawah merupakan bentuk sosio-agraris-religius, yang keberadaannya sangat terkait dengan perkembangan sosial masyarakat, ekonomi pertanian dan religius. Keterkaitan antara pertanian dan pariwisata diperankan oleh subak sawah itu sendiri, baik sebagai lembaga sosial-religius yang mendukung kebudayaan Bali, maupun sebagai lembaga agraris ekonomis yang memproduksi berbagai produk yang diperlukan pariwisata.

2) Tegalan dan Perkebunan

Penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Bangli berdasarkan data yang ada merupakan data campuran antara pemanfaatan tegalan atau lahan kering dan hortikultura yang mencapai 59,75% dari luas wilayah. Melihat data tersebut, secara sekilas dapat dilihat bahwa potensi terbesar Kabupaten Bangli adalah perkebunan. Bidang perkebunan unggulan yang diusahakan oleh petani adalah kopi Arabika, kelapa, cengkeh dan tembaka. Khusus untuk kopi Arabika menjadi komoditas unggulan daerah yang sudah diekspor di beberapa negara. Kopi Arabika Kintamani terkenal mempunyai aroma dan rasa yang spesifik yang banyak diminati diluar negeri.

Komoditas hortikultura meliputi komoditas sayur mayur dan buahbuahan serta tanaman lahan kering lainnya. Komoditas buah yang cukup menonjol di Kabupaten Bangli adalah jeruk Kintamani. Pada keyataannya tidak dapat dipisahkan secara tegas pemanfaatan lahan untuk tanaman jeruk dan tanaman kopi, karena keduanya saling bercampur (tumpangsari). Pencampuran ini telah memberikan ciri yang khas khusus kepada masing-masing komoditas dimana kopi arabika khas Kintamani lebih terasa kecut, sedangkan jeruk kintamani memiliki rasa sedikit pahit. Kedua komoditi ini dapat dikembangkan secara bersamaan.

Komoditas sayuran yang menonjol adalah bawang merah, cabe, kol dan sayuran lainnya. Sebaran lokasi pengembangan hortikultura sebagian besar terpusat di Kecamatan Kintamani. Akan tetapi, pencapaian produksi komoditas pertanian ini dilihat menurun dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan diantaranya adalah keadaan cuaca yang tidak menentu, serta serangan hama dan penyakit tanaman. Untuk itulah perlu adanya perbaikan dan regenerasi komoditas serta peningkatan SDM pertanian.

b. Perikanan

Perikanan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat strategis dan potensial di Kabupaten Bangli. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli sangat besar karena danau dan sungai yang dimiliki bisa dimanfaatkan dalam pengembangannya. Apabila potensi ini mampu dikelola dengan baik niscaya akan dapat memberikan kesejahtraan bagi masyarakat.

Komoditi perikanan yang paling potensial untuk dikembangkan di Danau Batur adalah dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) adalah ikan Nila dengan luas lahan yang baru dimanfaatkan rata-rata 0,8 Ha pertahun dari potensi lahan perairan Danau Batur yang dapat dikembangkan masih sangat luas yaitu maksimal 5% dari luas perairan Danau Batur sebesar 83,35 Ha. Produksi ikan rata-rata pertahunnya sebesar 3.862 ton untuk hasil perikanan budidaya, sedangkan hasil penangkapan rata-rata 843,45 ton.

c. Peternakan

Pada sub sektor peternakan, di Kabupaten Bangli banyak diusahakan ternak sapi, babi, dan unggas seperti ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Populasi Sapi Bali di Kabupaten Bangli pada Tahun 2015 sebanyak 72.880 ekor turun dari tahun 2010 sebanyak 97.830 ekor. Sedangkan populasi babi pada Tahun 2015 sebanyak 63.497 ekor turun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 69.280 ekor, ayam buras tahun 2015 populasiya sebanyak 421.052 ekor, ayam petelur sebanyak 1.730.300 ekor, ayam pedaging 1.803.900 ekor. Secara umum populasi unggas mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali populasi ayam pedaging mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,45% selama 6 tahun terakhir di tahun 2010-2015.

2. **Bidang Sosial dan Budaya**

Bidang sosial dan budaya merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena kedua bidang ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Bidang sosial mencakup beberapa aspek, di anataranya:

a. Kependudukan

Dalam hal kependudukan, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi', yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai

potensi untuk memanfaatkan bonus demografi, baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun, seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana. Kebijakan yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan di masing-masing pemerintah daerah.

Berbeda dengan di tingkat nasional yang berupaya mengejar bonus demografi, namun Kabupaten Bangli masih tetap melanjutkan program zaman Orde Baru dalam hal pembatasan kelahiran dengan konsep dua orang anak (laki/ perempuan) cukup. Program tersebut dipandang positif sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Program Keluarga Berencana (KB) dengan penggunaan berbagai alat kontrasepsi berjalan hingga saat ini dan berhasil menekan angka kelahiran.

Namun sejak kepemimpinan "I Wayan Koster" Gubenur Bali periode 2018-2023 dianjurkan kepada setiap keluarga memiliki 4 (empat) orang anak sebagai wujud pelestarian identitas ke-Bali-an orang Bali: Putu, Made, Rai, dan Ketut. Tampaknya ajakan Gubernur masih dalam tataran wacana, sehingga untuk sementara belum mendapat respons dari masyarakat.

b. Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak pernah selesai dibicarakan terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Permalahan klasik yang selalu muncul kepermukaan adalah persediaan lapangan kerja tidak diimbangi dengan angkatan kerja. Khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia relatif banyak menciptakan peluang kerja, sehingga dapat menekan angka pengangguran terutama bagi angkatan kerja produktif. Walaupun demikian, karena jumlah pencari kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sebagai akibatnya masih banyak warga yang belum menikmati pekerjaan. Fenomena seperti itu juga dialami di Kabupaten Bangli, yaitu terbatasnya lowongan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja sangat terbatas. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk hendaknya diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya pengangguran.

c. Kesehatan

Visi Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD 2017 adalah "Membumikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita Santi", yaitu mewujudkan masyarakat Bangli dalam lingkungan bersih dengan perilaku hidup sehat. Tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan adalah memberi pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Bermutu, memberikan pelayanan secara profesional dan proporsional; adil, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya; dan merata, artinya memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa pilih kasih.

d. Pendidikan

Persoalan pendidikan sangat penting sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia dikatakan berkualitas bilamana terwujud keseimbangan antara pendidikan akademis dan pendidikan moral, mental, dan spiritiual. Artinya, selain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan budi pekerti dan keagamaan juga sangat penting sebagai upaya membangun manusia seutuhnya yang sehat jasmani dan rohani. Proses penanaman pendidikan pada setiap orang dimulai dari keluarga (informal), sekolah (formal), dan pada masyarakat (non formal). Ketiganya sangat penting artinya untuk membangun jiwa dan kepribadian (jati diri) sesorang, karena itu harus dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Artinya, pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Revolusi mental yang kerap diwacanakan Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya (Periode 2014-2019), bertolak dari kehawatirannya terhadap dekadensi mental dan moral yang menimpa bangsa kita. Upaya mereformasi sikap mental dan perilaku yang tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa, dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat, kemudian dilengkapi dengan pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah. Untuk pelaksanaan pendidikan formal, secara umum dapat dikatakan telah berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, baik berkenaan dengan pendidikan akademis maupun vokasi. Khususnya pendidikan non formal, bahwa dewasa ini pada beberapa tempat di Bangli telah dibangun organisasi pengelola pendidikan, seperti: pasraman, yayasan, atau lembaga lainnya untuk menangani kegiatan pendidikan tersebut. Sebagai contoh, Yayasan Jayapangus, di Desa Siladan, Taman Bali, Bangli, misalnya. Pelajaran yang diberikan di lembaga tersebut, antara lain: Bahasa Inggris, Bahasa Bali, Makawin, Makidung, dan bentuk pendidikan praktis lainnya sebagai upaya meningkatkan kualitas mental dan moral anak-anak untuk mengimbangi pendidikan akademis yang diperoleh di bangku sekolah.

e. Bidang kebudayaan

Bidang ini cakupannya sangat luas dan komplek meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Namun dalam kontek pembangunan Bali yang telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pembangunan Bali berwawasan budaya dijiwai agama Hindu. Khususnya untuk Kabupaten Bangli, bahwa pemberdayaan sumber daya budaya perlu mendapat perhatian intensif. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata Bangli cukup banyak memiliki potensi budaya dengan posisi tawar yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Selama ini, Bangli hanya menghandalkan keindahan alam Kintamani, Gunung Batur, Danau Batur, Desa Trunyan sebagai DTW. Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir ini Bangli mulai berinovasi, yakni mengembangkan DTW kolam permandian yang menjadikan sumber air panas Kaldera Gunung Batur dan beroperasi sejak 2017-an. Sedangkan di pihak lain, Bangli memiliki banyak sumber daya budaya dan sumber daya saujana (sinergi budaya dan alam) yang unik dan menarik untuk dioptimalkan peran dan fungsinya dalam kapasitasnya sebagai komoditas daya tarik wisata.

f. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kebijakan strategis pembangunan daerah dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (iptek seni) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penerapan iptek juga merupakan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral demi persatuan dan kesatuan bangsa dan kemajuan peradaban daerah. Tanpa mengabaikan peran ilmu pengetahuan dan teknologi modern, Indonesia khususnya Bali (Bangli) hendaknya bangga dengan kepemilikan atas ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional. Bangli dapat berinovasi dengan menggunakan teknologi tradisional dan dalam hal pengobatan dapat menggunakan pengetahuan pengobatan tradisional (*non medic*) sebagai alternatif mengimbangi pengobatan medis.

Kemudian dalam bidang seni, Bangli memiliki kesenian khas "Barong Landung" yang lengkap dengan historis, mitologis, dan legenda hubungan Raja Bali "Jayapangus" dan Putri Cina "Kang Cing Wei" yang tidak dimiliki kabupaten/ kota di Bali; seni kerajinan topeng (tapel); seni kerajinan perak, dan lain-lain untuk dioptimalkan perannya. Khususnya seni "Barong Landung", momemnnya sangat tepat untuk dikembangkan sebagai karya seni inovatif di tengah-tengah tingginya tingkat kunjungan wisatawan Cina ke Bali.

3. Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan

Demi mewujudkan situasi dan kondisi potitik yang kondusif, maka terciptanya perlindungan dan kepastian hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus terlaksana dan harus didukung oleh tiga pilar utama, yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk Kabupaten Bangli dalam bentangan waktu hampir 20 tahun

(dua periode kepemimpinan I Nyoman Arnawa-I Made Gianyar/ 2000-2010; dan I Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta/ 2010-2020) tidak tampak terjadi dinamika politik yang bermuara pada perpecahan. Dengan motto "Gita Shanti", yaitu: Gigih, Ikhlas, Takwa, Aspiratif, Sejahtera, Aman, Nyaman, Tertib, dan Indah; cukup memberi inspirasi Bangli agar selalu dalam keadaan kondusif. Sebagai konsekuensinya, relatif kecil terjadi kasus hukum yang muncul kepermukaan. Hal itu dapat terjadi tidak terlepas dari peran pemerintah yang berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta dukungan masyarakat dan pihak swasta. Dapat dikatakan, bahwa dalam bentangan waktu selama hampir 20 tahun, secara umum pembangunan bidang politik, hukum, dan pemerintahan di Bangli berjalan dengan baik dan lancar.

4. **Bidang Sarana Prasarana**

Pengembangan sarana dan prasarana yang mencakup sarana prasarana pemukiman, sumberdaya air, listrik, transportasi, dan komunikasi adalah syarat mutlak untuk menjamin kesejahteraan warga masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari semua aspek dimaksud, salah satu persoalan penting untuk diatensi pemerintah dan diprioritaskan dalam penanganannya adalah tentang pemukiman, terutama bagi penduduk yang tergolong kedalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perlu dicatat, bahwa perihal pemukiman penduduk terutama yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru tampak kepermukaan tahun 2017, sesuai termuat dalam buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017. Berdasarkan catatan yang termuat di dalamnya, terungkap bahwa belum ada data dasar yang tersedia menyangkut MBR. Oleh karena itu, yang urgen untuk dilakukan oleh dinas terkait adalah pendataan terhadap MBR, dan hendaknya dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bangli "I Made Gianyar", untuk direkomendasikan kepada Bupati Bangli periode 2020-2025 mendatang.

5. **Bidang Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup**

Peluang untuk pengembangan wilayah telah dijamin dengan terbitnya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana Pembangunan harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk menyusun rencana rinci tata ruang sesuai kewenangannya. Lebih lanjut, peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan adalah adanya upaya untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada konteks geo-politik nasional, kita harus melihat eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia yang memiliki keanekaragaman agama, etnis, bahasa, dan kebudayaan. Kebhinekaan ini

menjadi modalitas pembangunan sekaligus memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang memperkaya Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam konteks regional maupun global.

Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Misalnya saja, dalam pemilu-pemilu yang terjadi selama satu dekade kebelakang, kita menyaksikan banyak aktor-aktor tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan ini untuk kepentingan politis sesaat. Rasa fanatisme terhadap identitas primordial dimanfaatkan untuk memantik perpecahan dan menyebabkan kekacauan di tahun-tahun politik.

Tidak jarang pula, Indonesia menjadi sasaran kepentingan politik-ideologis asing yang datang dari luar Indonesia. Terorisme menjadi salah satu ancaman keamanan negara yang dihasilkan dari ideologi fanatisme asing yang diadopsi oleh oknum-oknum yang menginginkan berdirinya negara berdasarkan ideologi yang bertentangan dengan kebinekaan ini. Model pola pikir dan ide seperti itu merupakan sebuah tantangan dan kerap muncul kepermukaan sejak masa silam. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, hendaknya kita selalu waspada dengan menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia hidup nyaman, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Dengan adanya masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia kini tengah giat-giatnya melakukan reformasi regulasi. Dalam kaitan ini, kebijakan utama yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan reformasi regulasi guna mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan tertib, serta lebih mampu mendorong kinerja perekonomian secara efisien. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi tempat berinvestasi yang menarik, dan tidak hanya menjadi pasar bagi produk negara ASEAN lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara pilihan berinvestasi, Bali merupakan salah satu daerah yang menjadi rebutan para investor, karena dipandang berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Sebagaimana diketahui, bahwa pengembangan pariwisata Bali secara besar-besaran (*mass tourism*) telah dilakukan sejak akhir periode pertama kepemimpinan Prof. Dr. I. B. Mantra (1978-1983) dan konsentrasi di Kabupaten Badung. Daerah yang menjadi pilihan untuk pembangunan sarana dan prasarana, seperti hotel berbintang, restoran, biro perjalanan wisata (BPW), sarana transportasi, dan berbagai kelengkapan lainnya, adalah: Nusa Dua, Jimbaran, Tanjung Benua, Kuta, dan wilayah lain di sekitarnya. Namun dewasa ini pilihan lokasi berinvestasi telah berkembang dan tidak hanya fokus pada kawasan pantai, tetapi telah menjamah

kepada wilayah persawahan, sungai, danau, pegunungan, dan tempat lain yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata, dengan memberikan peran lebih banyak bahkan sepenuhnya kepada warga lokal (*eco tourism*).

Kintamani (Bangli) yang sudah dikenal sejak awal bangkitnya pariwisata Bali tahun 1950-an (Vikers, 2013), dengan bermodal keindahan panorama alam danau dan gunung Batur sebagai daya tarik kunjungan wisatawan. Namun di era pariwisata global saat ini yang sarat dengan dinamika dan perubahan, dapat memotivasi bangkitnya semangat bagi investor lokal berinvestasi. DTW yang dikembangkan adalah kolam permandian dengan memanfaatkan sumber air Kaldera Danau Batur dan memilih lokasi di bagian tengah pinggiran sebelah barat danau Batur. Dua kolam permandian yang dibangun dilengkapi penginapan dan restoran, adalah: "Toya Dewasya" milik (*owner*) Dr. Ketut Marjana dan "Natural of Spring" milik Desa Adat Batur. Yang sebelumnya sekitar tahun 2010-an di bagian hilir Danau Batur telah dibangun penginapan dan restauran apung oleh Wayan Rena Wardana, S.H, MH, mantan Hakim Jakarta Selatan, asal Desa Kedisan, Kintamani, Bangli.

Dari aspek tata ruang dan lingkungan, pengembangan DTW kolam permandian di pinggir danau, selain mengganggu sempadan danau juga berpengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian pinggiran danau seharusnya bebas dari pemanfaatan bangunan dengan batas minimal 100 meter dari sempadan bibir danau. Tetapi yang tampak saat ini keberadaan pinggiran danau menyatu dengan tembok pinggiran kolam. Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, semua itu menjadi tugas dan kewajiban bagi pengelola objek dengan berbagai upaya dapat menjaga dan mengawasi sikap dan perilaku pengunjung yang dapat mencemari kesucian lingkungan alam danau. Karena menurut keyakinan Hindu, sifat-sifat seperti itu sangat berpengaruh terhadap kesucian Pura Ulun Danu Batur.

Pura Desa di Trunyan Bangli

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KABUPATEN BANGLI

5.1 Visi

Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bangli secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Bangli yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

> "***Terwujudnya masyarakat Bangli yang GITA SANTI (Gigih, Ikhlas, Takwa, Aspiratif, Sejahtera, Aman, Nyaman, Tertib dan Indah) berlandaskan Tri Hita Karana***"

Sebagai sebuah kata, ***GITA*** memiliki makna nyanyian suci Tuhan sebagai petunjuk hidup dan ***SANTI*** bermakna kedamaian. Kedamaian adalah kondisi idaman semua insan yang akan dapat terwujud dengan selalu mengikuti petunjuk atau ajaran suci Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah akronim kata ***GITA*** digunakan untuk dua jenis pemaknaan. Yang pertama, merupakan gabungan dari ***Gianyar – Sedana Artha***, sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangli periode, dan yang kedua tergabung dalam ***GITA SANTI*** yang mengandung makna kondisi ideal seperti di bawah ini.

GIGIH, di dalamnya terkandung makna ***semangat, ulet dan memiliki kepastian pendirian serta kerja keras.*** GI – TA dalam upaya mewujudkan Bangli yang SANTI akan terus memompakan semangat seluruh komponen masyarakat untuk tidak pernah menyerah dalam menangani permasalahan yang ada, baik unsur pemerintahan maupun masyarakat umum. Masyarakat Bangli harus memiliki kegigihan yang lebih untuk menutupi kekurangan lain, misalnya dalam bidang anggaran. Untuk bisa maju masyarakat Bangli perlu memaknai benar roh dari kata gigih yang di dalamnya merangkum makna: kerja keras, kerja prioritas, kerja berkualitas serta kerja yang tuntas. Kegigihan untuk menangani persoalan sendiri harus terus dikembangkan demi meraih kemandirian. Tekad untuk berbenah diri guna dapat lebih mandiri harus didengungkan ke seluruh hati masyarakat sehingga menjadi pemacu dalam pembangunan Bangli ke depan.

IKHLAS, bermakna ***tulus hati, jujur dan tanpa pamrih.*** Ikhlas adalah sifat dan sikap pengabdian yang harus ditanamkan pada seluruh komponen masyarakat Bangli

untuk terus bergerak maju menuju kondisi yang lebih baik. Aparatur pemerintah harus mengabdi dengan penuh keikhlasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep ***ngayah*** menjadi menjadi dasar filosofinya. Dengan segala bentuk kekurangan material, Bangli hanya bisa bangkit dengan keikhlasan *ngayah* untuk mengabdi kepada rakyat. Kegigihan yang dibarengi keikhlasan dipastikan menjadi dasar bagi kesuksesan Bangli ke depan.

TAKWA, di dalamnya terkandung makna ***taat dan patuh pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa serta takut melakukan pelanggaran terhadap ajaran-Nya.*** Artinya, membangun Bangli ke depan tidak boleh melepaskan ajaran agama dengan konsepsi mencegah diri untuk berbuat salah sebagai pendukung mewujudkan Bangli yang **GITA SANTI**. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terus akan dipelihara dan ditingkatkan di segala lini, dan ini juga akan menjadi pendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi yang menjadi prioritas unggulan program bagi bupati dan wakil bupati terpilih. Di samping itu, kata takwa di Bali lebih mengarah pada peningkatan rasa bakti pada seluruh komponen kehidupan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup. Rasa bakti pada Sang Hyang Widhi, bakti sesama manusia serta bakti pada lingkungan terus dibangun sehingga benar-benar terwujud masyarakat Bangli yang ***GITA SANTI*** berdasarkan Tri Hita Karana.

ASPIRATIF, mengandung makna ***sikap menghargai harapan, keinginan dan cita-cita.*** Sikap ini selalu menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah yang aspiratif akan berusaha menjauhkan arogansi dalam kekuasaan dan mengedepankan harapan, keinginan, kebutuhan dan cita-cita masyarakat yang dipimpinnya serta sekaligus yang dilayaninya. Intinya adalah memihak pada kebutuhan dan suara rakyat. Suara masyarakat dalam pengertian luas menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan di bawah payung hukum yang ada. Suara masyarakat secara umum maupun melalui perwakilannya di lembaga legislatif selalu akan diupayakan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan demikian aspiratif akan menjadi fondasi juga dalam mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

SEJAHTERA, mengandung makna ***makmur, terlepas dari segala macam kesulitan.*** Sejahtera adalah kondisi harapan kita semua. Indikator riilnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia (masyarakat), seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan tersedianya lapangan kerja. Seluruhnya didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

AMAN di dalamnya terkandung makna: ***bebas dari gangguan, terlindungi, pasti dan tidak meragukan, tidak berisiko serta tentram tidak merasa takut.*** Dalam kondisi aman kita dapat bekerja lebih nyaman guna meningkatkan kualitas

hidup menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Keamanan dalam arti luas dapat terwujud melalui penegakan disiplin dalam arti luas juga. Keamanan masyarakat harus terjamin dengan mengoptimalkan perangkat pemerintah yang berfungsi mengayomi kehidupan masyarakat secara umum. Ketika keamanan terjamin, maka ketika itu kondusivitas pembangunan akan terwujud. Pemerintah harus mampu mengimplementasikan kehidupan berdisiplin dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan – kebijakan publik sehingga jelas tanggung jawab dan akuntabilitasnya bagi masyarakat. Wajib disediakan media untuk menjamin terciptanya tanggung jawab dan akuntabilitas eksekutif terhadap DPR dan masyarakat.

NYAMAN, makna yang terkandung adalah ***sehat, segar, sedap dan sejuk.*** Kenyamanan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu kenyamanan secara fisik dan kenyamanan secara psikis. Kenyamanan fisik akan terwujud dengan meningkatkan pengelolaan komponen-komponen yang berpengaruh secara fisik seperti pembiasaan pola hidup sehat yang didukung oleh kondisi fisik lingkungan yang indah. Sementara yang lebih penting adalah mewujudkan kenyamanan psikis manusianya. Hal ini akan bisa terwujud bila terbebas dari rasa takut, terjadi pelayanan dengan dasar cinta kasih, serta terbebas dari arogansi kekuasaan. Untuk mewujudkan ini tidak terlepas dari konsep tertib yang juga menjadi acuan pembangunan di Bangli.

TERTIB, di dalamnya terkandung makna ***teratur, mengikuti aturan, rapi serta sopan.*** Pemerintahan Bangli bertekad untuk menjunjung konsep tertib ini dalam pengertian luas. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum tetap menjadi perhatian utama sebagai cerminan tertib. Di tengah upaya mewujudkan supremasi hukum, tidak harus asal labrak namun selalu mengedepankan kesopanan dengan tidak meninggalkan konsep hormat dan cinta kasih. Kekuasaan bukan untuk mewujudkan arogansi yang memporakporandakan tata aturan yang ada. Tertib merupakan wujud disiplin yang harus menjadi fondasi utama pemerintahan. Disiplin dalam makna ketaatan lahir batin kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku perlu terus dibina dan dikembangkan pada seluruh lini dengan berbagai upaya. Sikap menghormati dan menghargai tata aturan yang tertulis maupun tidak tertulis secara sportif harus dipupuk sehingga tidak ada pelanggar yang tidak siap menerima sanksi. Oleh karena itu, fokusnya adalah penegakan supremasi hukum dalam makna luas. Pembinaan dan penegakan disiplin dimulai dari para aparatur pemerintah yang diharapkan dapat menjadi teladan secara bertahap bagi masyarakat umum. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada merupakan tujuan utama sehingga dapat memperkecil tersedianya ruang untuk KKN. Pemerintah harus mampu mengimplementasikan kehidupan berdisiplin dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik sehingga jelas tanggung jawab dan akuntabilitasnya bagi masyarakat. Wajib disediakan media untuk menjamin terciptanya tanggung jawab dan akuntabilitas ekskutif terhadap DPR dan masyarakat.

INDAH, mengandung makna ***cantik, bagus dan elok.*** Kata indah lebih mengarah

pada penampilan fisik daerah Bangli. Keindahan lingkungan harus diwujudkan mengingat bahwa kita semua sangat membutuhkannya. Di samping itu keindahan adalah pendukung potensi pariwisata yang dimiliki oleh Bangli. Keindahan Bangli perlu ditata secara benar dan berkesinambungan sehingga kita merasa nyaman dan wisatawan merasa senang datang ke Bangli. Keindahan harus diwujudkan di semua tempat: mulai dari rumah tangga, tempat kerja, tempat persembahyangan bahkan sampai ke kuburan sekalipun yang pada akhirnya terbangun keindahan Bangli secara keseluruhan yang sekaligus merupakan bentuk implemtasi konsep *Tri Hita Karana*.

5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, maka dirumuskan misi utama yang harus dipertanggung jawabkan seperti di bawah ini.

1. Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengembangkan menejemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) program pembangunan.
6. Meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.
7. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien dan efektif serta mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada.
8. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang

sejahtera, aman, nyaman, dan indah atau SANTI.

5.3 Tujuan Pembangunan Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangli, perlu ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari masing-masing Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1**: "Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti: pangan, sandang dan papan", dengan tujuan:
   a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan per-ekonomian lokal (ekonomi kerakyatan) yang inovatif, kreatif, unggul, berbasis pada pertanian, pariwisata, industri kecil dan koperasi.
   b. Meningkatnya perekonomian lokal melalui peningkatan iklim usaha yang kondusif yang dapat menarik investasi.
   c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan.

2. **Misi 2"** Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai", dengan tujuan:
   a. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
   b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
   c. Menguatnya ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan perikanan, industri kecil, perdagangan, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata.
   d. Meningkatnya sistem pendukung manajemen pembangunan untuk mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).

3. **Misi 3:** "Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat", dengan tujuan:
   a. Meningkatnya pengelolaan potensi PAD yang akuntabel, jujur, dan trasnparan.
   b. Meningkatnya potensi sumber-sumber PAD untuk pembeayaan pembangunan daerah.
   c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban retribusi daerah dan pajak daerah lainnya.

4. **Misi 4:** "Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja", dengan tujuan:
   a. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran, dan kemiskinan.
   b. Terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif sebagai sumber pendanaan dan meningkatnya daya saing perekonomian daerah.
   c. Meningkatnya kapasitas pendukung infrastruktur fisik yang memadai dan investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk penciptaan lapangan kerja.
   d. Terwujudnya pendataan penduduk miskin dan pengangguran secara terpadu lintas sektor.
   e. Meningkatnya keterampilan pencari kerja serta pengembangan kemampuan lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4 **Misi 5:** "Mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) pogram pembangunan", dengan tujuan:
   a. Meningkatnya perluasan akses, ketersediaan, dan mutu serta daya saing pendidikan bagi masyarakat.
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan.
   c. Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, perolehan devisa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang dicerminkan dari meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan semakin meningkatnya kontribusi

pariwisata dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah dan lingkungan hidup.

d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis yang didukung oleh sumber daya kultur dan aspek sosial budaya sesuai dengan *Tri Hita Karana*.

5 **Misi 6:** "Meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Mahaesa", dengan tujuan:

a. Terwujudnya aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat.

b. Terwujudnya aparatur yang gigih, iklas, takwa, dan aspiratif yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi, bakti sesama manusia serta bakti pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

6 **Misi 7:** "Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efesien dan efektif dan mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada", dengan tujuan:

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efisien, efektif, dan produktif untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

b. Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu kepada seluruh masyarakat.

c. Meningkatkan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

7 **Misi 8:** "Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah atau SANTI", dengan tujuan:

a. Terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta pelestarian kekayaan budaya daerah.

b. Meningkatnya apresiasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan kekayaan budaya lokal.

c. Meningkatnya persatuan, persaudaraan, dan rasa memiliki dan tanggung

jawab guna mencapai pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah atau SANTI.

5.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2011 – 2015.

Dalam melaksanakan misi pertama: "Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata, industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya seperti pangan, sandang, dan papan" ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia (masyarakat) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan tersedianya lapangan kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor growth*).
3. Meningkatnya iklim investasi untuk perluasan investasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah.
5. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan.

Dalam melaksanakan misi kedua: "Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai", ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Meningkatnya daya saing bagi barang dan jasa yang memiliki tingkat kemampuan untuk bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan pembangunan untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya daya saing sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi menuju industri yang kreatif, berdaya saing dan produktif.
4. Meningkatnya kemampuan daya saing daerah.
5. Meningkatnya sumber-sumber ekonomi lokal yang unggul dan berdaya

saing lokal, regional dan global.

6. Meningkatnya peran UMKM, lembaga keuangan mikro, koperasi sebagai sentra ekonomi masyarakat.
7. Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan serta industri kecil, mikro dan menengah serta sektor perdagangan dan koperasi .
8. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya yang didukung oleh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan industri kecil.
9. Meningkatnya daya saing dan diversifikasi produk komoditas ekspor dan perdagangan domestik.
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
11. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat secara merata dan proporsional.

Dalam melaksanakan misi ketiga: "Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan efisiensi dan efektivitas pemungutan dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat", ditetapkan beberapa sasaran pokok, yaitu:

1. Optimalnya pengelolaan PAD Kabupaten Bangli.
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan PAD.
3. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah.
4. Meningkatnya pembangunan sektor ekonomi yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD secara langsung.
5. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban retribusi dan pajak daerah.

Dalam melaksanakan misi keempat: "Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja", ditetapkan beberapa sasaran pokok, yaitu:

1. Meningkatnya administrasi kependudukan dan manajemen pengelolaan kependudukan.
2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan perlindungan anak.
3. Meningkatnya akses investasi sampai pelosok daerah di daerah yang mampu mencipakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
4. Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
5. Meningkatnya kemampuan keterampilan calon pencari kerja.
6. Meningkatnya hubungan yang harmonis antara lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan misi kelima:" Mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) pogram pembangunan", ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pendidikan yang menjamin tercapainya sistem pendidikan yang efisien, efektif, dan berkualitas dan tersedianya data informasi pendidikan yang lengkap untuk layanan masyarakat.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi yang baik sehingga tercapai suasana proses belajar mengajar yang kondusif.
3. Meningkatnya sumber daya manusia kependidikan yang memadai sesuai dengan spesifikasinya dan distribusi yang merata.
4. Meningkatnya angka partisipasi dan tingkat pemerataan pendidikan serta meningkatkan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara optimal.
6. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebersihan lingkungan.
7. Meningkatnya manajemen kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas, dan berkesinambungan.
8. Meningkatnya peranan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pembangunan pariwisata sebagai wahana pelestarian budaya dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan dengan berdasarkan *Tri Hita Karana* yang dipadukan dengan teknologi modern.

Dalam melaksanakan misi keenam:" Meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Mahaesa", ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih efisien dan optimal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai.
3. Tewujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efisien, efektif dan produktif untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

4. Meningkatnya rasa keimanan dan rasa sradha bakti terhadap Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Mahaesa, untuk menciptakan aparatur yang jujur, bersih dan bertanggungjawab.
5. Meningkatnya inovasi dan kreativitas yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi, bakti sesama manusia serta bakti pada lingkungan untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam melaksanakan misi ketujuh:"Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efesien dan efektif dan mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada", ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, demokratis, jujur, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya pelayanan publik secara *responsive*, akuntabel dan efisien kepada masyarakat.
3. Meningkatnya penegakan hukum yang mampu menghasilkan keputusan yang adil dan dapat mengayomi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam melaksanakan misi kedelapan:" Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah atau SANTI", ditetapkan beberapa sasaran pokok yaitu:

1. Terlaksananya pengarusutamaan nilai-nilai adat dan budaya pada berbagai aspek pembangunan serta mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan kreativitas budaya daerah.
2. Meningkatnya penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal yang dijiwai oleh Agama Hindu dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi.
3. Meningkatnya kualitas berbudaya masyarakat dan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, serta terciptanya ketahanan budaya yang kokoh.

Meningkatnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh termasuk masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan) sebagai pelaku pembangunan di segala bidang.

Festival Budaya HUT Kabupaten Bangli

BAB VI

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu upaya sistematis dengan melibatkan seluruh komponen bangsa demi meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, proses pembangunan di tingkat daerah pun harus menjunjung tujuan yang sama.

Demi pencapaian yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel maka pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis dan terencana dengan dilengkapi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Strategi juga memiliki fungsi vital dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan sebenarnya akan selalu mengalami revisi mengikuti tiap periode RPJMD yang baru. Namun untuk memudahkan pembahasan dan dengan melihat keadaan terbaru di lapangan, maka strategi dan arah kebijakan yang dibahas lebih mendalam adalah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangli di tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan ini dirumuskan demi tercapainya 9 (sembilan) misi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021.

Misi 1: Membangkitkan perekonomian lokal

Pengembangan Ekoomi Lokal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli bersama organisasi-organsisasi masyarakat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan melakui kegiatan-kegiatan ekonomi yang cocok dengan Sumber Daya Masyarakat yang tersedia serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi besar dibidang pertanian dan perikanan, maka pemerintah Kabupaten Bangli berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan
2. Penguatan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arah kebijakan:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan
2. Memetakan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan termasuk sayuran
4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi kelapa sebagai perkebunan ungulan
5. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi sapi bali, babi bali , itik bali, dan ayam bali
6. Memperkuat peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sawah, perlindungan
7. sumber daya air, kesuburan tanah, dan akses produksi
8. Meningkatkan produksi buah lokal, seperti sawo dan wani.
9. Mengaktifkan sekee manyi
10. Memperkuat kelembagaan Subak
11. Mempertegas peningkatan kedaulatan beras
12. Mengembangkan kelestarian pertanian Tanaman Bumi Banten
13. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
14. Pengembangan kerajinan tenun di pedesaan dan perkotaan

Misi 2: Meningkatkan pendapatan asli daerah

Proses resentralisasi yang diamanatkan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangli. Daerah kini dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya dan tidak lagi bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar dalam memobilsasi dana penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Bangli menggerakan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan PAD yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

Strategi:

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Arah kebijakan:

1. Pemetaan dan penggalian potensi PAD
2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Meningkatkan Pengendalian Perijinan

Misi 3 : Pembenahan tata kelola objek wisata

Kabupaten Bangli memiliki beberapa objek wisata yang tentu tidak kalah menarik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Bali, seperti misalnya Desa Penglipuran, Pura Kehen, Desa Kintamani, dan Kompleks Batur UNESCO Global Geopark. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, ini merupakan peluang yang besar untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal melalui strategi dan pengembangan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi:

1. Pembangunan, peningkatan insfrastruktur penunjang objek wisata.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang dan objek wisata.
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas perhubungan, pengelolaan komunikasi dan informatika.

Arah kebijakan:

1. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata (DTW)
2. Meningkatkan pelestarian panorama alam dan daerah tujuan wisata
3. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, tahura dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan
4. Meningkatkan kualitas tataruang dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW)
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan, komunikasi, dan informatika

Misi 4 : Menekan angka pengangguran dan kemiskinan

Kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu masalah yang rumit dan selalu menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah Daerah telah melakukan beberapa strategi yang menitikberatkan pada investasi dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada masyarakat kurang mampu sebagai berikut.

Strategi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sosial.

Arah kebijakan:

1. Memastikan jaminan sosial
2. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia usaha dan potensi lokal
3. Peningkatkan Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (Gerbangdesigot) dan Gerakan pembangunan Sistem Gotong Royong Kota (Gerbangsigota)
4. Membina dan memberdayakan organisasi perempuan
5. Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah)
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
7. Peningkatan akses kesehatan melalui Poskesdes, Polindes dan Pustu
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk yang kurang mampu
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan PHBS
10. Meningkatkan perlingdungan perempuan dan anak
11. Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian ber-KB
12. Meningkatkan penangan terhadap fakir miskin dan PMKS
13. Meningkatkan minat dan kualitas para calon transmigran
14. Meningkatkan tertib administrasi umum.

Misi 5: Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan

Salah satu kunci dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) di daerah. Peningkatan kapasitas SDM ini salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan akses dan peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan berkualitas dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Program peningkatan kapasitas ini terus dikaji dan dioptimalkan melalui strategi dan arah kebijakan berikut ini.

Strategi

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan pariwisata
2. Peningkatan cakupan pengelolaan, penataan lingkungan hidup dan partisipsi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Arah Kebijakan:

1. Memantapkan pemenuhan kebutuhan PAUD/TK
2. Memantapkan pemenuhan kebutuhan Dikdas da Wajar 9 Tahun
3. Mendukung Wajar 12 tahun
4. Meningkatkan tatakelola perpustakaan dan arsip
5. Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana prasarana olahraga
6. Mengembangkan destinasi wisata baru: Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam dll.
7. Pengembangan SDM Pariwisata dengan melibatkan desa adat.
8. Meningkatkan kelestarian lingkungan termasuk pengendalian pemanfaatan danau
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, danau), dan daerah perlindungan jurang.

Misi 6 : Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat

Penguatan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam pencapaian kepentingan publik. Dengan adanya peningkatan kelembagaan, maka akan lebih mudah meningkatan produktivitas dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Penguatan kelembagaan ini dilaksanakan secara terpadu dan berdasarkan atas kebutuhan daerah Kabupaten Bangli melalui strategi dan arah kebijakan berikut ini.

Strategi:

1. Peningkatan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah
2. Peningkatan SDM Aparatur Desa, Desa Adat/Desa Pekraman dan Banjar Adat/Banjar Pekraman
3. Peningkatan kesadaran berbangsa dan Bernegara

Arah kebijakan:

1. Penguatan keberadaan Desa Adat
2. Meningkatkan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah
3. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah

4. Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan
5. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan Bernegara

Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien

Perwujudan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efisien sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dan birokrasi adalah satu komponen dari pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Diharapkan dengan adanya perubahan pada sistem kelembagaan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan setiap unit kerja dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan akhir dari reformasi kelembagaan dan birokrasi sudah tentu agar pelayanan publik semakin meningkat kualitasnya. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah:

Strategi:

1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas data/informasi pendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
4. Penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK strategis daerah

Arah kebijakan:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
4. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat Bangli untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
7. Mengembangkan Inovasi dan teknologi tepat Guna

Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. UKM yang berbasis ekonomi kreatif yang bertumpu pada kreativitas, keahlian, dan talenta lokal kini tengah banyak dilirik baik di tingkat nasional maupun daerah. Manfaat ekonomi kreatif tidak hanya dirasakan dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, namun juga memberi dampak positif pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan peningkatan citra daerah. Strategi dan arah kebijakan yang

diimplementasikan diantaranya:

Strategi

1. Peningkatan produksivitas kualitas Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan produktivitas usaha berbasis ekonomi kreatif

Arah Kebijakan

1. Peningkatan produksivitas kualitas Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan produktivitas usaha berbasis ekonomi kreatif Arah Kebijakan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM
4. Mengembangkan industri ungulan daerah yang potensial.
5. Meningkatkan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

Misi 9: Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal

Sebagai sebuah proses yang multidimensional, pembangunan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non-fisik dimana didalamnya terdapat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tidak boleh diabaikan. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai ini memiliki urgensi untuk disertakan dalam program pembangunan untuk menghindari tergerusnya budaya lokal ditengah arus modernisasi, serta untuk mengoptimalkan hasil dari pembangunan itu sendiri. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang dilakukan antaranya:

Strategi

1. Pelestarian seni dan budaya daerah
2. Pengembangan seni dan budaya daerah Arah Kebijakan
3. Mengembangkan dan merevitalisasi seni budaya Bali
4. Merestorasi peninggalan budaya
5. Merevitalisasi keberadaan Listibya
6. Membangun sarana dan prasarana kesenian
7. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal
8. Menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal
9. Meningkatkan kerukunan antar umat beragam.

Arah kebijakan

1. Mengembangkan dan merevitalisasi seni budaya Bali
2. Merestorasi peninggalan budaya
3. Merevitalisasi keberadaan Listibya
4. Membangun sarana dan prasarana kesenian
5. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal
6. Menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal
7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

6.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah diformulasikan dalam sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan memperhatikan strategi, arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencakup tahun 2015-2019, maka ditetapkan program prioritas Kabupaten Bangli sebagai berikut:

1. Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan.
2. Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.
3. Program peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang.
5. Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang.
6. Program optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten.
7. Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.
8. Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat.
9. Program dukungan pada layanan keagamaan.
10. Program peningkatan pelestarian budaya.
11. Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
12. Program pembenahan tata kelola pariwisata.
13. Program peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah. Adapun program prioritas Kabupaten Bangli yang telah tersusun tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Bali.

1. RPJM Nasional

Dalam RPJM Nasional 2014-2019 ditetapkan sembilan agenda prioritas yang kemudian disebut dengan Nawa Cita. Sembilan agenda ini digunakan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan.

Prioritas pembangunan di kabupaten Bangli ini sudah mengikuti arahan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional terkait dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli dan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli	**Program Prioritas Nasional**
1	Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan.	Prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan
		Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
2	Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.	Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi
		Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
3	Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.	Prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
4	Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang.	Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
5	Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang.	Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
6	Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.	Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
7	Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.	Prioritas Pembangunan Pendidikan
		Prioritas Pembangunan Kesehatan
		Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
8	Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat.	Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif
		Prioritas Pembangunan AntarWilayah Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
9	Program dukungan pada layanan keagamaan.	Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
10	Program peningkatan pelestarian budaya	Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif
11	Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan
		Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan
12	Program pembenahan tata kelola pariwisata.	Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif
13	Program peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien.	Prioritas Pembangunan Antar Wilayah
		Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan

2. RMJMD Provinsi

Sesuai dengan program pembangunan daerah Provinsi Bali yang tertera dalam RPJMD 2013-2018, maka kebijakan Pembangunan Provinsi Bali Provinsi Bali yang perlu didukung Kabupaten Bangli adalah : (1) peningkatan kualitas SDM

sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli	**Program Prioritas Provinsi Bali**
1	Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan.	Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana
3	Program peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.	Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
5	Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang.	Penanggulangan Kemiskinan Dan Penguranga Pengangguran Program prioritas pembangunan
		Infrastruktur
6	Program optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten.	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
7	Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
		Kesehatan
		Pendidikan
8	Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat.	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Program dukungan pada layanan keagamaan.	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
		Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Program peningkatan pelestarian budaya.	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11	Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
12	Program pembenahan tata kelola pariwisata.	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13	Program peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program prioritas dijabarkan lebih lanjut dalam program pembangunan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014. Program pembangunan daerah ini dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten sesuai dengan amanat Permendagri 54/2010 minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Perangkat Daerah berkenaan.
3. Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Program pembangunan daerah Kabupaten Bangli diuraikan sebagai berikut:

1. Program Setiap Perangkat Derah

Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Program peningkatan disiplin aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
f. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan.

2. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan

Program pembangunan terkait dengan urusan dijabarkan lebih lanjut menjadi:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Layanan Dasar

1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
6) Sosial

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar

1) Tenaga Kerja

2) Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
3) Pangan
4) Pertanahan
5) Lingkungan hidup
6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9) Perhubungan
10) Komunikasi dan informatika
11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12) Kepemudaan dan olahraga
13) Statistik
14) Persandian
15) Kebudayaan
16) Perpustakaan
17) Kearsipan

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
2) Pariwisata
3) Pertanian
4) Kehutanan
5) Energi Dan Sumber Daya Mineral
6) Perdagangan
7) Perindustrian
8) Transmigrasi

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan
2) Keuangan
3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
4) Penelitian dan pengembangan
5) Sekretariat DPRD
6) Sekretariat Daerah
7) Inspektorat
8) Kesbang Poldagri
9) Perizinan Terpadu
10) Penanggulangan Bencana Daerah
11) Kecamatan.

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

7.1 RENCANA PROGRAM

Rencana program Pemerintah Kabupatn Bangli dalam dua periode, yaitu periode Tahun 2010-2016 dan periode Tahun 2016-2021 selanjutnya diuraikan berikut ini.

1. Periode Tahun 2010-2016

a. Urusan Wajib

Program yang direncanakan terkait dengan urusan wajib selama periode Tahun 2010-2015 meliputi 27 bidang yang selanjutnya diuraikan berikut ini.

1) Bidang Pendidikan meliputi 7 jenis program, yaitu: pendidikan usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan pendidikan bagi anak miskin.
2) Bidang Kesehatan meliputi 23 jenis program, yaitu: obat dan perbekelan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan pelayanan kesehatan lansia, pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, standardisasi pelayanan kesehatan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kemitraan dan peningkatan pelayanan masyarakat, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, pelayanan laboratorium, pengembangan rumah sakit daerah, peningkatan kualitas RSUD tingkat nasional, pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit daerah dan akses pelayanan kesehatan daerah terpencil.
3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas 7 program yaitu: pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

pencapaian kinerja dan keuangan, pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

4) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 13 program, yaitu: pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong–gorong, pembangunan turap/talud/bronjong, rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, inspeksi kondisi jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, penyediaan dan pengolahan air baku, pengembangan, pengelolaan, dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5) Bidang Perencanaan dan Pembangunan meliputi 7 program, yaitu: pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan upacara nasional, daerah, dan keagamaan dan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
6) Bidang Perumahan dan pemukiman terdiri atas satu program yaitu kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
7) Bidang Kepemudaan dan Olah raga terdiri atas 7 jenis, yaitu: peningkatan mutu dan kuantitas kebijakan pemuda, mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pencegahan penyalahgunaan narkoba, kebijakan dan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan sarana dan prasarana olahraga.
8) Bidang Penanaman Modal meliputi 3 jenis program, yaitu: peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan peningkatan penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah.
9) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi 4 jenis program, yaitu: penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 15 program berikut: Administrasi Kependudukan (KK dan KTP), Administrasi Akta Catatan Sipil, Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Administrasi Kependudukan, Peningkatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Penduduk, Pengoperasian SIAK secara terpadu, Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pembentukan dan Penataan

Sistem Koneksi Jaringan, Pelayanan Langsung Akta-Akta Capil, Pelayanan Prima Akta-Akta Sipil, Pelayanan Langsung KK dan KTP, Pelayanan Prima KK dan KTP dan Peningkatan Mobilitas Penduduk.

11) Bidang Ketenagakerjaan meliputi: peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja.
12) Bidang Ketahanan pangan terdiri atas: Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
13) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 5 program, yaitu: keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan pengasutaan gender dan anak.
14) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi 5 program berikut: keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, ketahanan dan pemberdayaan keluarga dan mutu dan kuantitas kesehatan reproduksi remaja.
15) Bidang Perhubungan terdiri atas 6 program, yaitu: pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
16) Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi 5 program, yaitu: pengembangan komunikasi informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi, penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik dan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
17) Bidang pertanahan meliputi program: penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah; dan penyelesaian konflik–konflik pertanahan.
18) Bidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri atas 5 program, yaitu: Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dan Pendidikan Politik Masyarakat.
19) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada penunjang urusan pemerintahan daerah keuangan meliputi 4 program, yaitu: Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Sistem Pengawasan. Sedangkan pada penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian, pendi-

dikan dan pelatihan terdiri atas 2 program yaitu: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan dan pengembangan aparatur. Selanjutnya pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar persandian terdiri atas satu program yaitu: pengembangan persandian daerah.

20) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas 3 program yaitu: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan, Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

21) Bidang Sosial meliputi 6 program, yaitu: pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

22) Bidang Kebudayaan meliputi 5 program, yaitu: pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

23) Bidang Statistik meliputi program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

24) Bidang Kearsipan terdiri atas 4 program yaitu: perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi.

25) Bidang Perpustakaan meliputi program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

b. Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas 6 bidang sebagai berikut.

1) Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri atas 6 program yaitu: Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan, Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Pengembangan Perikanan Budidaya, Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.

2) Bidang Pertanian meliputi 7 program, yaitu: peningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan), peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dan pengembangan agribisnis.

3) Bidang Kehutanan meliputi 5 program berikut: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Perencanaan Dan Pengembangan Hutan, serta program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
4) Bidang Energi dan Sumber Daya Alam meliputi program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
5) Bidang Pariwisata terdiri atas 10 program, yaitu: pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan objek/daerah pariwisata unggulan, pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pengelolaan jasa pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara dan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversivikasi produk pelayanan pariwisata yang standar berdaya saing.
6) Bidang Industri dan Perdagangan terdiri atas 16 program berikut: peningkatan kapasitas iptek sistem industri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri potensial, kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta, pengembangan tata kelola usaha industri, pengembangan industri pengolahan (agroindustri) hasil industri serta jasa pendukungnya, pengembangan usaha produksi industri dari hulu hingga hilir, kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi, pengembangan modal ventura dan inkubator, penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, kerja sama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional, kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk, pengembangan kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan, pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri, pengembangan data dan informasi industri dan perdagangan dan pengawasan legislasi usaha industri. Sedangkan pada urusan pilihan perdagangan ada 6 program, yaitu: perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah, pengembangan ekspor dan impor daerah, pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional, serta program pengawasan legislasi usaha perdagangan.

2. Periode Tahun 2016-2021

a. Urusan Wajib

1) Bidang Pendidikan meliputi 7 program, yaitu: program pendidikan usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen

pelayanan pendidikan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

2) Bidang Kesehatan terdiri atas 20 program, yaitu: program obat dan perbekelan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli indonesia, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan lansia, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, bantuan operasional kesehatan (BOK), kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan pengembangan mutu sdm pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, pengembangan rumah sakit daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD.

3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas 6 program, yaitu: program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 14 jenis program, yakni: program pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong–gorong, pembangunan turap/talud/bronjong, rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jarlngan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan infrasturktur pedesaan.

5) Bidang Perencanaan dan Pembangunan dengan 7 jenis program, yaitu: program Kerjasama Pembangunan, perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Perencanaan Sosial Budaya dan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

6) Bidang Perumahan dan pemukiman terdiri atas 4 program, yaitu: program pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas perumahan dan pengelolaan areal pemakaman.

8) Bidang Kepemudaan dan Olah raga dengan program yaitu : peningkatan peran

serta kepemudaan dan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

9) Bidang Penanaman Modal dengan dua program yaitu: peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 4 jenis program, yaitu: program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang konduksif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

11) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil programnya adalah: penataan administrasi kependudukan.

12) Bidang Ketenagakerjaan pada yang tidak berkaitan dengan layanan dasar tenaga kerja meliputi 3 program, yakni: program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

13) Bidang Ketahanan pangan yang berkaitan dengan layanan dasar pangan terdiri atas 2 program yaitu: program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

14) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi 4 program, yaitu: program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

15) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas 11 program, yakni: program keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk HIV/AIDS, pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga, nyama anyar dan posdaya.

16) Bidang Perhubungan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar perhubungan meliputi 6 program, yaitu: program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

17) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tidak berkaitan dengan layanan dasar komunikasi dan informatika terdiri atas 4 program, yaitu: program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dan kerjasama informasi dengan mas media.
18) Bidang pertanahan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pertanahan meliputi 2 program berikut, yaitu: program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta program penyelesaian konflik–konflik pertanah.
19) Bidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri tidak ada program pada periode tahun 2016-2021.
20) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada penunjang urusan pemerintahan daerah keuangan terdiri atas 2 program, yaitu: program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan dan program fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten. sedangkan pada penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri atas 2 program, yaitu: program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan dan program pengembangan aparatur. sementara pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar persandian ada satu program kerja yaitu: pengembangan persandian daerah
21) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri atas 4 program, yaitu: program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Penguatan SDM Desa dan Banjar dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin.
22) Bidang Sosial yang berkaitan dengan layanan dasar sosial terdiri atas 7 program, yakni: program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
23) Bidang Kebudayaan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar kebudayaan dengan 4 program, yaitu: program pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
24) Bidang Statistik yang tidak berkaitan dengan layanan dasar statistik dengan satu program, yaitu: pengembangan data/informasi/statistik daerah.

25) Bidang Kearsipan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar kearsipan dengan 4 program, yaitu: program perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi.
26) Bidang Perpustakaan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar perpustakaan memiliki 2 program, yaitu: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah.

b. Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas 6 bidang dengan masing-masing program berikut.

1) Bidang Peternakan dan Perikanan pada urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan dengan satu program yaitu: pengembangan budidaya perikanan.
2) Bidang Pertanian dengan 9 program, yaitu: peningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan), peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, pengembangan agribisnis, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan program peningkatan produksi hasil peternakan.
3) Bidang Kehutanan dengan 2 program yaitu: pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
4) Bidang Energi dan Sumber Daya Alam pada urusan pilihan energi dan sumber daya mineral dengan satu program, yaitu: pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
5) Bidang Pariwisata memiliki 5 program, yaitu: Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan, Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur dan pembenahan tata kelola dan Penatan Obyek-obyek Wisata.
6) Bidang Industri dan Perdagangan dengan 4 program, yakni: peningkatan kapasitas iptek sistim produksi, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri dan pengembangan sentra-sentra industri potensial. sedangkan pada urusan pilihan perdagangan memiliki 4 program berikut: perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan dan pengembangan eksport, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

7.2 PENDANAAN

1. Pendanaan Tahun 2010-2015

Anggaran untuk pendanaan seluruh program yang direncanakan pada periode tahun 2010-2015, selanjutnya diuraikan berikut ini.

a. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Urusan wajib bidang pendidikan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran untuk tahun 2010 sebesar Rp 124.762.373, tahun 2011 sebesar Rp 215.018.544, tahun 2012 sebesar Rp 221.381.043, tahun 2013 sebesar Rp 248.370.939, dan 2014 sebesar Rp 289.437.628.

2) Kesehatan

Urusan kesehatan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp 25.985.197.462, tahun 2011 sebesar Rp 31.715.361.231,90, tahun 2012 sebesar Rp 34.364.782.810, tahun 2013 sebesar Rp 33.576.213.552,72, dan tahun 2014 sebesar Rp 45.181.162.770,62.

3) Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diselenggarakan dengan total alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp 1.327.383.000, tahun 2012 sebesar Rp 1.644.297.400, tahun 2013 sebesar Rp 1.581.380.800, tahun 2014 sebesar Rp 2.182.047.846, dan tahun 2015 sebesar Rp 1.559.261.600.

4) Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum diselenggarakan dengan total alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp 63.297.134.933, tahun 2011 sebesar Rp 87.305.462.863, tahun 2012 sebesar Rp 76.057.207.971, tahun 2013 sebesar Rp 56.252.566.475, dan tahun 2014 sebesar Rp 80.711.167.626.

5) Penataan Ruang

Urusan penataan ruang diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 367.423.000, tahun 2011 sebesar Rp 1.156.573, tahun 2012 sebesar Rp 525.000, tahun 2013 sebesar Rp 261.500.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 410.000.000.

6) Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 4.364.144.210, tahun 2011 sebesar Rp 5.708.925.914, tahun 2012 sebesar Rp 6.406.636.122, tahun 2013 sebesar Rp 6.115.033.845, dan tahun 2014 sebesar Rp 7.140.244.232.

7) Perumahan dan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 63.297.134.933, tahun 2011 sebesar Rp 87.305.462.863, tahun 2012 sebesar Rp 76.057.207.971, tahun 2013 sebesar Rp 59.252.566.475, dan tahun 2014 sebesar Rp 80.711.167.626.

8) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 20.499.242.000, tahun 2011 sebesar Rp 4.554.634.000, tahun 2012 sebesar Rp 4.680.418.000, tahun 2013 sebesar Rp 10.320.500.000,

dan tahun 2014 sebesar Rp 32.858.704.

9) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 78.903.000, tahun 2011 sebesar Rp 77.384.000, tahun 2012 sebesar Rp 150.000.000, tahun 2013 sebesar Rp 189.330.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 288.450.000.

10) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 3.001.927.000, tahun 2012 sebesar Rp 3.624.947.700, tahun 2013 sebesar Rp 5.395.713.700, tahun 2014 sebesar Rp 3.919.685.000, dan tahun 2015 sebesar Rp 4.135.565.568.

11) Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil diselenggarakan dengan alokasi anggaran sebagai berikut: tahun 2010 bidang pengolahan informasi dan administrasi kependudukan mendapat anggaran Rp 200.000,- program perencanaan dan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp 50.000.000,-. Tahun 2011 bidang pendaftaran penduduk mendapat anggaran Rp 266.671.000,- bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan mendapat sebesar Rp 78.684.000,- bidang pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 47.703.000,-. Pada tahun 2012 bidang pendaftaran penduduk mendapatkan anggaran Rp 65.000.000,-, bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan sebesar Rp 158.935.000,-, bidang pencatatan sipil Rp 65.000.000,-. Tahun 2013 bidang pendaftaran penduduk mendapat anggaran Rp 65.300.000,-, bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan Rp 94.500.000,-, bidang pencatatan sipil Rp 69.662.000. Berikutnya pada tahun 2014 bidang pendaftaran penduduk mendapat anggaran Rp 71.300.000,-, bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan Rp 88.475.000,-, program pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Rp 179.401.000,-, dan bidang pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 104.000.000,-

12) Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 3.065.585.093, tahun 2011 Rp 3.841.727.300, tahun 2012 sebesar Rp 4.747.041.800, tahun 2013 sebesar Rp 4.747.041.800, dan tahun 2014 sebesar Rp 5..34.944.350.

13) Ketahanan Pangan

Urusan wajib ketahanan pangan yang diselenggarakan dengan total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 1.696.093, tahun 2012 sebesar Rp 1.705.750, tahun 2013 sebesar Rp 1.791.463, tahun 2014 sebesar Rp 2.385.040, dan tahun 2015 sebesar Rp 2.939.331.

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 4.711.171.400, tahun 2011 sebesar Rp 5.343.523.000, tahun 2012 sebesar Rp 5.813.031.200, tahun 2013 sebesar Rp 6.117.708.900, dan tahun 2014 sebesar Rp Rp 7.805.257.624.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mendapat alokasi anggaran pada tahun 2010 program keluarga berencana dengan jumlah anggaran Rp 567.117.000, program kesehatan reproduksi remaja Rp 5.000.000, program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Rp 35.000.000, dan program pengembangan model operasional BKB-Posyandu Rp 363.860.800.

Berikutnya pada tahun 2011 program keluarga berencana mendapat anggaran sebesar Rp 890.455.485, program pelayanan kontrasepsi Rp 178.981.715, program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Rp 25.675.000, dan program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan anggaran Rp 82.181.800.

Pada tahun 2012 program keluarga berencana mendapat anggaran Rp 661.270.200, program pelayanan kontrasepsi Rp 316.400.000, program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Rp 35.000.000. Sedangkan pada tahun 2013 meliputi program keluarga berencana dengan anggaran Rp 708.769.512, program pelayanan kontrasepsi Rp 256.997.256, program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Rp 40.890.000, program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rp 299.830.132.

Pada tahun 2014 meliputi program keluarga berencana dengan anggaran Rp 1.798.046.400, program pelayanan kontrasepsi Rp 1.798.046.400, program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kegiatan di masyarakat Rp 45.665.000, program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Rp 293.800.000, dan program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rp 376.903.423.

16) Perhubungan

Urusan perhubungan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 3.519.276.694, tahun 2011 Rp 5.881.437.780, tahun 2012 Rp 4.859.995.314, tahun 2013 sebesar Rp 4.854.623.857, dan tahun 2014 sebesar Rp 5.833.799.836.

17) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika diselenggarakan dengan total alokasi

anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 163.000.000, tahun 2011 sebesar Rp 652.500.000, tahun 2012 sebesar Rp 1.000.000.000, tahun 2013 sebesar Rp 414.000.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 250.000.000.

18) Pertanahan

Urusan pertanahan diselenggarakan dengan alokasi dana pada tahun 2010 dalam kegiatan penyuluhan/pembinaan pertanahan mendapat alokasi anggaran Rp 48.481.000,-, tahun 2011 mendapat anggaran Rp 30.000.000,-, tahun 2012 sebesar Rp 20.000.000,-, tahun 2013 sebesar Rp 20.000.000,-, tahun 2014 mendapat anggaran Rp 5.000.000,-.

Berikutnya kegiatan pendataan tanah masyarakat dan pemerintah tahun 2010 dengan anggaran Rp 41.425.000,-, tahun 2011 sebesar Rp 50.000.000,-, tahun 2012 sebesar Rp 40.000.000,-, tahun 2013 dengan anggaran Rp 5.000.000,-, dan tahun 2014 sebesar Rp 20.000.000,-.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu tahun 2010 sebesar Rp 2.833.038.692, tahun 2011 sebesar Rp 3.302.661.664, tahun 2012 sebesar Rp 4.060.444.652, tahun 2013 sebesar Rp 3.877.604.300, dan tahun 2014 sebesar Rp 4.416.933.188.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Urusan pemerintahan umum pada tahun 2010 mendapat alokasi anggaran Rp 56.847.000, tahun 2012 sebesar Rp 35.713.900, tahun 2013 mendapat anggaran Rp 40.000.000, tahun 2014 sebesar Rp 55.000.000.

Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah dengan total alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp 4.101.083.439, tahun 2011 sebesar Rp 4.942.789.325, tahun 2012 sebesar Rp 6.013.689.350, tahun 2013 sebesar Rp 3.936.335.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 5.037.087.000.

Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp 12.510.372.359, tahun 2011 sebesar Rp 14.040.788.000, tahun 2012 sebesar Rp 13.854.125.400, tahun 2013 sebesar Rp 23.100.765.275, dan tahun 2014 sebesar Rp 22.996.203.000.

Urusan administrasi Perekonomian yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 358.772.000,-, tahun 2011 sebesar Rp 288.694.000,, tahun 2012 mendapat anggaran Rp 200.000.000,-, tahun 2013 mendapat anggaran Rp 206.000.000,-, dan tahun 2014 sebesar Rp 288.000.000,-.

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyaraka dan desa diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 2.417.502.871, tahun 2011 sebesar Rp 3.257.803.000, tahun 2012 sebesar Rp 3.333.161.100, tahun 2013 sebesar Rp 6.770.384.700, dan tahun 2014 sebesar Rp 4.453.846.000.

22) Sosial
Urusan sosial diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 3.065.585.093, tahun 2011 sebesar Rp 3.841.727.300, tahun 2012 sebesar Rp 4.747.041.800, tahun 2013 sebesar Rp 4.747.041.800, dan tahun 2014 sebesar Rp 5..34.944.350.

23) Kebudayaan
Urusan kebudayaan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 5.936.578.706, tahun 2011 sebesar Rp 6.869.871.450, tahun 2012 sebesar Rp 8.685.845.100, tahun 2013 sebesar Rp 9.873.763.701, dan tahun 2014 sebesar Rp 10.522.122.700.

24) Statistik
Urusan statistik diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 38.966.000, tahun 2011 sebesar Rp 70.000.000, tahun 2012 sebesar Rp 60.000.000, tahun 2013 sebesar Rp 61.660.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 60.000.000.

25) Kearsipan
Urusan wajib kearsipan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 1.671.249.378, tahun 2011 sebesar Rp 2.027.216.000, tahun 2012 sebesar Rp 2.231.204.400, tahun 2013 sebesar Rp 2.383.980.400 dan tahun 2014 sebesar Rp 2.594.911.000.

26) Perpustakaan
Urusan wajib perpustakaan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 1.671.249.378, tahun 2011 sebesar Rp 2.027.216.000, tahun 2012 sebesar Rp 2.231.204.400, tahun 2013 sebesar Rp 2.383.980.400, dan tahun 2014 sebesar Rp 2.594.911.000.

a. Urusan Pilihan

Untuk urusan pilihan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaannya meliputi berikut ini.

1) Peternakan dan Perikanan
Urusan pilihan untuk peternakan dan perikanan dilaksanakan dengan total alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 9.737.947, tahun 2011 sebesar Rp 16.158.537, tahun 2012 sebesar Rp 12.797.982, tahun 2013 sebesar Rp 13.151.513 dan tahun 2014 sebesar Rp 15.462.952.

2) Pertanian
Urusan pertanian dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebagai berikut: tahun 2010 sebesar Rp 13.265.843.155, tahun 2011 sebesar Rp 19.685.081.325, tahun 2012 sebesar Rp 17.564.219.540, tahun 2013 sebesar Rp 19.973.090.798, dan tahun 2014 sebesar Rp 21.654.157.883.

3) Kehutanan

Urusan kehutanan yang dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebagai berikut: tahun 2010 sebesar Rp 13.265.843.155, tahun 2011 sebesar Rp 19.685.081.325, tahun 2012 sebesar Rp 17.564.219.540, tahun 2013 sebesar Rp 19.973.090.798, dan tahun 2014 sebesar Rp 21.654.157.883.

4) Energi dan Sumber Daya Mineral/Alam

Urusan energi dan sumber daya mineral/alam diselenggarakan dengan total alokasi anggaran sebagai berikut: pada tahun 2010 sebesar Rp 163.694.00, tahun 2011 sebesar Rp 150.000.00, tahun 2012 sebesar Rp 150.000.00, tahun 2013 sebesar Rp 415.000.00, dan tahun 2014 sebesar Rp 755.257.00.

5) Pariwisata

Urusan pariwisata diselenggarakan dengan total alokasi anggaran sebagai berikut: tahun 2010 sebesar Rp 5.936.578.706, tahun 2011 sebesar Rp 6.869.871.450, tahun 2012 sebesar Rp 8.685.845.100, tahun 2013 sebesar Rp 9.873.763.701, dan tahun 2014 sebesar Rp 10.522.122.700.

6) Industri dan Perdagangan

Urusan industri dan perdagangan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar 95.73%, tahun 2011 sebesar 95.27%, tahun 2012 sebesar 93.18%, tahun 2013 sebesar 80.03% dan tahun 2014 sebesar 48.48%.

2. Pendanaan Tahun 2016-2018

Pada periode tahun 2016-2018 alokasi anggaran untuk membiayai masing-masing urusan yang direncanakan, diuraikan berikut ini.

a. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Urusan pendidikan diselenggarakan dengan total alokasi anggaran pada program kegiatan pendidikan anak usia dini sebesar Rp 390.252.000, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran sebesar Rp 48.387.687.831, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran sebesar Rp 551.376.400, program manajemen pelayanan pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 2.277.202.000, dan program pendidikan non formal dengan anggaran sebesar Rp 336.158.000.

2) Kesehatan

Urusan kesehatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 78.592.694.207 dan anggaran APBD Kab. Bangli sebesar Rp 1.140.637.958.822.

3) Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 29.189.303.510.

4) Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 177.242.279.354.

5) Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 768.185,00.

6) Perencanaan dan Pembangunan

Urusan perencanaan dan pembangunan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 7.429.116.895.

7) Perumahan dan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 1.927.100.000.

8) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dengan total alokasi anggaran pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebesar Rp 1.049.235.000, Program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp 146.230.000, dan program pembinaan peningkatan kreatifitas pemuda dan olahraga Rp 535.126.800.

9) Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 3.698.364.372.

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan total anggaran untuk program penciptaan iklim usaha kecil menengah yg kondusif sebesar Rp 14.658.000, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah sebesar Rp 202.472.350, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Rp 31.999.250, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar Rp 143.725.650.

11) Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dengan total anggaran untuk program pelayanan administrasi penduduk pindah datang sebesar Rp 10.000.000, Pendataan penduduk rentan/non permanen Rp 35.842.000, Penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identittas anak Rp 5.000.000, Pelayanan langsung/ keliling pendaftaran penduduk/KTP Rp 46.184.500, dan pelayanan langsung/ keliling pendaftaran penduduk/kartu keluarga Rp 30.000.000.

Urusan Catatan Sipil dengan program pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan anggaran Rp 360.550.000, Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil Rp 10.000.000, Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta kelahiran Rp 68.230.000, Pelayanan langsung/keliling pencatatn sipil/akta perkawinan dan perceraian Rp 33.000.000, Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/ akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian Rp 21.714.500, sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil Rp 15.000.000, dan pembentukan tim fasilitasi percepatan penerbitan dokumen kependudukan

sebesar Rp 53.000.000.

12) Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dengan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan total alokasi anggaran Rp 28.672.000, dan program peningkatan kesempatan kerja Rp 144.865.000.

13) Ketahanan Pangan

Urusan wajib ketahanan pangan total anggaran sebesar Rp 2.157.341.100.

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan pablik dengan anggaran Rp 30.000.000, kegiatan pengembangan kabupaten layak anak Rp 29.010.000, kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Rp 26.600.000, kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Rp 24.135.000, kegiatan penguatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak Rp 9.610.000, dan kegiatan pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan anggaran Rp 14.410.000.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kegiatan pendidikan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan anggaran Rp 247.500.000, kegiatan pembinaan pusat informasi dan konseling remaja Rp 23.980.000, kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Rp 18.864.000, kegiatan bantuan operasional keluarga berencana Rp 250.000.000, kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Rp 18.864.000, kegiatan fasilitasi pembentukan kampung KB Rp 23.930.000, kegiatan pengolahan data dan informasi program KB Rp 41.602.000.

16) Perhubungan

Urusan perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.375.731.860.

17) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dengan anggaran sebesar Rp 4.911.351.148.

18) Pertanahan

Urusan pertanahan dengan kegiatan pendataan dan legalisasi tanah pemerintah dengan anggaran Rp 10.000.000, dan kegiatan penyuluhan/pembinaan pertanahan sebesar Rp 20.000.000.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 3.770.310.116.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan kepegawaian dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.634.071.106,
Urusan sekretariat dewan perwakilan rakyat sebesar Rp 49.166.742.976.
Urusan Perekonomian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 328.300.00.

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan pemberdayaan masyarakat desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.069.098.172.
22) Sosial
Urusan sosial dengan alokasi anggaran Rp 9.040.129.
23) Kebudayaan
Urusan kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.906.737.154.
24) Statistik
Urusan statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.193.000.
25) Kearsipan
Urusan kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.128.132.116.
26) Perpustakaan
Urusan wajib perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.128.132.116.

b. Urusan Pilihan

Untuk urusan pilihan alokasi anggaran masing-masing program adalah seperti berikut ini.

1) Perikanan
Urusan perikanan dengan anggaran sebesar Rp 1.342.698.000.
2) Pertanian
Urusan pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.967.879.329.
3) Perkebunan
Urusan bidang perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 2.018.752.779.
4) Peternakan
Urusan bidang peternakan dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan anggaran sebesar Rp 209.678.500, Program peningkatan produksi hasil peternakan Rp 78.665.000, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebesar Rp 149.755.800.
5) Energi dan Sumber Daya Mineral/Alam
Urusan energi dan sumber daya mineral tidak ada alokasi anggarannya.
6) Pariwisata
Urusan pariwisata dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 27.274.237.629.
7) Industri dan Perdagangan
Urusan industri dan perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.843.800.000,-

BAB VIII

INDIKATOR TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

8.1 INDIKATOR TARGET DAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB 2010-2015

1. Bidang Pendidikan

a. Indikator Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Pendidikan terdiri atas: Perluasan akses dan mutu pengelolaan pendidikan anak usia dini terdiri atas meningkatnya APK PAUD dari 35% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015 meningkatnya rasio guru TK yang berkualifikasi S1 atau D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya rasio desa yang memiliki play group dari 65% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015.

Perluasan akses dan mutu pengelolaan pendidikan dasar 9 tahun terdiri dari meningkatnya APK SD dari 106,50% pada tahun 2011 menjadi 107% pada tahun 2015, meningkatnya APK SMP dari 99,80% pada tahun 2011 menjadi 103% pada tahun 2015, meningkatnya APM SD dari 94% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya APM SMP dari tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015, meningkatnya persentase lulusan SD dari 99% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya persentase lulusan SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015.

Peningkatan perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Menengah terdiri atas meningkatnya APK SMA dan SMK dari 57% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015, meningkatnya APM SMA/SMK dari 40,50% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015, meningkatnya persentase lulusan SMA/SMK dari 98% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015 Oma meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs- Sekolah Menengah dari 73,00% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015, meningkatnya persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja dari 60% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015.

Peningkatan perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Nonformal terdiri atas meningkatnya jumlah warga kejar paket A dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015 meningkatnya jumlah warga kejar paket B dari 460 orang yang pada tahun 2011 menjadi 680 orang pada tahun 2015, meningkatnya

jumlah warga kejar paket C dari 120 orang yang pada tahun 2011 menjadi 240 orang yang pada tahun 2015, meningkatnya jumlah lulusan kejar paket A dari 0 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015, meningkatnya jumlah lulusan kejar paket B dari 160 pada tahun 2011 menjadi 280 pada tahun 2015, meningkatnya jumlah lulusan kejar paket C dari 40 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015.

Peningkatan perluasan akses dan mutu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri atas persentase guru PAUD yang bersertifikasi mengalami peningkatan dari 5,4% pada tahun 2011 menjadi 30% pada tahun 2015, meningkatnya persentase guru SD yang bersertifikasi dari 14,7% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015, meningkatnya persentase guru SMP bersertifikasi dari 28,3% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015, meningkatnya persentase guru sma/smk bersertifikasi dari 33,5% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015, meningkatnya persentase guru PAUD yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 11% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015 meningkatnya persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal s1/d4 dari 18,00% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015 meningkatnya persentase guru SMP yang memenuhi persyaratan pendidikan dari 75% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015, meningkatnya persentase guru sma/smk yang memenuhi persyaratan pendidikan dari 9 4% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015.

Perluasan akses dan mutu pengelolaan manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri atas meningkatnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan dari 80 kali pada tahun 2011 menjadi 100 kali pada tahun 2015 meningkatnya pemberdayaan dewan pendidikan dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pemberdayaan komite sekolah dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015. Selanjutnya program prioritas perluasan akses dan mutu pendidikan bagi anak Miskin terdiri atas menurunnya angka DO anak dari keluarga miskin dari 100% pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi dari pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yaitu: tersedianya fasilitas TK-SD yang bertaraf Internasional, siswa dapat diantar jemput, siswa dapat belajar dengan nyaman, dan terlayaninya pendidikan anak usia dini pada SKB Bangli.

Untuk program wajib belajar sembilan tahun yaitu: pembangunan tembok penyengker dan angkul-angkul pada SDN-SMPN, pembangunan RKB dan LAB IPA pada SDN-SMPN, penambahan ruang kelas sekolah SDN-SMP, pembangunan LAB Bahasa dan Perpustakaan pada SMPN, pembangunan ruang serba guna pada

SMPN, penataan halaman pada SDN-SMPN, pembangunan patung saraswati pada SMPN, penyediaan tanaman taman pada SMPN, pembangunan padmasana dan candi bentar pada SDN-SMP, pengadaan meubelair pada SMPN, rehabilitasi SDN-SMPN dan peningkatan sarana dan prasarana SD-SMPN Kab. Bangli, pembangunan senderan pada SDN 6, rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, penyelenggaraan lomojari pada SMP terbuka, operasional TIM Manajemen berbasis sekolah, kreativitas SD, pembinaan olimpiade MIPA pada SD dan SMP Kab.Bangli, penyelenggaraan pemantapan ujian SD, penyelenggaraan ujian akhir SD, penyelenggaraan ujian akhir SMP, penyelenggaraan pemantapan ujian SMP, penyusunan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi ruang kelas SD pada DAK, penyelenggaraan SMP kelas jauh, penyelenggaraan SMP satu atap, pengadaan raport siswa, pengadaan alat olahraga pada SMP Kabupaten Bangli, pengadaan buku pelajaran, pengayaan, referensi dan pendidik pada SD Kabupaten Bangli,pengadaan alat peraga IPA/IPS/Matematika pada SMP Kabupaten Bangli, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia interaktif pas SD Kab. Bangli, pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pada SD Kabupaten Bangli, dan penyediaan BOS jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB Kabupaten Bangli.

Program pendidikan menengah: pembangunan padmasana di SMAN, pengadaan gong, pengadaan alat drum band dan pengadaan gong pada SMAN, pengadaan meubelair pada SMKN, rehabilitasi pada SMAN/SMKN, lomba guru berprestasi SD, SMP Kabupaten Bangli, lomba kepala sekolah dan pengawas Kabupaten Bangli, road show fisika SMA Tahun 2009, penyelenggaraan pemantapan ujian akhir SMA/SMK, penyelenggaraan ujian akhir SMA/SMK, pengembangan SMA/SMKN, uji kompetensi SMA/SMK, honor guru tidak tetap pada SMKN kecil se Kabupaten Bangli, lomba cerdas cermat UUD 1945 tingkat SMA/SMK, lomba debat bahasa inggris tingkat SMA/SMK, pembinaan peserta lomba karya ilmiah remaja LPIR (SMA), pembangunan jaringan instalasi listrik pada sekolah dan perlengkapannya, pengadaan meubelair pada SMKN, pengadaan alat praktik perhotelan pada SMKN, bintek olimpiade olahraga siswa nasional SMA kabupaten Bangli, kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan KTSP tingkat SMA/SMK, lomba nyastra bali tingkat SMA/SMK, lomba cerdas cermat UUD 1945 tingkat SMA/SMK, lomba siswa berprestasi, pembinaan peserta lomba karya ilmiah remaja (LPIR) SMA, penyelenggaraan seleksi olimpiade sains SMA Kabupaten Bangli, dan lomba guru berprestasi tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Realisasi program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan: penyelenggaraan sertifikasi guru, terselenggaranya pelatihan angka kredit jabatan fungsional guru, pendidikan lanjutan bagi penduduk untuk memenuhi standar kualifikasi, penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas, penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional pamong belajar, penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional pemilik, workshop

penyusun angka kredit jabatan fungsional guru, workshop penyusun angka kredit karya ilmiah bagi guru, pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dan beasiswa anak berprestasi 13 SMA/SMK.

Realisasi manajemen pelayanan pendidik: pengendalian dan pengawas penerapan azas efisiensi dan aktivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan, pembinaan dewan pendidikan, lomba wawasan Wiyata Mandala, pembinaan UKS tingkat SD, SMP, SMA/SMK Kabupaten Bangli, penyelenggaraan manajemen BOS. bintek pengurus barang UTP SD se kabupaten, pendataan sekolah pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, penyelenggaraan tes calon kepala sekolah SD, workshop peningkatan mutu pendidik, pengadaan hotsport dan website ICT, festival dan lomba seni siswa nasional SD dan SMP, pembinaan lomba beleganjur, pembinaan lomba kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK, pembinaan lomba UKS SD, SMP, SMA/SMK, peningkatan mutu akademik dan non akademik tingkat nasional, melaksanakan pembinaan olimpiade sains nasinal SMP kabupaten Bangli, penyelenggaraan lomba gugus depan TK/SD kabupaten Bangli, dan penyelenggaraan manajemen dana BOS Kabupaten Bangli.

Realisasi program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan sebagai berikut: penyelenggaraan manajemen BOS, lomba gugus SD Kabupaten Bangli, lomba gugus TK Kabupaten Bangli, dan lomba siswa SD, SMP Berprestasi.

Realisasi program manajemen pelayanan pendidikan: pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, pembinaan dewan pendidikan, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan, pembangunan/pengembangan ICT, pembinaan lomba-lomba manajemen pelayanan pendidikan, operasional manajemen berbasis sekolah (MBS), operasional unit pelayanan akreditasi sekolah, kegiatan lomba usaha kesehatan sekolah, lomba gugus TK/SD, pembinaan olimpiade MIPA, operasional UPT Disdikpora Kec. Bangli, operasional UPT SKB, dan penyebarluasan sosialisasi berbagai informasi pendidikan. Selanjutnya realisasi program pendidikan non formal sebagai berikut: penyelenggaraan pendidikan non formal, penyelenggaraan APE Non Formal, penyelenggaraan PTK PNFI tingkat provinsi, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.

2. Bidang Kesehatan

a. Target

Indikator Kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar kesehatan terdiri atas: Peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang terdiri atas: meningkatnya penggunaan obat generik di PKD dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 98%, dan sarana kesehatan yang dimotori dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 90%.

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang terdiri atas: terpilihnya tenaga kesehatan teladan dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun

2015, peningkatan kemampuan tanggap darurat Puskesmas dalam penanggulangan bencana dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, Tersedianya biaya operasional kesehatan dari 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan dasar dari 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan rujukan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, dan Puskesmas dengan pelayanan kebidanan serta keperawatan sesuai dengan standar dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%.

Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan terdiri atas: Pelayanan kefarmasian di masyarakat yang diawasi dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 95%, produksi pangan berbahaya yang diawasi dari 80% pada tahun 2011 menjadi 88% pada tahun 2015, pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diawasi dari 35% pada tahun 2011 menjadi 60% pada tahun 2015, dan cakupan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT yang dibina dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 80%.

Peningkatan pengembangan obat asli Indonesia terdiri atas: pengobatan tradisional yang terdaftar dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 95%, dan pengobatan tradisional yang memenuhi standar dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 95%.

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas: pengembangan dan pembinaan Desa Siaga dari tahun 2011 dengan target 19% menjadi 35% pada tahun 2015, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan dari 60% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015.

Peningkatan perbaikan gizi masyarakat terdiri atas: penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi dari 41% pada tahun 2011 menjadi 45% pada tahun 2015, pemberian tambahan vitamin dan makanan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mencapai target sebesar 100%, dan penanggulangan kurang energi protein, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%. Peningkatan pelayanan kesehatan Penduduk miskin dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%.

Peningkatan pengembangan lingkungan sehat terdiri atas: yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi dasar dari 78% pada tahun 2011 menjadi 84% pada tahun 2015, pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan dari 84% pada tahun 2011 menjadi 88% pada tahun 2015, dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dari 89% pada tahun 2011 menjadi 93% pada tahun 2015.

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terdiri atas: pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dari 70% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dari 1,1% pada tahun 2011 menjadi < 1% pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta dari 1/100.000 pada tahun 2011 menjadi 1/100.000 pada tahun 2015,

pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah dari 110/100.000 pada tahun 2011 menjadi 100/100.000 pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria dari 1/1000 pada tahun 2011 menjadi 1/1000 pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV AIDS dari 42% pada tahun 2011 menjadi 81% pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemoni dari 86% pada tahun 2011 menjadi 94% pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, pencegahan dan penanggulangan polio dari 2/100.000 pada tahun 2011 menjadi 2/100.000 pada tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015.

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita yang terdiri atas: deteksi dini tumbuh kembang anak dari 80% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015, Pendidikan dan Pelatihan perawatan anak balita dari 90% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, dan Penjaringan siswa SD kelas 1 dari 95% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015.

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan melakukan revitalisasi Posyandu lansia dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100% dan pengembangan Posyandu lansia dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dengan melakukan peningkatan dan pengawasan serta pengendalian keamanan dan kesehatan makanan dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 80%, dan peningkatan pemberdayaan konsumen/ Masyarakat di bidang Obat dan Makanan dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 80%.

Peningkat keselamatan ibu melahirkan anak terdiri atas: penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu dari 90% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015, pelayanan antenatal pada ibu hamil dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, pelayanan kesehatan pada ibu nifas dari dan 95% pada tahun 2011 menjadi 98% pada tahun 2015, penanganan komplikasi kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 98%, dan data usia yang menjadi peserta KB aktif dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 95%, dan pembinaan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 98%.

Program peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terdiri atas: evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebanyak 4 kali, penelitian di bidang kesehatan dari tahun 2011 hingga

2015 mencapai target sebanyak 1 paket, penyusunan standar pelayanan kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebanyak 1 paket, pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebanyak 20 buku, dan sertifikat, standarisasi dan peningkatan dari 80% pada tahun 2011.

Berikutnya program peningkatan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebanyak 1 paket, peningkatan kemitraan dan peningkatan pelayanan masyarakat dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebanyak 1 paket, peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 sebanyak 12 paket, peningkatan pelayanan laboratorium dari tahun 2011 hingga 2015 sebanyak 2 paket. Mengembangkan rumah sakit daerah (RSUD) dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, peningkatan kualitas RSUD yang mempunyai kualitas tingkat nasional dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, peningkatan pengadaan, an-nur dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit daerah dari 90% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015 dan peningkatan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebanyak 100%.

b. Realisasi Program

Realisasi program kesehatan terdiri atas: program obat dan perbekalan kesehatan dari 74.27 Oh pada tahun 2010 menjadi 95.24 Oh pada tahun 2014, upaya kesehatan masyarakat dari 99.46% pada tahun 2010 menjadi 98.13 pada tahun 2014, program pengawasan obat dan makanan dari 86.63 unit pada tahun 2011 menjadi 94.63 pada tahun 2014, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dari 99.16 sampel pada tahun 2010 menjadi 95.20 sampel pada tahun 2014, program perbaikan gizi dari 99.95 paket pada tahun 2011 menjadi 98.04 pada tahun 2014, program penyehatan lingkungan dari 100.00 penduduk pada tahun 2011 menjadi 98.46 penduduk pada tahun 2014, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dari 99.65% pada tahun 2010 menjadi 97.32% pada tahun 2014, program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dari 97.26 paket pada tahun 2010 menjadi 72.71 paket pada tahun 2014, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sebesar 97.72 paket pada tahun 2014, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dari 100.00% pada tahun 2011 menjadi 99.75% pada tahun 2012, program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dari 100.00% pada tahun 2011 menjadi 99.91% pada tahun 2012, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dari 99.95% pada tahun 2011 menjadi 71.10% pada tahun 2014, program kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan dari 99.69% pada tahun 2010 menjadi 98.19% pada tahun 2014, program sumber daya kesehatan dari 95.37% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014, dan program pelayanan laboratorium dari 100% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014.

2. Bidang Lingkungan Hidup

a. Target

Indikator Kinerja pada yang berkaitan dengan layanan dasar Lingkungan Hidup terdiri atas: Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, meningkatnya disiplin aparatur dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, terlaksananya upacara nasional, daerah dan keagamaan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, dan terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dari target 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi program lingkungan hidup adalah: program pelayanan administrasi perkantoran seperti: penyediaan jasa surat menyurat dari tahun 2011-2015 sebanyak 1 paket, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan dari tahun 2011-2015, penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian 12 bulan dari tahun 2011-2015, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dari 5 unit pada taun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 1 paket dari tahun 2011-2015, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 1 paket dari tahun 2011-2015, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari 2 unit pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian 1 paket dari tahun 2011-2014, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari 5 edisi pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, penyediaan makanan dan minuman dengan capain 1 tahun dari tahun 2011-2015, rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah dengan capaian 1 tahun dari tahun 2011-2015.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan terdiri atas: peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dari 2 unit pada tahun 2011 menjadi 1 unit pada tahun 2015, dan pengembangan teknologi pengo-

lahan persampahan dari 1 tahun pada tahun 2011 menjadi 20 ton pada tahun 2015.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terdiri dari: koordinasi penilaian kota sehat/adipura dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 1 buah pada tahun 2015, pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dari 1 tahun pada tahun 2011 menjadi 12 kali dalam 1 tahun pada tahun 2015, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 10 kalo dalam 1 tahun pada tahun 2015, dan monitoring, evaluasi serta pelaporan dengan capaian dari 15 laporan pada tahun 2012 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam terdiri dari: pengendalian dampak perubahan iklim dari 19 unit pada tahun 2014 menjadi 13 unit pada tahun 2015, peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 2000 bibit pohon pada tahun 2015, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dengan capaian 275 set pada tahun 2014.

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari: pengembangan data dan informasi lingkungan dari 3 laporan pada tahun 2013 menjadi 1 tahun pada tahun 2015, dan penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah dari 3 laporan pada tahun 2013 menjadi 1 tahun pada tahun 2015.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dari 550 pohon pada tahun 2011 menjadi 250 pohon pada tahun 2015.

3. Bidang Pekerjaan Umum

a. Target

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar pekerjaan umum terdiri atas: Pembangunan Jalan Dan Jembatan yang mencapai target dari 20% pada tahun 2011 menjadi 20% pada tahun 2015, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong–Gorong mencapai target sebesar 20% pada tahun 2011 menjadi 20% pada tahun 2015, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dari 6500 m3 menjadi 3428 m3 pada tahun 2015, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dari 21.19% pada tahun 2011 menjadi 18.50% pada tahun 2015, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dari 22.22% pada tahun 2011 menjadi 16.67% pada tahun 2015, Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan dari 19.51% pada tahun 2011 menjadi 0.0024% pada tahun 2015, Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan dari 24 kali pada tahun 2011 menjadi 24 kali pada tahun 2015, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan seperti: jumlah pengadaan alat-alat berat sebanyak 3 buah, jumlah rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat mencapai 132 buah, serta jumlah pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dari 1 buah pada tahun 2012 menjadi 1 buah pada

tahun 2014, rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat dari 22 buah pada tahun 2011 menjadi 22 buah pada tahun 2015, meningkatnya pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 1 buah pada tahun 2013. Kemudian Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku seperti: pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa dari 7600 m pada tahun 2011 menjadi 9500 m pada tahun 2015, rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa dari 7000 m pada tahun 2011 menjadi 9500 m pada tahun 2015, dan pemeliharaan rutin prasarana pengambilan dan saluran dari 520.74 m pada tahun 2011 menjadi 520.74 m pada tahun 2015.

Berikutnya Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 1 buah pada tahun 2014. Begitupun dengan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah dari 5 unit pada tahun 2011 menjadi 10 unit pada tahun 2015. Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 2 buah. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang terdiri dari: pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dari 2 unit pada tahun 2011 menjadi 4 unit pada tahun 2015, dan pembangunan jalan setapak perdesaan dari 2000 m2 pada tahun 2011 menjadi 4000 m2 pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi program pekerjaan umum terdiri atas: kegiatan perbaikan saluran dari 85 paket pada tahun 2010 menjadi 4 paket pada tahun 2014, kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun dari satu paket pada tahun 2010 menjadi 13 paket pada tahun 2014,Kegiatan pembangunan saluran drainase gorong-gorong Bina Marga dari 11 paket pada tahun 2010 menjadi 4 paket pada tahun 2014, program pembangunan turap/ talud bronjong dari 57 paket pada tahun 2010 menjadi 19 paket pada tahun 2014, kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dari 111 paket pada tahun 2010 menjadi 65 paket pada tahun 2014, kegiatan peningkatan jalan dari 84 paket pada tahun 2010 menjadi 54 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan atau peningkatan infrastruktur dari 15 paket pada tahun 2010 menjadi 44 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan atau peningkatan infrastruktur sanitasi dari 3 paket pada tahun 2010 menjadi 3 paket pada tahun 2014, kegiatan optimalisasi sarana air dari 40 paket pada tahun 2011 menjadi 6 paket pada tahun 2014, kegiatan monitoring dan pengawasan program pengendalian dan pemanfaatan kegiatan operasional IMB dan IUJK dari satu paket pada tahun 2010 menjadi satu paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong dari 14 paket pada tahun 2011 menjadi 10 paket pada tahun 2014, kegiatan pembuatan DPT dari 24 paket pada tahun 2010 menjadi 11 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan jalan dengan capaian satu paket pada tahun 2011, kegiatan

pasangan atau Rehab trotoar dari 6 paket pada tahun 2010 menjadi 2 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan gedung dan sarana pendukung lainnya dengan capaian 2 paket pada tahun 2011 ,kegiatan pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan capaian 2 paket pada tahun 2011, kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dari satu paket pada tahun 2010 menjadi satu paket pada tahun 2014, kegiatan penyusunan an designe Engenering Detail (DED) dengan capaian 4 paket pada tahun 2014, kegiatan energi listrik pedesaan dana DAK dengan capaian 4 paket pada tahun 2014, kegiatan pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dengan capaian satu paket pada tahun 2014, dan kegiatan atau pemeliharaan alat-alat berat dari satu paket pada tahun 2010 menjadi satu paket pada tahun 2014.

4. Bidang Penataan Ruang

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas: pengawasan pemanfaatan ruang yang dari 48 kali tahun 2011 menjadi 48 kali pada tahun 2015, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin mendirikan bangunan dari 48 kali tahun 2011 menjadi 48 kali tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi Program Penataan Ruang terdiri atas: Sosialisasi dan sinkronisasi Perda RTRW Kabupaten Bangli dengan capaian 24 buku pada tahun 2010, penyusunan masterplan kawasan minapolitan bernuansa wisata di danau dengan capaian satu paket pada tahun 2010, penyusun DED pembangunan panggung terbuka di lapangan Kapten Muditha Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2010, penyusunan DED kantor Bappeda dan penanaman modal Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2010, penyusunan RDTR Kecamatan Bangli dengan capaian 70 buku pada tahun 2011, penyusunan RDTR Kecamatan Kintamani dengan capaian 75 buku pada tahun 2011, sinkronisasi dan pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Bangli dengan capaian 100 buku pada tahun 2011, survei dan pemetaan (pembuatan peta dasar digital Kabupaten Bangli melalui citra satelit) dengan capaian satu paket pada tahun 2011, kajian dan DED fasilitas pariwisata pada ruas jalan penelokan Kintamani dengan capaian satu paket pada tahun 2011, penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang dengan capaian 70 buku pada tahun 2012, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dengan capaian 90 buku pada tahun 2012, penyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dengan capaian pada tahun 2012, penyusunan rencana Perda tentang RT RW dengan capaian 45 buku pada tahun 2012, penyusunan DED pasar Kidul dengan capaian satu paket pada tahun 2012, kajian dan masterplan pusat pemerintahan Kabupaten Bangli dengan capaian 30 buku

pada tahun 2012, koordinasi pelaksanaan Geopark Batur dengan capaian satu paket pada tahun 2013, penyesuaian dan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2013, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dengan capaian satu paket pada tahun 2013, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dengan capaian satu paket pada tahun 2014, kajian dan masterplan pusat pemerintahan Kabupaten Bangli dengan capaian 10 dokumen pada tahun 2014, koordinasi evaluasi substansi RDTR Kecamatan Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2014, koordinasi pembangunan museum gunung api Batur dari 1 paket pada tahun 2010 menjadi 1 paket pada tahun 2011, survei dan pemetaan dari 20 buku pada tahun 2012 menjadi satu paket buku pada tahun 2013, dan penyusunan masterplan ruang Tata hijau Kota Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2013.

5. Bidang Perencanaan dan Pembangunan

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Perencanaan dan Pembangunan terdiri atas: peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, peningkatan disiplin aparatur dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, peningkatan perencanaan pembangunan desa dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, dan peningkatan pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi Program Perencanaan dan Pembangunan terdiri atas: kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah dari 65 buku pada tahun 2010 menjadi 200 buku pada tahun 2014, kegiatan penyusunan profil daerah dengan capaian 22 buah pada tahun 2010, Kormonev rencanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan capaian satu paket pada tahun 2014, Kegiatan penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Bangli tahun 2005- 2025 dengan capaian 100 buku Ranperda pada tahun 2010, kegiatan penyusunan rancangan RKPD dari 60 buku pada tahun 2010 menjadi 100 buku pada tahun 2014, kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD 165 exsemplar pada tahun 2010 menjadi 100 exsemplar pada tahun 2014, kegiatan Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pembangunan Daerah dari 40 kali pada tahun 2010 menjadi 42 kali pada tahun 2014, kegiatan koordinasi penyusunan ASB dari 100 buku pada tahun 2010 menjadi 60 buku pada tahun 2014,

kegiatan penyusunan RPIJM Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket dari tahun 2010- 2014, kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangli tahun 2010- 2015 dengan capaian 100 buku Ranperda pada tahun 2010, kegiatan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Bangli dari 200 exsemplar pada tahun 2010 menjadi 570 exsemplar pada tahun 2014, kegiatan koordinasi pelaksanaan DAK nonton DR dan tugas pembantuan dari 20 exsemplar pada tahun 2010 menjadi 25 exsemplar pada tahun 2014, kegiatan koordinasi penyusunan LAKIP dari 20 buku pada tahun 2010 menjadi 50 buku pada tahun 2013, kegiatan operasional TAPD dari satu paket berapa tahun 2010 menjadi satu paket pada tahun 2012, kegiatan sinkronisasi dan pembahasan Ranperda RPJMD tahun 2010-2015 dengan capaian 100 buku Perda pada tahun 2011, kegiatan sinkronisasi dan pembahasan Ranperda RPJPD tahun 2005-2025 dengan capaian 100 buku Perda, kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan inovasi daerah (SID) dari 20 buku pada tahun 2011 menjadi 5 SKPD pada tahun 2014, koordinasi program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dengan capaian 10 buku pada tahun 2013, penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum dengan capaian 10 buku pada tahun 2013, koordinasi sistem informasi profil daerah (SIPD) dengan capaian 1 dokumen pada tahun 2013-2014, penyusunan memorandum program sanitasi (MPS) dengan capaian 5 buku pada tahun 2014, koordinasi penyusunan laporan Millennium Development Goals (MDGs) dengan capaian satu paket pada tahun 2014, operasional pembinaan perencanaan umum daerah dengan capaian satu paket pada tahun 2014, legalisasi Ranperda bangunan gedung Kabupaten Bangli dengan capaian 35 buku pada tahun 2014, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian satu paket pada tahun 2011 menjadi satu paket pada tahun 2014, kegiatan koordinasi program agropolitan dengan capaian satu paket pada tahun 2010 menjadi satu paket pada tahun 2013, kegiatan koordinasi pelaksanaan KPEL Kabupaten Bangli dengan capaian 10 kelompok pada tahun 2010 menjadi 16 kelompok pada tahun 2014, koordinasi percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2013, koordinasi pengembangan pasar Geopark Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2013, kegiatan koordinasi program CBD Kabupaten Bangli dari 41 Desa pada tahun 2010 menjadi 65 Desa pada tahun 2013, kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya dengan capaian satu paket dari tahun 2010 sampai tahun 2014, koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2013-2014, kegiatan kajian dan evaluasi pembangunan dari 40 buku pada tahun 2010 menjadi satu dokumen pada tahun 2014, kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah dengan capaian satu paket pada tahun 2011, pengkajian Grand strategi percepatan pembangunan Kabupaten Bangli dengan capaian satu paket pada tahun 2012, dan kajian Agrowisata terpadu dengan capaian satu paket pada tahun 2013.

6. Bidang Perumahan dan Pemukiman

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Perumahan dan pemukiman dengan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang terdiri atas: kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dari 1 unit pada tahun 2012 menjadi 1 unit pada tahun 2014, dan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dari 12 bulan pada tahun 2011 menjadi 12 bulan pada tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi Program terdiri atas: Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dari 15 paket pada tahun 2010 menjadi 44 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dari 3 paket pada tahun 2010 menjadi 3 paket pada tahun 2014, kegiatan optimalisasi sarana air dari 40 paket pada tahun 2011 menjadi 6 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dari 14 paket pada tahun 2011 menjadi 10 paket pada tahun 2014, kegiatan pembuatan DPT dari 24 paket pada tahun 2010 menjadi 11 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan jalan dengan capaian satu paket pada tahun 2011, kegiatan pemasangan/rehab trotoar dari 6 paket pada tahun 2010 menjadi 2 paket pada tahun 2014, kegiatan pembangunan gedung dan sarana pendukung lainnya dengan capaian 2 paket pada tahun 2011, dan kegiatan pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan capaian 2 paket pada tahun 2011.

7. Bidang Kepemudaan dan Olah raga

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas: Peningkatan mutu dan kuantitas kebijakan Pemuda yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu: peningkatannya pendataan potensi kepemudaan setiap tahun dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015, meningkatnya penelitian dan pengkajian kebijakan kebijakan pembangunan kepemudaan dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dari 0 pada tahun 2011 menjadi satu dokumen pada tahun 2015, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda

dengan masyarakat dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 2 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi dua kali pada tahun 2015, dan meningkatnya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015.

Program peningkatan mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan yang terdiri atas: pembinaan organisasi kepemudaan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang juga mengalami peningkatan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015, meningkatnya fasilitas aksi bakti sosial kepemudaan dari tiga kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015, meningkatnya fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan Pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan Pemuda pelopor keamanan lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 dan meningkatnya pameran prestasi hasil karya Pemuda dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015.

Program mutu dan kuantitas kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda yang terdiri atas: pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang mengalami peningkatan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, dan pelatihan keterampilan bagi pemuda mengalami peningkatan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015.

Program Peningkatan mutu dan kuantitas upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terdiri atas pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015. Kemudian untuk program prioritas peningkatan mutu dan kuantitas kebijakan dan manajemen olahraga yang terdiri atas: mutu organisasi dan tenaga keolahragaan mengalami peningkatan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi peningkatan 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 meningkatnya pembinaan manajemen organisasi olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pengkajian kebijakan kebijakan pembangunan olahraga dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015.

Program peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga yang terdiri atas: pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga mengalami peningkatan dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015, meningkatnya pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dari 1 kali pada tahun 2015 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015, meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga dari 20% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dari 5% pada tahun 2011 menjadi 25% pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015, meningkatnya peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015, meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga dari 3 cabor pada tahun 2011 menjadi 22 cabor pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015, meningkatnya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah dari 5% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015, meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015, dan meningkatnya kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015.

Program peningkatan mutu dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga terdiri dari: meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015, meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 8 unit pada tahun 2015, meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga harga dari 0% pada tahun 2011 menjadi 25% pada tahun 2015, meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 9 unit pada tahun 2015, dan meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga dari 6 unit pada tahun 2011 menjadi 30 unit pada

tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi program terdiri atas: pembinaan pemasyarakatan olahraga tingkat kabupaten Bangli terealisasi sebesar 94.30% pada tahun 2010 menjadi 99.06% pada tahun 2014, Program peningkatan peran serta kepemudaan terealisasi sebesar 72.71% pada tahun 2010 menjadi 91.70 persen pada tahun 2014, dan penyelenggaraan pendidikan non formal terealisasi sebesar 97.81% pada tahun 2010 menjadi 72.12% pada tahun 2014.

8. Bidang Penanaman Modal

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Penanaman Modal terdiri atas: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi seperti: pelaksanaan pembuatan master plan pengembangan penanaman modal mencapai target sebanyak 1 paket pada tahun 2012, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 40 orang pada tahun 2015, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dari 10 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 10 perusahaan pada tahun 2015. Berikutnya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu pelaksanaan pembuatan profil investasi unggulan di Kabupaten Bangli dari 30 buku pada tahun 2012 menjadi 30 buku pada tahun 2015, pelaksanaan pameran investasi daerah dari 3 paket pada tahun 2012 menjadi 3 paket pada tahun 2015, pelaksanaan kerjasama investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dari 1 paket pada tahun 2012 menjadi 2 paket pada tahun 2015. Selanjutnya peningkatan penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah dengan target 30 buku pada tahun 2012 saja.

b. Realisasi Program

Realisasi program yaitu: koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dari 1 paket pada tahun 2010 menjadi 20 buku pada tahun 2014, monitoring evaluasi dan pelaporan penanaman modal dari 10 perusahaan pada tahun 2010 menjadi 10 perusahaan pada tahun 2014, pengembangan potensi unggulan daerah dari 10 buku pada tahun 2012 menjadi 1 unit pada tahun 2014, dan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah kabupaten Bangli dengan capaian 1 dokumen pada tahun 2014.

9. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas: Penciptaan iklim UMKM yang kondusif terdiri dari

sasaran yaitu meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM dari 30 UMKM pada tahun 2011 menjadi 120 UMKM pada tahun 2015. Berikutnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM yang terdiri dari sasaran yaitu terciptanya wirausaha yang unggul dan kompetitif dari 60 orang pada tahun 2011 menjadi 240 orang pada tahun 2015. Berikutnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM terdiri dari sasaran yaitu meningkatnya akses pasar dan meningkatnya pertumbuhan UMKM dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 160 orang pada tahun 2015. Berikutnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang terdiri dari sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam pengelolaan usaha dari 192 koperasi pada tahun 2011 menjadi di 858 koperasi pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: program pelayanan administrasi terealisasi sebesar 92.61%, program peningkatan sarana dn prasarana aparatur kegiatan terealisasi sebesar 88.43%, program peningkatan disiplin aparatur kegiatan terealisasi sebesar 84.29%, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terealisasi sebesar 100%, program pelaksanaan upacara nasional daerah dan keagamaan terealisasi sebesar 72.64%, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi terealisasi sebesar 83.69%.

10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Kependudukan dan catatan sipil terdiri atas: Program Administrasi Kependudukan (KK dan KTP) dari 30000 lbr KTP pada tahun 2011 menjadi 30000 lbr KTP pada tahun 2015, Program Administrasi Akta Catatan Sipil dari 15000 lbr pada tahun 2011 menjadi 15000 lbr pada tahun 2015, Program Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Administrasi Kependudukan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015, Program Peningkatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari 4 Kec. pada tahun 2011 menjadi 4 Kec. pada tahun 2015, kemudian Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dari 5 dok pada tahun 2011 menjadi 5 dok pada tahun 2015, Program Pengawasan dan Pengendalian Penduduk dari 6 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015, Program Pengoperasian SIAK secara terpadu dari 8 unit pada tahun 2011 menjadi 2 unit pada tahun 2015, Program Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK dari 8 orang pada tahun 2011 menjadi 24 orang pada tahun 2015, Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dari 2 unit pada tahun 2011 menjadi 1 unit pada tahun 2013, Program Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi Jaringan dari 4 paket pada tahun 2011 menjadi 80 paket pada tahun 2015,

Program Pelayanan Langsung Akta-Akta Capil dari 8000 lbr pada tahun 2011 menjadi 8000 lbr pada tahun 2015, Program Pelayanan Prima Akta-Akta Sipil dari 8200 lbr pada tahun 2011 menjadi 8200 lbr pada tahun 2015, Program Pelayanan Prima KK dan KTP dari 850.000 lbr pada tahun 2011 menjadi 850.000 lbr pada tahun 2015, dan Program Peningkatan Mobilitas Penduduk dari 1000 dok pada tahun 2011 menjadi 1300 dok pada tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi teridiri atas: Peningkatan pelayanan KK dan KTP dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 99%, pengelola administrasi kependudukan dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 99%, kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan Catatan Sipil dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, penyusunan profil perkembangan penduduk dari tahun 2010 hingga 2014 terealisasi sebesar 99%, penataan administrasi kependudukan khususnya menyangkut pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 97%, pelayanan langsung akta Catatan Sipil dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, dan dan pengelolaan administrasi akta Catatan Sipil (register dan kutipan akta) dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 98%.

11. Bidang Ketenagakerjaan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Ketenagakerjaan terdiri atas Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015, meningkatnya penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 5 buah pada tahun 2015, dan meningkatnya kualitas monev padat karya dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015.

Program peningkatan kesempatan kerja yang terdiri dari sasaran yaitu meningkatnya jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi dua 50 perusahaan pada tahun 2015, meningkatnya jumlah peserta pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015, dan meningkatnya jumlah peserta sosialisasi pedoman survei dan penetapan nilai kebutuhan hidup layak dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi terdiri atas: Program pelayanan administrasi perkantoran dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terealisasi sebesar 100% pada tahun 2013, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tahun 2012, 2014 terealisasi sebesar 100%, program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 100%, dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dari tahun 2012-2014 terealisasi sebesar 100%.

12. Bidang Ketahanan Pangan

a. Target

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan layanan dasar Ketahanan pangan terdiri atas: Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan terdiri dari beberapa sasaran yaitu terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, dan kegiatan pengadaan lumbung pangan desa dari 5 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi terdiri atas: penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian terealisasi sebanyak 30 klp pada tahun 2012, pengembangan lumbung pangan desa dari 3 unit pada tahun 2011 menjadi 5 unit pada tahun 2015, meningkat dan 32 paket pada tahun 2013 menjadi 22 paket pada tahun 2014, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dari 80% pada tahun 2011 menjadi 82.30% pada tahun 2014, laporan berkala kondisi ketahanan pangan sebanyak 2 lap pada tahun 2014-2015, kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan terealisasi 12 bulan pada tahun 2014-2015, pengembangan cadangan pangan daerah terealisasi sebanyak 3 paket pada tahun 2013-2014, pameran dan promosi hasil produksi terealisasi dari satu kali pada tahun 2010 menjadi 1 kali pada tahun 2015, dan penanganan daerah rawan pangan terealisasi pada 4 Kecamatan pada tahun 2015.

13. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas: Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang dibagi dalam beberapa sasaran, seperti: Pertama, perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2011 dengan target 0%, dan tahun 2012-2015 mencapai 25%. Kedua, perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik dengan target pada tahun 2011 sebesar 0%, dan tahun 2012-2015 mencapai target 25%. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan target pada tahun 2011 sebesar 13%, tahun 2012 sebesar 16%, tahun 2013 sebesar 20%, tahun 2014 sebesar 24%, tahun 2015 sebesar 27%. Keempat, pembinaan kelompok P2WKSS dengan target mulai dari tahun 2011-2015 sebesar 20%. Kelima, pembinaan dan evaluasi tokoh perempuan yang dengan target dari tahun 2011-2015 sebesar 20%. Keenam, pelaksanaan mimbar anak dengan target sebesar 12.50% pada tahun 2011-2012, 25% dari tahun 2013-2015.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang terbagi menjadi beberapa sasaran yaitu: fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) yang dengan target sebesar 14% tahun 2011, 16% tahun 2012, 20% tahun 2013, 23% tahun 2014, dan 27% tahun 2015. Kemudian pembentukan TPA yang dengan target hanya pada tahun 2011 yaitu sebesar 100%. Berikutnya monitoring evaluasi dan pelaporan dengan target 20% pada tahun 2011, 33.30% di tahun 2012, 20% tahun 2013, serta 33.30% di tahun 2014 dan tahun 2015. Berikutnya pendataan keluarga yang dengan target pada tahun 2011 sebesar 12%, dan tahun 2012-2015 sebesar 20%.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan juga terbagi dalam beberapa sasaran yaitu: Pertama, sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT dengan target di tahun 2011 sebesar 20%, tahun 2012 sebesar 16%, tahun 2013 sebesar 20%, tahun 2014 sebesar 20%, dan tahun 2015 sebesar 20%. Kedua, kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dengan target sebesar 20% dari tahun 2011-2015.

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu: pertama, kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera yang dengan target 20% dari tahun 2011-2015. Kedua, kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dengan target 11% tahun 2011, 14% tahun 2012, dan 25% tahun 2013-2015. Ketiga, kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan dengan target 20% dari tahun 2011-2015. Keempat, monitoring evaluasi dan pelaporan dengan target 16% tahun 2011-2012, dan 23% tahun 2013-2015. Kelima, peringatan hari ibu dengan target 20% dari tahun 2011-2015.

Penguatan Kelembagaan Pengasutaan Gender dan Anak yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu: workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan

keputusan dengan target 20% dari tahun 2011-2015. Kemudian rapat koordinasi PP seperti misalnya: persentase pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap total kebutuhan dengan target 20% tahun 2011 dan 25% tahun 2012-2015, persentase ketersediaan alat kontrasepsi terhadap total kebutuhan dengan target 18% tahun 2011-2013, 21% tahun 2014 dan 25% tahun 2015, serta persentase pelayanan KB medis operasi terhadap total kebutuhan dengan target 20% tahun 2011-2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terealisasi dari 400 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2014, pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terealisasi sebanyak 220 orang pada tahun 2011, perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan pablik terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014, fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) terealisasi sebesar 100%, advokasi dan fasilitasi UPG bagi perempuan terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 100%, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak terealisasi sebesar 100% dari tahun 2010-2014, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak terealisasi sebesar 100% dari tahun 2010-2014, pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 100%, penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan terealisasi dari tahun 2010-2014 sebanyak 100 orang, kegiatan pembinaan organisasi perempuan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2010-2014, kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 100%, dan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 100%.

14. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas: Program Keluarga Berencana yang dengan target sebesar 20% dari tahun 2011-2015. Kemudian Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu: pertama, penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kes. Reproduksi di rumah sakit semua metode kontrasepsi dengan target 25% dari tahun 2011-2015. Kedua, penyelengaraan lomba provider, KB Pria KB Perusahaan dengan target 10% tahun 2011, dan 25% tahun 2012-2015. Ketiga, TMKK (TNI, Manunggal, KB, Kesehatan) dengan target 25% tahun 2011, 20% tahun 2012, 25% tahun 2013, dan 15% tahun 2014-2015. Keempat, promosi KIE dengan target 20% tahun 2011-2015. Kelima, sosialisasi pra KS dengan target 11%

tahun 2011, 15% tahun 2012, 19% tahun 2013, 22% tahun 2014 dan 33% tahun 2015. Keenam, kebijakan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan target 18% tahun 2011-2013, 21% tahun 2014, dan 25% tahun 2015. Ketujuh, sosialisasi program KRR bagi remaja (sekolah dan teruna teruni) dengan target 20% dari tahun 2011-2015.

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat dengan target sebesar 60% tahun 2011, sebesar 70% tahun 2012, sebesar 80% tahun 2013, sebesar 90% tahun 2014, dan 100% tahun 2015.

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga yang terdiri atas beberapa sasaran yaitu: penyelenggaraan orientasi program catur bina dan UPPKS dengan target 20% tahun 2011-2015, pelaksanaan pendampingan/magang kader atau anggota kelompok UPPKS skala kabupaten dengan target 5% tahun 2011, 20% tahun 2012, dan 25% tahun 2013-2015, pembinaan kelompok catur bina dan kelompok UPPKS dengan target 0% tahun 2011, 4% tahun 2012, 3% tahun 2013 dan 2014, dan 2% tahun 2015, penyelengaraan lomba BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, KB, KB Lestari, BLK, IMP, PLKB yang dengan target 100% tahun 2011, 16.80% tahun 2012, 19.80% tahun 2013, 24.70% tahun 2014-2015, serta monitoring dan evaluasi yang dengan target 0% tahun 2011, 37.50% tahun 2012, 0% tahun 2013-2014, dan 62.50% tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Kegiatan pelayanan KIE dari Tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 96%, kegiatan pembinaan Keluarga Berencana dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 46.67%, kegiatan monitoring dan evaluasi terealisasi sebesar 96% dari tahun 2010-2014, kegiatan pembinaan/evaluasi kelompok kegiatan catur bina dan UPPKS terealisasi sebesar 94% dari tahun 2010-2014, kegiatan operasional tim KB keliling terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 100%, kegiatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 54%, penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 99%, dan kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terealisasi dari tahun 2010-2014 sebesar 94%.

15. Bidang Perhubungan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Perhubungan terdiri atas: Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan target sebanyak 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015. Selanjutnya Peningkatan pelayanan angkutan dengan target 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ yang terdiri dari pemeliharaan *trafic light* dengan capaian sebanyak 2 unit pada tahun 2011-2014. program peningkatan pelayanan angkutan yang terdiri dari pelaksanaan tertib berlalu lintas dari tahun 2010-2014 dengan capaian sebanyak 1 kali, pelaksana survei ke kepada dari tahun 2010-2011 dengan capaian sebanyak 7 kali, pelaksanaan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan dari tahun 2010-2011 dengan capaian sebanyak 7 kali, pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru Mudi untuk keselamatan penumpang dengan capaian dari tahun 2010-2014 sebanyak 40 orang, dan pembinaan serta penyuluhan juru parkir dari 2010-2014 terealisasi sebanyak 46 orang per hari. Berikutnya program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak satu paket. 1 paket berikut program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang teridiri dari: pemeliharaan rambu lalu lintas dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 40 buah, pengawasan dan penertiban lalu lintas dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 104 kali, pengadaan rambu-rambu lalu lintas seperti: rambu jalan dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 90 buah, RPPJ dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 2 buah, Guardrill dari tahun 2010-2014 terealisasi sepanjang 320 meter, Delinerator dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 110 buah, dan *trafic light* dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 2 unit, serta pengamanan lalu lintas di kawasan obyek wisata dan daya tarik wisata dari tahun 2010-2014 teerealisasi sebanyak 104 kali.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Komunikasi dan Informatika terdiri atas Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan target pada tahun 2011-2015 sebesar 100%, peningkatan SDM di bidang komunikasi dan Informatika yang dengan target dari tahun 2011-2015 sebesar 100%, peningkatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat dengan target dari tahun 2011-2015 sebesar 100%, peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik dengan target dari tahun 2011-2015 sebesar 100%, dan peningkatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dengan target dari tahun 2011-2015 sebesar 100%.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: pendataan dan pembinaan tower seluler dari tahun 2010-2013 dengan capaian sebanyak 53 tower, penyebaran informasi pembangunan daerah dengan melakukan pameran pembangunan Provinsi Bali dari tahun 2010-2013 dengan capaian 1 paket, program kerjasama informasi dengan media massa

dengan melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 4 kecamatan, program *e-government* Kabupaten Bangli meliputi restrukturisasi jaringan dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 12 SKPD, pendataan legalisasi *software* dari tahun 2011-2012 terealisasi sebesar 42 SKPD, pengembangan sistem informasi dari tahun 2011-2012 terealisasi sebanyak 1 website, dan monitoring kegiatan pengembangan SI/TI *e-government* dari tahun 2011-2012 terealisasi sebesar 42 SKPD.

17. Bidang pertanahan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar pertanahan terdiri atas: penyuluhan/pembinaan pertanahan, pendataan tanah-tanah masyarakat dan pemerintah, pendampingan sertifikasi tanah laba Pura, pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan peningkatan kapasitas sumber aparatur.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: kegiatan penyuluhan/pembinaan pertanahan dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 28.5%, dan kegiatan pendataan dan legalisasi tanah pemerintah dari tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 94.2%.

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdiri atas: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu pengarahan hansip/ linmas dalam rangka hari-hari nasional dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, operasional kominda Kabupaten Bangli dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 20 kecamatan pada tahun 2015, mediator dan fasilitator penanganan masalah aktual dari 69 Desa pada tahun 2011 menjadi 345 Desa pada tahun 2015, pemantauan orang asing dari satu paket pada tahun 2012 menjadi 4 paket pada tahun 2015, pelaksanaan sosialisasi kelinmasan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015, pelaksanaan latihan dasar kehansipan/ kelinmasan dari 300 orang pada tahun 2011 menjadi 1500 orang pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan wawasan Kebangsaan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015. Selanjutnya peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015. Dan peningkatan pendidikan politik masyarakat dari satu paket pada tahun 2012 menjadi 4 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Pengerahan aparat pengendali keamanan lingkungan dalam rangka hari-hari nasional dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 6 pleton, operasional kominda Kabupaten Bangli dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 1 paket, operasional pemantauan dan kenyaman lingkungan dari tahun 2010-2011 terealisasi sebanyak 1 paket, pelaksanaan mediator dan fasilitator masalah aktual dari tahun 2010-2011 terealisasi sebanyak 12 bulan, penyelesaian konflik sosial terealisasi sebanyak 12 bulan pada tahun 2014, pelatihan dasar hansip/linmas dari tahun 2012-2014 terealisasi sebanyak 100 orang, tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan pejabat negara di daerah Kabupaten Bangli dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 41 orang, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Luhur budaya bangsa realisasi dari tahun 2012-2014 sebanyak 1 paket, Forum Komunikasi/ koordinasi Muspida terealisasi sebanyak 1 paket pada tahun 2010, pemantapan wawasan kebangsaan terealisasi dari tahun 2012-2014 sebanyak 100 orang, pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan terealisasi dari tahun 2012-2014 sebanyak 50 orang, sosialisasi forum kerukunan umat beragama dari tahun 2012- 2014 terealisasi sebanyak 200 orang, Forum Komunikasi parpol terealisasi sebanyak 50 orang pada tahun 2012, pembauran bangsa terealisasi sebanyak 60 orang pada tahun 2012-2014, Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 7 parpol, pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 45 terealisasi sebanyak 120 orang pada tahun 2012, pembinaan FKDM dan pemantauan wilayah terealisasi sebanyak 16 orang dari tahun 2012-2014, penyuluhan kepada masyarakat terealisasi sebanyak 2 kali dari tahun 2012-2014, kegiatan pendukung penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bangli terealisasi sebanyak 12 bulan pada tahun 2013, koordinasi forum-forum diskusi politik terealisasi sebanyak 60 orang pada tahun 2014, monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu terealisasi sebanyak 2 paket dari tahun 2010-2014, pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 1 paket pada tahun 2010-2013, pembekalan bagi anggota satlak PB Kabupaten Bangli terealisasi sebanyak 100 orang pada tahun 2013, dan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana terealisasi sebanyak 100 orang pada tahun 2013.

19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Otonomi Daerah, Pemeritah Umum, Administrasi Keuangan, dan Perangkat Daerah, terdiri atas: Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015. Selanjutnya, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari 1 dok pada tahun 2011 menjadi 1 dok pada

tahun 2015. Berikutnya, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015. Dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Bidang otonomi daerah terdiri atas: fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah dari tahun 2010-2014 terealisasi sebanyak 4 kecamatan, dan sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah terealisasi sebanyak 18 kali perjanjian dari tahun 2010-2014.

Program Pemerintahan Umum terdiri atas: peningkatan administrasi pemerintahan terealisasi sebesar Rp 41.992.600 dari tahun 2011-2014, dan pelaksanaan upacara nasional daerah dan keagamaan terealisasi dari tahun 2011-2014 sebesar Rp 170.385.000.

Program Kepegawaian terdiri atas: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari pendidikan dan latihan aparat tramtib dengan capaian sebanyak 75 orang pada tahun 2011, Pendidikan dan Pelatihan prajabatan CPNS Golongan I dan II Kabupaten Bangli terealisasi sebanyak 11 orang pada tahun 2010-2014, pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Golongan III Kabupaten terealisasi sebanyak 2 orang dari tahun 2011-2014, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terealisasi sebanyak 150 orang pada tahun 2013, pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil terealisasi sebanyak 2000 orang pada tahun 2014, pelatihan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli terealisasi sebanyak 1 paket pada tahun 2014. Berikutnya program pembinaan dan pengembangan aparatur yang terdiri dari penyusunan rencana pembinaan karir PNS terealisasi sebanyak 1 paket dari tahun 2010-2013, Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil terealisasi sebanyak 132 orang pada tahun 2013-2014, pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah terealisasi sebanyak 1 paket pada tahun 2010-2014, pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS berprestasi terealisasi sebanyak 400 orang dari tahun 2012-2014, optimalisasi fungsi pelayanan kepada pegawai yang terealisasi sebanyak 1 paket dari tahun 2013-2014, pembinaan disiplin pegawai negeri sipil terealisasi sebanyak 1 paket dari tahun 2010-2014, penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang terealisasi sebanyak 638 orang pada tahun 2014, beasiswa tugas belajar dalam ikatan dinas terealisasi sebanyak 2 orang pada tahun 2012-2014, pemberkasan calon Pegawai Negeri Sipil realisasi sebanyak 66 orang dari tahun 2010-2014, penyelenggaraan usul pensiun Pegawai Negeri Sipil terealisasi sebanyak 22 orang yang dari tahun 2010-2014, penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat Golongan terealisasi sebanyak 17 orang pada tahun 2010 menjadi 38 orang pada tahun 2014, penyusunan Bezeting dan formasi pegawai sebanyak 1 paket dari tahun 2011-2014, penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian terealisasi sebanyak 1

kali pada tahun 2012, penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS terealisasi sebanyak 477 orang pada tahun 2010 menjadi 2633 orang pada tahun 2014, dan pendataan serta penataan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangli terealisasi sebanyak 350 buku pada tahun 2014.

Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas: peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri dari kegiatan reses sebanyak 2 kali pada tahun 2010-2013, kegiatan peresmian/ pengambilan sumpah anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Bali tahun 2014-2019 sebanyak 108 orang pada tahun 2014, kegiatan koordinasi dan konsultasi serta menghadiri undangan bagi Pimpinan dan anggota DPRD terealisasi sebanyak 15 kali pada tahun 2010-2014, kegiatan rapat rapat fraksi terealisasi sebanyak 120 laporan dari tahun 2010-2014, kegiatan pembahasan peraturan daerah, monitoring, evaluasi dan pengawasan peraturan daerah serta kebijakan daerah lainnya yang terealisasi sebanyak 9 Perda dari tahun 2010-2014, kegiatan peningkatan SDM Pimpinan dan anggota DPRD yang terealisasi sebanyak 55 orang dari tahun 2010-2014, hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Agama yang terealisasi sebanyak 5 kali pada tahun 2010 menjadi dua kali pada tahun 2014, dan penyebaran informasi kegiatan DPRD yang terealisasi sebanyak 100 laporan dari tahun 2010-2014.

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan sasaran yaitu pembuatan profil desa/kelurahan dari 68 desa dan 4 kel pada tahun 2011 menjadi 68 desa 4 kel pada tahun 2015, diklat aparatur pemerintah desa dari 72 orang pada tahun 2011 menjadi 72 orang pada tahun 2015, serta pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dari 15 desa/kel pada tahun 2011 menjadi 12 desa/kel pada tahun 2015. Berikutnya Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan beberapa sasaran yaitu terwujudnya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat dari 16 desa/kel pada tahun 2011 menjadi 14 desa/kel pada tahun 2015, terwujudnya monev dan pelaporan pengawasan penanggulangan kemiskinan dari 72 desa/kel pada tahun 2011 menjadi 72 desa/kel pada tahun 2015, dan pelatihan pengurus LPM Desa/kelurahan dari 72 orang pada tahun 2011 menjadi 72 orang pada tahun 2015. Berikutnya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu terpenuhinya 500 RTM rumah sehat dari 100 RTM pada tahun 2011 menjadi 100 RTM pada tahun 2015, terbinanya monev posyantekdes di 72 desa/kel dari 72 desa/kel pada tahun 2011 menjadi 72 desa/kel pada tahun 2015, dan terbinanya kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015. Dan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat yang terdiri dari sasaran yaitu terwujudnya pengelolaan pasar desa di 31 pasar desa dari 31 pasar desa pada tahun 2011 menjadi 31 pasar desa pada tahun 2015, terbinanya kelompok usaha ekonomi di 68 desa dari 68 desa pada tahun 2011 menjadi 68 desa pada tahun 2015, terbinanya Bumdes, dan terbinanya lumbung pangan masyarakat desa dari 68 desa pada tahun 2011 menjadi 68 desa pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan yang terdiri dari jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan jenis-jenis TTG dengan capaian 100% dari tahun 2010-2014, persentase meningkatnya peran dan fungsi LPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa atau kelurahan dengan capaian 100% dari tahun 2011-2012, persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PKK tercapai 100% dari tahun 2010-2014. Berikutnya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang terdiri dari persentase meningkatnya kinerja posyandu sebesar 100% dari tahun 2010-2014, jumlah desa atau kelurahan yang memiliki Swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM Kecamatan yang berarti capaian mencapai 100% pada tahun 2010-2014, jumlah kecamatan yang memiliki keterpaduan pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan yang berlokasi di 4 Kecamatan dengan capaian 100% dari tahun 2010-2014, jumlah buku penyusunan analisis kemiskinan sebanyak 10 buku dengan capaian 100% pada tahun 2011, jumlah data profil desa atau kelurahan sesuai target dengan capaian 100% dari tahun 2012-2014, persentase pengembangan pasar desa dengan capaian 100% dari tahun 2012-2014, persentase penurunan jumlah penduduk miskin dengan capaian 100% dari tahun 2011-2012, jumlah desa yang difasilitasi gerbang Sadu Mandara yang memiliki peningkatan kreativitas usaha ekonomi sebanyak 82 lokasi di Desa dengan capaian sebesar 100% dari tahun 2012-2014, jumlah database terpilah dalam rangka sinergitas sasaran program penanggulangan kemiskinan dengan capaian 100% pada tahun 2012, jumlah desa atau kelurahan dalam pelaksanaan perlombaan desa atau kelurahan dengan capaian 100% pada tahun 2010-2014, persentase meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan Gerbang Gita Santi dengan capaian 100% dari tahun 2012-2014.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yaitu jumlah organisasi bumdes yang terbentuk dengan capaian satu organisasi atau sebesar 100% pada tahun 2014. Berikutnya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa atau kelurahan yang terdiri dari jumlah desa atau kelurahan yang mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan capaian 100% berlokasi di 4 Kecamatan pada tahun 2010-2014, jumlah Banjar dinas yang diverifikasi Banjar persiapan menjadi Banjar dinas yang berlokasi di 8 Banjar dinas dengan capaian sebesar 100%, dan jumlah pengelolaan alokasi dana yang berada di semua desa atau

kelurahan sebanyak 68 desa dengan capaian 100% pada tahun 2010-2014. berikutnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan dengan jumlah kelompok usaha ekonomi terpadu wanita pedesaan yang dibentuk di 4 Kecamatan dengan capaian 100%.

21. Bidang Sosial

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar sosial terdiri atas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terdiri dalam beberapa sasaran yaitu: Meningkatkan jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat daerah terpencil terhadap total kebutuhan dari 50 KK pada tahun 2011 menjadi 750 KK pada tahun 2015, meningkatkan jumlah peserta pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dari 100 KK pada tahun 2011 menjadi 500 KK pada tahun 2015, meningkatkan jumlah peserta pemberdayaan keluarga, fakir miskin dari 100 KK pada tahun 2011 menjadi 500 KK pada tahun 2015, meningkatnya jumlah peserta Pemberdayaan Wanita rawan sosial ekonomi dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015, meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015.

Program peningkatan mutu dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia di luar panti dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015, meningkatnya jumlah peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada bekas narapidana dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015, meningkatnya jumlah peserta yang menerima pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015, meningkatnya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015.

Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan anak terlantar Terdiri dari beberapa asas alam yaitu meningkatnya jumlah peserta pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar terhadap total kebutuhan dari 30 orang pada tahun 2011 menjadi 150 orang pada tahun 2015, serta meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dari 30 orang yang pada tahun 2011 menjadi 150 orang pada tahun 2015.

Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan para penyandang cacat dan trauma Terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya jumlah peserta yang dikirim untuk

mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dari 3 orang pada tahun 2011 menjadi 15 orang pada tahun 2015, meningkatnya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015.

Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) terdapat sasaran yaitu meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat yang rawan menggepeng dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015.

Peningkatan mutu dan kuantitas pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu: meningkatnya pembinaan karang taruna berprestasi dari 4 karang taruna pada tahun 2011 menjadi 20 kelompok pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan pekerja sosial masyarakat berprestasi dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan kelompok usaha bersama berprestasi dari 4 kelompok pada tahun 2011 menjadi 20 kelompok pada tahun 2015, meningkatnya sosialisasi peraturan pengumpulan uang dan barang dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang yang pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan manajemen askesos dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi dua 50 orang pada tahun 2015, meningkatnya pembinaan orsos desa dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015, meningkatnya persiapan penanggulangan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial dari 150 paket pada tahun 2011 menjadi 750 paket pada tahun 2015, meningkatnya pelatihan satuan tenaga sosial penanggulangan bencana dari 80 orang pada tahun 2011 menjadi 400 orang pada tahun 2015 dan meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015.

b. Realisasi

Realisasi terdiri atas: kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang terdiri dari: pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandanh cacat dengan capaian 45 org pada tahun 2010 menjadi 12 orang pada tahun 2014, pemulangan orang terlantar sebanyak 700 orang pada tahun 2010 menjadi 600 orag pada tahun 2012,pembinaan dan pelayanan kesejahteraan lanjut usia dengan capaian 100 orang pada tahun 2010 menjadi 400 orang pada tahun 2012, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat dengan capaian 71 orang pada tahun 2010, peningkatan pelayanan penyandang dengan capaian 4 orang pada tahun 2010 menjadi 120 orang pada tahun 2012, operasional dan rakor komda lanjut usia dengan capaian 75 orang pada tahun 2012, penanganan gepeng dengan capaian 1200 orang pada tahun 2010, penanganan penyalahgunaan NAPZA dengan capaian 60 orang pada tahun 2010, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan capaian 95 orang pada tahun 2013 menjadi 120 pada tahun 2014, bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial

bagi lanjut usia non produktif di luar panti dengan capaian 130 pada tahun 2013-2014. Berikutnya program pembinaan anak terlantar yang terdiri dari: pelayanan dan perlindungan dengan capaian 195 anak pada tahun 2010 menjadi 355 anak pada tahun 2012, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dengan capaian 300 anak pada tahun 2012, dan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dengan capaian 260 anak pada tahun 2010.

Berikutnya pemberdayaan kelembagaan Kesos yang terdiri dari pembinaan pekerja sosial dengan capaian 60 oarng pada tahun 2010 dan 2012, pembinaan orsos dengan capaian 90 orsos pada tahun 2010 menjadi 60 orsos pada tahun 2010, dan pemberdayaan kapasitas karang taruna dengan capaian 100 karang taruna pada tahun 2010-2012.

Jaminan Kesejahteraan Sosial terdiri dari: koordinasi dan sosialisasi program keluarga harapan (PKH) dengan capaian 80 orang pada tahun 2011 menjadi 140 orang pada tahun 2012, dan sosialisasi serta pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dengan capaian 45 orang pada tahun 2012.

Program UPT pelayanan sosial program pelayanan dan rehabilitasi Kesos yang terdiri dari: pelayanan lanjut usia di PSTW Jara Mara Pati Singaraja dengan capaian 80 orang pada tahun 2010-2012, dan pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Seraya Denpasar dengan capaian 50 orang pada tahun 2010-2012.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari: peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan capaian 1 paket pada tahun 2012-2014.

22. Bidang Kebudayaan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar kebudayaan terdiri atas: Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pelestarian Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dari tahun 2011-2015 mencapai target sebesar 100%.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Program pengembangan nilai budaya yang terdiri dari: pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan capaian Rp 59.387.000 pada tahun 2010 menjadi 156.683.300 pada tahun 2014, Evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya dengan capaian Rp 29.929.000 pada tahun 2012 menjadi 36.990.000 pada tahun 2014, Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dengan capaian Rp 24.945.700 pada tahun 2012 menjadi Rp 127.178.700 pada tahun 2014.

Berikutnya Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan capaian sebesar Rp

49.639.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 108.721.000 pada tahun 2014. Selanjutnya untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan capaian sebesar Rp 333.613.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.394.898.900 pada tahun 2014. Dan untuk Program Peningkatan Apresiasi Budaya Bali dengan capaian sebesar Rp 39.994.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 49.451.504 pada tahun 2014.

23. Bidang Statistik

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar statistik terdiri atas: Pengembangan Data/Informasi dengan melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan pengumpulan, updating, dan analisis data/informasi capaian target kinerja program.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan capaian yaitu kegiatan pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah sebanyak 65 buku pada tahun 2010 menjadi 200 buku pada tahun 2014. Berikutnya kegiatan penyusunan profil daerah dengan capaian sebanyak 22 buku pada tahun 2010.

24. Bidang Kearsipan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Kearsipan terdiri atas: Peningkatan sistem administrasi kearsipan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, peningkatan kualitas pelayanan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan dari tahun 2011 hingga 2015 mencapai target sebesar 100%.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Program peningkatan kualitas informasi dengan capaian pada kegiatan pembinaan pengelola kearsipan desa dan sekolah sebanyak 27 orang pada tahun 2010 menjadi 15 orang pada tahun 2014 dan kegiatan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dengan capaian 49 jilid pada tahun 2010 menjadi 32 jilid pada tahun 2011. Berikutnya Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah dengan capaian terdiri dari kegiatan akuisisi arsip mencapai 1800 Eks pada tahun 2012 menjadi 354 Eks pada tahun 2014, dan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan dengan capaian sebanyak 60 orang pada tahun 2014.

25. Bidang Perpustakaan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Perpustakaan terdiri atas Peningkatan pengembangan budaya Banjar dan pembinaan perpustakaan terdiri dari meningkatkan SDM pengelola perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK, desa/kelurahan, khusus dan ibadah) sebesar 100% meningkatkan pengelolaan perpustakaan (sekolah Desa/kelurahan, khusus dan ibadah) sebesar 100%, meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba aktivitas membaca (TK, SMP, SMA/SMK dan umum) sebesar 100%, meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa) sebesar 100%, meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (sekolah, desa adat, Lurah, Griya dan yang terkait lainnya) sebesar 100%, dan meningkatkan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, Desa dan ibadah sebesar 100%.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: Program peningkatan kualitas informasi dengan kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip dengan capaian 139 jilid pada tahun 2010 menjadi 107 jilid pada tahun 2014. Berikutnya adalah program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar yang terealisasi sebanyak 103 orang pada tahun 2010 menjadi 6 orang pada tahun 2014, kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca yang terealisasi sebanyak 60 sekolah pada tahun 2010 menjadi 43 sekolah pada tahun 2014, kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dengan capaian 120 Eks pada tahun 2010 menjadi 352 Eks pada tahun 2014, kegiatan pelaksanaan hari kunjung perpustakaan dengan capaian 175 orang pada tahun 2010 menjadi 880 orang pada tahun 2014, dan kegiatan pembinaan pengelola perpustakaan desa dan sekolah dengan capaian 50 orang pada tahun 2010 menjadi 15 orang pada tahun 2014. Selanjutnya program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan kegiatan pelestarian pustaka yang terealisasi sebanyak 9 cakepan pada tahun 2013 menjadi 7 cakepan pada tahun 2014.

10.2 Urusan Pilihan 2010-2015

1. Bidang Peternakan dan Perikanan

a. Target

Indikator kinerja utama pada urusan pilihan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bangli tahun 2010-2015 terdiri atas: Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan yang memiliki beberapa sasaran yaitu: melaksanakan pencegahan penyakit hewan/ ikan menular dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015,

penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular/ikan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, pengembangan sarana prasarana Puskeswankan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Veteriner dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015, dan *Surveyllance* penyakit hewan menular/ikan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2015.

Berikutnya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang memiliki beberapa sasaran yaitu: penyebaran dan pengembangan ternak sapi betina di masyarakat dari 60 ekor pada tahun 2011 menjadi 100 ekor pada tahun 2015, pembibitan dan perawatan ternak dari 3500 ekor pada tahun 2011 menjadi 5500 ekor pada tahun 2015, dan pengembangan kawasan sentra Pembibitan Ternak Sapi Bali dari 1 lokasi pada tahun 2011 menjadi 1 lokasi pada tahun 2015.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan yang memiliki beberapa sasaran yaitu: pembinaan dan penertiban pasar hewan dari 4 kali pada tahun 2011 menjadi 4 kali pada tahun 2015, temu usaha dan bursa ternak dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 3 kali pada tahun 2015, meningkatkan promosi dan investasi produk unggulan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015, Pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana pasar kawasan minapolitan dan agropolitan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 2 paket pada tahun 2015, pembinaan, pengawasan/ pemantauan usaha peternakan dan Perikanan dari empat kali pada tahun 2011 menjadi 4 kali pada tahun 2015, pengawasan mutu produk bahan asal hewan dan ikan dari 12 kali pada tahun 2011 menjadi 12 kali pada tahun 2015, pendistribusian alat dan mesin dari satu paket pada tahun 2011 menjadi satu paket pada tahun 2015, peningkatan sarana dan prasarana pemasaran produk olahan ternak dan ikan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 2 paket pada tahun 2015, pertemuan kemitrausaha peternakan dan Perikanan dari satu kawasan pada tahun 2011 menjadi satu kawasan pada tahun 2015. Selanjutnya Peningkatan pengembangan perikanan budidaya dengan sasaran yaitu penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prod. Perikanan budidaya prasarana dari 15 kelompok pada tahun 2011 menjadi 15 kelompok pada tahun 2015.

Peningkatan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan terdiri dari beberapa sasaran yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 1 unit pada tahun 2015, dan peningkatan pelayanan pemasaran produk perikanan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi satu paket pada tahun 2015.

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumber daya perikanan memiliki beberapa sasaran yaitu penyediaan sarana pengawasan sumber daya perikanan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi satu paket pada tahun 2015 dan penebaran benih ikan (*restocking*) dari satu juta ekor pada tahun 2011 menjadi 1 juta ekor pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi tersebut sebagai berikut:

1) Bidang Peternakan dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Realisasi sebesar 100% pada tahun 2010 menjadi 98.30% pada tahun 2014. Berikutnya Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan realisasi 100% pada tahun 2010 menjadi terealisasi 100% pada tahun 2014. Berikutnya Program peningkatan ketahanan pangan dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2010 menjadi 99.81% pada tahun 2014. Berikutnya Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian yang terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014 dan program penyediaan serta pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014.
2) Bidang Perikanan dengan kegiatan Program pengembangan budidaya perikanan dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014. Berikutnya program peningkatan ketahanan pangan dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014. Selanjutnya program peningkatan produksi perikanan budidaya, program pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya, dan program pengembangan usaha mina pedesaan P2HP dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2014.

2. Bidang Pertanian

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Pertanian terdiri atas: Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari beberapa sasaran yaitu: Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman padi yang tepat dan berkelanjutan dari 80 paket pada tahun 2011 menjadi 110 paket pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan dari 8 paket pada tahun 2011 menjadi 24 paket pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman jagung yang tepat dan berkelanjutan dari 4 paket pada tahun 2011 menjadi 20 paket pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman jeruk yang tepat dan berkelanjutan dari 3 paket pada tahun 2011 menjadi 12 paket pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman bawang merah yang tepat dan berkelanjutan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 8 paket pada tahun 2015, meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman pisang yang tepat dan berkelanjutan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 6 paket pada tahun 2015, meningkatnya kemampuan lembaga petani dari satu klp pada tahun 2011 menjadi 4 kelompok pada tahun 2015.

Peningkatan ketahanan pangan terdiri dari beberapa sasaran seperti tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas padi dari luas tanam 5987 ha pada ta-

hun 2011 menjadi 6085 ha pada tahun 2015 dengan luas panen dari 5847 ha pada tahun 2011 menjadi 5838 ha pada tahun 2019. Tercapainya peningkatan produksi luas tanah dan luas panen jagung dengan luas tanam 3639 ha pada tahun 2011 menjadi 3650 ha pada tahun 2015 dengan hasil panen 2897 ha pada tahun 2011 menjadi 2874 ha pada tahun 2015. peningkatan produksi dan produktivitas kedelai dengan luas tanam 127 ha pada tahun 2011 menjadi 118 ha pada tahun 2015 dengan panen 113 ha pada tahun 2011 menjadi 106 ha pada tahun 2015. peningkatan produksi dan produktivitas kacang tanah dengan luas tanaman 1593 ha pada tahun 2011 menjadi 1604 ha pada tahun 2015 dengan panen 1526 ha pada tahun 2011 menjadi 1541 ha pada tahun 2015. peningkatan produksi dan produktivitas ubi kayu dengan luas tanam 1076 ha pada tahun 2011 menjadi 1056ha pada tahun 2015 dan luas panen 1103 ha pada tahun 2011 menjadi 1076ha pada tahun 2015. peningkatan produksi dan produktivitas ubi jalar dengan luas tanam 3249ha pada tahun 2011 menjadi 3280ha pada tahun 2015 dengan panen 3261 ha pada tahun 2011 menjadi 3246 ha pada tahun 2015.

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan yang terdiri dari sasaran yaitu terselenggaranya penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon dari tiga kelompok pada tahun 2011 menjadi 1 kelompok pada tahun 2015 dan terlaksananya pameran expo, expo-Agritek, expo-Indonesia, agribisnis Pekan Raya (Distan Provinsi, Jakarta, Batam, Denpasar) dari 3 paket pada tahun 2011 menjadi 3 paket pada tahun 2015.

Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dari 3 unit pada tahun 2011 menjadi 3 unit pada tahun 2015, meningkatnya kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dari 5 unit pada tahun 2011 menjadi 5 unit pada tahun 2015, meningkatnya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan pada kelompok tani di Kabupaten Bangli dari 4 kelompok pada tahun 2011 menjadi empat kelompok pada tahun 2015, Tersedianya akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya dengan pembangunan Los penampungan hasil produksi dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi empat kelompok pada tahun 2015.

Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan yang terdiri dari beberapa sasaran, yaitu tersedianya sarana produksi dan infrastruktur pertanian lahan sawah dan lahan kering pada poktan/ gapoktan dari 34 kelompok pada tahun 2011 menjadi 23 kelompok pada tahun 2015, dan terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan dari satu paket tahun 2011 menjadi satu paket tahun 2015.

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/ perkebunan dari 72 orang pada tahun 2011 menjadi 72 orang pada tahun 2015, meningkatnya kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ perkebunan dari 142 orang

pada tahun 2011 menjadi 142 orang pada tahun 2015, meningkatnya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan dari 75 orang pada tahun 2011 menjadi 290 orang pada tahun 2015, terselenggaranya penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dari 78 orang pada tahun 2011 menjadi 78 orang pada tahun 2015, sarana dan prasarana Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangli dari 1 kelompok pada tahun 2011 menjadi 1 kelompok pada tahun 2015, terwujudnya mutu penyelenggaraan Penyuluh Pertanian, kehutanan dari 25 kelompok pada tahun 2011 menjadi 35 kelompok pada tahun 2015.

Berikutnya pengembangan agribisnis yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu terwujudnya pengembangan kawasan jeruk dari 50 hektar are pada tahun 2011 menjadi 90 hektar are pada tahun 2015, terwujudnya pengembangan kawasan bawang merah dari 25 hektar are pada tahun 2011 menjadi 50 hektar pada tahun 2015, terwujudnya pengembangan kawasan pisang dari 10 hektar are pada tahun 2011 menjadi 30 hektar are pada tahun 2015, Tersedianya bibit tanaman hias dari 2 unit pada tahun 2011 menjadi 6 unit pada tahun 2015. dikembangkannya pertanian organik dengan peningkatan luas tanam ramah lingkungan dari 25 hektar are menjadi 60 hektar are.

b. Realisasi

Realisasi tersebut terdiri atas: peningkatan kesejahteraan petani yang terdiri atas kegiatan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan melalui lomba-lomba dengan capaian 5 kali pada tahun 2010 menjadi 1 kali pada tahun 2013 dan kegiatan pembinaan dan pemantapan SIMANTRI dengan capaian 19 klp pada tahun 2011 menjadi 10 klp pada tahun 2014.

Peningkatan ketahanan pangan yang terdiri dari peningkatan produktivitas padi dan kacang tanah dari 600 Ha pada tahun 2011 menjadi 1000 Ha pada tahun 2014, peningkatan luas areal jagung hibrida dari 10 Ha pada tahun 2010 menjadi 30 Ha pada tahun 2013, pengembangan tanaman holtikultura dengan capaian paling banyak 10.000 pohon pada tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 800 pohon, pengendalian hama penyakit OPT dari 10 subak pada tahun 2012 menjadi 12 subak pada tahun 2014, konservasi lahan kering dengan capaian 250 Ha pada tahun 2010 menjadi 125 Ha pada tahun 2011, dan perbanyakan benih jagung dan kacang tanah dengan capaian sebanyak 1440 kg pada tahun 2010.

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan capaian sebesar 40.000 pohon pada tahun 2010 menjadi 60.000 pohon pada tahun 2013. Selanjutnya pengembangan agribisnis dengan capaian sebanyak 5 klp pada tahun 2011 menjadi 2 klp pada tahun 2013, kemudian menjadi 1 kegiatan dari tahun 2010-2014, dan penyediaan tanaman jeruk, obat dan hias sebanyak 6.333 pohon tahun 2010-2014.

3. Bidang Kehutanan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Kehutanan terdiri atas: Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang terdiri dari beberapa sasaran, yaitu meningkatnya pengembangan hutan tanaman langka dari 25 hektar are pada tahun 2011 menjadi 25 hektar are pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan hasil hutan non kayu, seperti bambu hitam dan Petung terhadap total kebutuhan dari 30 hektar areal pada tahun 2011 menjadi 30 hektar are pada tahun 2015, meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa terhadap total kebutuhan dari 100 hektar are pada tahun 2011 menjadi 100 hektar are pada tahun 2015, meningkatnya pengembangan hutan tanaman atau hutan rakyat dari 30 hektar are pada tahun 2011 menjadi 30 hektar are pada tahun 2015, pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya lebah madu dari 40 hektar areal pada tahun 2011 menjadi 40 hektar are pada tahun 2015, pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan Budi Daya Sutra Alam dari 5 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015, pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya gaharu dari 25 hektar areal pada tahun 2011 menjadi 25 hektar are pada tahun 2015, pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya bambu dari 100 hektar are pada tahun 2011 menjadi 100 hektar are pada tahun 2015, dan meningkatnya pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dan bambu terhadap total kebutuhan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi satu paket pada tahun 2015.

Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu terwujudnya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 2 paket pada tahun 2015, meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011 sebanyak 2 paket menjadi 2 paket pada tahun 2015, meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari 4 paket pada tahun 2011 menjadi 4 paket pada tahun 2015, meningkatnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi dua paket pada tahun 2015, dan meningkatnya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusak hutan dari 2 paket pada tahun 2011 menjadi 2 paket pada tahun 2015.

Rehabilitasi hutan dan lahan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya pembuatan bibit/ benih tanaman dari 50.000 pohon pada tahun 2011 menjadi 50.000 pohon pada tahun 2015, terlaksananya kegiatan perlindungan air dan jurang dari 10 ha pada tahun 2011 menjadi 10 ha pada yahun 2015, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL dari 5 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015.

Perencanaan dan Pengembangan Hutan yang terdiri atas beberapa sasaran yaitu meningkatnya pengembangan hutan masyarakat adat dari 50 Ha pada tahun 2011 menjadi 50 Ha pada tahun 2015, dan meningkatnya pendampingan kelompok

usaha perhutanan rakyat dari 5 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015.

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu meningkatnya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 1 paket pada tahun 2012, meningkatnya pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan dari 12 kali pada tahun 2011 menjadi 12 kali pada tahun 2015, dan meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil dari 12 kali pada tahun 2011 menjadi 12 kali pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi program adalah: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang terdiri dari kegiayan pengembangan hutan tanaman langka dengan capaian 5.850 pohon pada tahun 2010 menjadi 1.650 pohon pada tahun 2014, pengembangan hutan tanaman bambu petung dengan capaian 5.000 pohon pada tahun 2010 menjadi 1.200 pohon pada tahun 2014, pengembangan hutan tanaman dengan capaian 3.370 pohon pada tahun 2010 menjadi 160.000 pohon pada tahun 2013, penghijauan lingkungan dengan capaian 23.500 pohon pada tahun 2010 menjadi 50.000 pohon pada tahun 2013, dan rehabilitasi hutan serta lahan mencapai 1500 pohon, 19 unit bangunan sipil teknis, 400 Ha pengkayaan hutan rakyat dan 1 unit bak penampung air.

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas: Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengendalian pemcemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan ketahanan pangan, dan program rehabilitasi htan dan lembah.

b. Realisasi Program

Realisasi tersebut terdiri atas: kegiatan monitoring dan evaluasi pertambangan mineral dengan capaian 18 dusun pada tahun 2010 menjadi 15 dusun pada tahun 2013, pembinaan dan monitoring air tanah dengan capaian 23 dusun pada tahun 2010 menjadi 15 dusun pada tahun 2013, pengendalian dan penertiban pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan capaian 17 dusun pada tahun 2014, monitoring penertiban pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan capaian 13 dusun pada tahun 2014, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dengan capaian 5 PLTS pada tahun 2014, pendataan pemanfaatan

energi pedesaan dengan capaian 15 dusun pada tahun 2014, koordinasi pengelolaan konservasi sekolah dengan capaian 13 sekolah pada tahun 2010 menjadi 10 sekolah pada tahun 2012, pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha terkait tentang limbah hotel, limbah restaurant dan limbah ternak dengan capaian 10 peternak pada tahun 2010 menjadi 17 peternak pada tahun 2014, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan dengan capaian 16 desa pada tahun 2013, dan pembinaan dan monitoring kesediaan pangan masyarakat dengan capaian 28 desa pada tahun 2010 menjadi 29 desa pada tahun 2014.

5. Bidang Pariwisata

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Pariwisata terdiri atas: Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi informasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan target 100%, peningkatan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat akad dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengembangan objek/ daerah pariwisata unggulan dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengembangan daerah tujuan wisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengembangan destinasi pariwisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pengembangan dan pengelolaan jasa pariwisata dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, mewujudkan kualitas sdm pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan varietas potensi unggulan pariwisata dan divesifikasi produk pelayanan pariwisata yang standar berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, mengembangkan seni dan budaya daerah dan pelestarian adat serta budaya sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, Peningkatan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100%, peningkatan pelestarian kekayaan budaya dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar 100% dan peningkatan pengembangan nilai-nilai budaya dari tahun 2011 hingga 2015 dengan target sebesar

100%.

b. Realisasi

Seluruh target indikator yang telah ditetapkan telah tercapai sebesar 100%.

6. Bidang Industri dan Perdagangan

a. Target

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Perdagangan terdiri atas: Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan sasaran sebagai berikut: monitoring dan pengawasan BDKT/ meningkatnya perlindungan konsumen dalam perdagangan barang dan jasa dari 4 kali (100 pedagang) pada tahun 2011 menjadi 20 kali (700 pedagang) pada tahun 2015, dan monitoring serta pengawasan MIKOL/ terawasi nya peredaran minuman beralkohol dari 4 kali (10 pedagang) pada tahun 2011 menjadi 20 kali (50 pedagang) pada tahun 2015.

Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah terdiri dari beberapa sasaran sebagai berikut: fasilitasi permodalan usaha perdagangan/ meningkatnya aksesbilitas permodalan dalam usaha perdagangan dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015, serta fasilitasi kemitraan usaha perdagangan lokal /meningkatnya aksesbilitas kemitraan dalam usaha perdagangan dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015.

Peningkatan dan pengembangan ekspor dan impor daerah terdiri dari beberapa sasaran yaitu: pelaksanaan pameran dagang internasional/ meningkatnya jumlah bayer internasional terhadap produk Kabupaten Bangli 10 buyer pada tahun 2011 menjadi 50 buyer pada tahun 2015, Pameran produk ekspor/ meningkatnya promosi produk ekspor melalui pameran dari 10 jenis pada tahun 2011 menjadi 100 jenis pada tahun 2015, monitoring perkembangan ekspor impor/ terawasi nya peredaran produk impor dan produk ekspor daerah dari 12 kali pada tahun 2011 menjadi 60 kali pada tahun 2015, fasilitasi kerjasama perdagangan internasional/ meningkatnya aksesibilitas kerjasama dalam usaha perdagangan dari 5 pedagang pada tahun 2011 menjadi 45 pedagang pada tahun 2015, dan pelatihan pengujian mutu barang/ terlaksananya pelatihan pengujian mutu barang dari 4 orang pada tahun 2011 menjadi 45 pedagang pada tahun 2015.

Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan terdiri dari beberapa sasaran yaitu pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015, bantuan alat bagi pedagang kaki lima dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya bantuan peralatan kepada pedagang kaki lima dan Asongan dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015, dan pembinaan org. pedagang kaki lima sektor informal

lainnya/ meningkatnya pembinaan pada orang pedagang kaki lima dan asongan dari 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015.

Peningkatan pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional terdiri dari beberapa sasaran yaitu melaksanakan pasar rakyat/ terlaksananya promosi barang dagangan di tingkat lokal dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, melaksanakan pasar murah/ terlaksananya stabilitas harga barang dagangan dari satu kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015, pelaksanaan pameran dagang internasional dari dua kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015, dan pameran produk ekspor/ terlaksananya pameran produk ekspor di tingkat nasional dari dua kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015.

Peningkatan pengawasan legislasi usaha perdagangan terdiri dari sasaran yaitu monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP/ termonitor nya dan terawasi nya SIUP dan TDP dari 12 kali pada tahun 2011 menjadi 60 kali pada tahun 2015, dan monitoring serta Pengawasan Pembangunan pasar modern/ waralaba dari empat kali pada tahun 2011 menjadi 20 kali pada tahun 2015.

Indikator kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Perindustrian terdiri atas: Peningkatan kapasitas iptek sistem industri terdiri dari beberapa sasaran yaitu pembentukan dan pengembangan inkubator/ terbentuknya inkubator dari 1 orang pada tahun target 2011 menjadi 5 orang pada tahun 2015, penggunaan produk industri yang ber-SNI dari 10 orang yang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015, Dan pembinaan manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu/ terbinanya perajin ikm agar dapat menerapkan standar mutu yang ditetapkan dari 1 gugus pada tahun 2011 menjadi 5 gugus pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi terdiri dari beberapa sasaran sebagai berikut: bantuan peralatan tepat guna/ Tersedianya peralatan tepat guna bagi perajin IKM dari 15 orang pada tahun 2011 menjadi 75 orang pada tahun 2015, terbinanya IKM dalam memperkuat jaringan dari 15 orang pada tahun 2011 menjadi 75 orang pada tahun 2015, terlatihnya IKM dalam peningkatan mutu produk dari 15 orang pada tahun 2011 menjadi 75 orang pada tahun 2015, terlatihnya IKM dalam peningkatan desain produk dari 15 orang pada tahun 2011 menjadi 75 orang pada tahun 2015 dan pembinaan ikan berwawasan lingkungan dari 30 IKM pada tahun 2011 menjadi 150 IKM pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan sentra-sentra industri potensial terdiri dari beberapa sasaran yaitu terlatihnya perajin rumah tangga dari 10 orang yang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015, terbinanya pengusaha industri rumah tangga dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015, Tersedianya bantuan peralatan pada perajin industri rumah tangga dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015, dan terlaksananya magang ke daerah yang memiliki industri rumah tangga yang lebih maju dari 10 orang pada

tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015.

Peningkatan fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta terdiri dari beberapa sasaran yaitu menyusun negatif investasi pengembangan IKM dari dua kelompok pada tahun 2011 menjadi 17 kelompok pada tahun 2015, Terfasilitasinya IKM dalam akses permodalan dari dua kelompok pada tahun 2011 menjadi 17 kelompok pada tahun 2015 dan terfasilitasi nya IKM dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga dari 2 kelompok pada tahun 2011 menjadi 17 kelompok pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan tata kelola usaha industri yang terdiri dari beberapa sasaran yaitu terlatihnya pengusaha IKM tentang manajemen usaha dari 30 orang pada tahun 2011 menjadi 150 orang pada tahun 2015, dan terbinanya serta terawasinya penggunaan bahan berbahaya dan beracun dari 3 IKM pada tahun 2011 menjadi 15 IKM pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan industri pengolahan hasil industri serta jasa pendukungnya terdiri dari beberapa sasaran yaitu terbinanya perajin agroindustri buah dan sayur khas Kintamani dari 1 IKM pada tahun 2011 menjadi 5 IKM pada tahun 2015, dan berkembangnya agroindustri buah tamarilin (terong Kintamani) dari 15 IKM pada tahun 2011 menjadi 75 IKM pada tahun 2015.

Peningkatan penataan struktur industri terdiri dari beberapa sasaran yaitu terbentuknya kelompok-kelompok perajin IKM dari 2 IKM pada tahun 2011 menjadi 10 IKM pada tahun 2015, dan terbinanya KUB IKM Kabupaten Bangli dari 3 buah pada tahun 2011 menjadi 15 buah pada tahun 2015.

Peningkatan pengembangan usaha produksi industri hulu hingga Hilir dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015, peningkatan kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi dengan target 1 orang pada tahun 2011 menjadi 5 orang pada tahun 2015, Peningkatan pengembangan modal ventura dan inkubator dari 1 orang pada tahun 2011 menjadi 5 orang pada tahun 2015, peningkatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi pada tahun 2011 mencapai target 1 unit dan tahun 2015 menjadi 5 unit, peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional dari 5 IKM pada tahun 2011 menjadi 25 IKM pada tahun 2015, peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk dari 5 IKM pada tahun 2011 menjadi 25 IKM pada tahun 2015, peningkatan pengembangan kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan dari satu Desa pada tahun 2011 menjadi 5 Desa pada tahun 2015, peningkatan pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri terdiri dari beberapa sasaran yaitu terbinanya pengusaha IKM dalam penerapan produk industri ber SNI dari 15 IKM pada tahun 2011 menjadi 15 IKM pada tahun 2015, terbinanya pengusaha IKM dalam pemanfaatan label, merk dan kemasan produk dari 15 IKM pada tahun 2011 menjadi 75 IKM pada tahun 2015, dan pembinaan IKM dalam

pemanfaatan produk ber-ISO dari 10 IKM pada tahun 2011 menjadi 50 IKM pada tahun 2015. Selanjutnya peningkatan pengembangan data dan informasi industri dan perdagangan terdiri dari beberapa sasaran yaitu penyusunan sistem informasi industri dan perdagangan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015, penyusunan data Industri dan Perdagangan Kabupaten Bangli dalam angka dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan dari satu paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015. Berikutnya peningkatan pengawasan legislasi usaha industri dari target mencapai 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015.

b. Realisasi Program

Realisasi terdiri atas: program pengembangan sentra-sentra industri potensial yang dengan capaian terlaksananya pendampingan OVOP di Kabupaten Bangli, program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan capaian terlaksananya penerapan UTTP di Kabupaten Bangli, program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan capaian terlaksananya pameran industri kerajinan kecil, kerajinan pada Pesta Kesenian Bali, dan pameran produk ekspor pengrajin di Kabupaten Bangli, kemudian program, berikutnya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan capaian termonitornya harga sembako dan strategis lainnya, program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan capaian tertatanya tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, dan program penumbuhan sentra industri kecil dengan capaian terlatihnya para perain bambu di Kabupaten Bangli.

8.2 INDIKATOR TARGET DAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB 2016-2021

1. Bidang Pendidikan

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 terdiri atas: APK PAUD pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 68%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 68%, tahun 2017 sebesar 68%, tahun 2018 sebesar 71%, tahun 2019 sebesar 85%, tahun 2020 sebesar 82%, dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 87.03%.

Cakupan layanan Pendidikan dasar Sembilan tahun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 79%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 80%, tahun 2017 sebesar 82%, tahun 2018 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 87%, tahun 2020 sebesar 91%, dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100%.

Cakupan layanan Pendidikan Menengah tahun pada kondisi kinerja awal periode

RPJMD 2015 menunjukkan nilai 70%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 72%, tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 77%, tahun 2020 sebesar 79%, dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 81%.

Cakupan layanan Pendidikan Non Formal pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 65%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 70%, tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 80%, tahun 2020 sebesar 85%, dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 90%.

Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD tahun 2015 menunjukkan nilai 74%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 75%, tahun 2017 sebesar 80%, tahun 2018 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100%.

Cakupan Pelayanan Pendidikan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 69%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 75%, tahun 2018 sebesar 80%, tahun 2019 sebesar 85%, tahun 2020 sebesar 90% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 95%.

Cakupan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 68%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 68%, tahun 2017 sebesar 70%, tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 83%, tahun 2020 sebesar 95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi tersebut terdiri dari: Program pendidikan anak usia dini terealisasi sebesar 73%, Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terealisasi sebesar 100%, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terealisasi sebesar 90%, Program manajemen pelayanan pendidikan terealisasi sebesar 65%, Program pendidikan non formal terealisasi sebesar 77%.

2. Bidang Kesehatan

a. Target

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar kesehatan terdiri atas: Angka Kematian Ibu pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 57%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 56%, tahun 2017 sebesar 54%, tahun 2018 sebesar 52%, tahun 2019 sebesar 50%, tahun 2020 sebesar 48%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 46%. Berikutnya Angka Kematian Bayi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 6.90%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.80%, tahun 2017 sebesar 6.50%, tahun 2018 sebesar 6.20%, tahun 2019 sebesar 6%, tahun 2020 sebesar 5.70%, dan

pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 5.70%.

Angka kematian Balita pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 7,9%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 7,8%, tahun 2017 sebesar 7,6%, tahun 2018 sebesar 7,4%, tahun 2019 sebesar 7,2%, tahun 2020 sebesar 7% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 7%. Berikutnya indikator Persentase Desa Kelurahan UCI pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 hingga target kinerja tahun 2016-2020 dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 menunjukkan nilai 100%.

Persentase masyarakat yang terlayani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 hingga target kinerja tahun 2016-2020 dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 menunjukkan nilai 100%. Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 dan target kinerja tahun 2016 menunjukkan nilai 0%, berikutnya target kinerja tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 50%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 65%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 70%.

Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan nilai 14%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 14%, tahun 2017 sebesar 18%, tahun 2018 sebesar 22%, tahun 2019 sebesar 26%, tahun 2020 sebesar 30%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 30%. Persentase Penurunan Gizi Buruk pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015, target kinerja tahun 2016-2020 dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 menunjukkan angka < 5%.

Persentase peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 57%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 57%, tahun 2017 sebesar 86%, tahun 2018 sebesar 86%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 menunjukkan angka 100%.

Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 43%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 43%, tahun 2017 sebesar 83%, tahun 2018 sebesar 87%, tahun 2019 sebesar 91%, tahun 2020 sebesar 96%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 menunjukkan angka 100%. Persentase Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 75%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 43%, tahun 2017 sebesar 80%, tahun 2018 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 95% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 menunjukkan angka 100%.

Persentase Pengembangan Obat dan Makanan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 30%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 50,00%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 65%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar

70%.

Persentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan angka 33%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 33%, tahun 2017 sebesar 89%, tahun 2018 sebesar 89%, tahun 2019 sebesar 89%, tahun 2020 sebesar 89%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 89%.

Persentase Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan angka 25%, dengan target tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 75%, tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 75%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 75%. Persentase Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015, target kinerja tahun 2016-2020 sampai dengan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 menunjukkan angka 75%.

Persentase Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemic pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan angka 73%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 73%, tahun 2017 sebesar 79%, tahun 2018 sebesar 84%, tahun 2019 sebesar 89%, tahun 2020 sebesar 95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Persentase Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015, target kinerja tahun 2016-2020 sampai dengan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 menunjukkan angka 67%.

Persentase Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan angka 22%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 22%, tahun 2017 sebesar 81%, tahun 2018 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 67%, tahun 2020 sebesar 70%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 41%.

Persentase Peningkatan Kemitraan Pelayanan Masyarakat pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan angka 67%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 67%, tahun 2017 sebesar 73%, tahun 2018 sebesar 80%, tahun 2019 sebesar 87%, tahun 2020 sebesar 93%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia pada kondisi kinerja awal RPJMD 2015 menunjukkan nilai 50%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 50%, tahun 2017 sebesar 60%, tahun 2018 sebesar 70%, tahun 2019 sebesar 80%, tahun 2020 sebesar 90%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Persentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 25%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 40%, tahun 2018 sebesar 55%, tahun 2019 sebesar 70%, tahun 2020 sebesar 85%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021

sebesar 100%.

Persentase Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 50%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 50%, tahun 2017 sebesar 60%, tahun 2018 sebesar 70%, tahun 2019 sebesar 80%, tahun 2020 sebesar 90%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, dll.) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 25%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 63%, tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 75%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 75%.

Peningkatan dan Keselamatan Kerja pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 40%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 40%, tahun 2017 sebesar 50%, tahun 2018 sebesar 63%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 88%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Persentase Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 40%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 40%, tahun 2017 sebesar 50%, tahun 2018 sebesar 63%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 88%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 40%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 40%, tahun 2017 sebesar 50%, tahun 2018 sebesar 63%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 88%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Kebutuhan Akan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Terpenuhi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 13%, tahun 2017 sebesar 26%, tahun 2018 sebesar 36%, tahun 2019 sebesar 39%, tahun 2020 sebesar 46%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 49%.

Ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 20%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 45%, tahun 2020 sebesar 50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 55%.

Cakupan Pelayanan BLUD yang Tertangani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 70%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 72%, tahun 2017 sebesar 74%, tahun 2018 sebesar 76%, tahun 2019 sebesar 78%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 82%.

b. Realisasi

Realisasi program terdiri atas: Program obat dan perbekalan kesehatan dengan capaian kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 59.30%, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 77.58 OH, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 98.58 jenis, dan pengisian tabung oksigen sebanyak 15.64 jenis. Berikutnya program upaya kesehatan masyarakat dengan capaian kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat sebanyak 59.30 OB, kunjungan ke KK miskin sebanyak 64.53 KK, penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya sebanyak 90.00 puskesmas, penanganan kasus jiwa di puskesman sebanyak 100.00 jiwa, program pembinaan kesehatan sebanyak 66.20 kali, dan pembinaan kesehatan rujukan sebanyak 78.32 kali.

Program pengawasan obat dan makanan dengan capaian peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan capaian 83.49 orang, peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan dengan capaian 98.78 jenis, dan pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan pangan sebanyak 100.00 izin. Untuk program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan capaian kegiatan pengembangan media promosi dan infromasi sadar hidup sehat sebanyak 92.13 jenis, pembinaan desa siaga sebanyak 35.25 desa, dan pembinaan usaha kesehatan sekolah sebanyak 34.07 sekolah.

Program perbaikan gizi masyarakat dengan capaian kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin sebanyak 88.75 orang dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi sebanyak 96.42 keluarga. Berikutnya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan capaian kegiatan penanganan penyakit menular seperti TBC, rabies dan lainnya sebanyak 90.74 kasus, pembinaan kasus HIV/AIDS sebanyak 99.82 orang, dan penanganan penyakit tidak menular sebanyak 98.14 orang.

Berikutnya program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan capaian kegiatan pembangunan puskesmas sebanyak 83.12 puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan sebanyak 82.26 jenis, dan pemeliharaan rutin gedung puskesmas sebanyak 96.72 puskesmas.

Program peningkatan pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia dengan capaian sebanyak 93.61% posyandu lansia. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan capaian kegiatan rata-rata sebesar 78.39%. program Bantuan Orasional Kesehatan (BOK) di puskesmas di Bangli dengan capaian kegiatan dengan rata-rata sebesar 97.34%. Program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan capaian kegiatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bangli rata-rata sebesar 74.84%. program kesehatan dan keselamatan kerja dengan capaian kegiatan sebanyak 75.27 pos. Program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dengan capaian kegiatan sebanyak 74.29 dokumen. Dan

Program peningkatan pengembangan mutu SDM pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kegiatan sebanyak 100.00 kategori.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Target

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Pekerjaan Umum terdiri atas Persentase Jalan dan Jembatan yang terbangun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 77%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 31%, tahun 2017 sebesar 19%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 54%, tahun 2020 sebesar 67%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 83%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 17%, tahun 2017 sebesar 45%, tahun 2018 sebesar 53%, tahun 2019 sebesar 67%, tahun 2020 sebesar 85%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Turap/Talud/Bronjong yang dibangun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 50%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 24%, tahun 2017 sebesar 56%, tahun 2018 sebesar 67%, tahun 2019 sebesar 78%, tahun 2020 sebesar 89%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 12%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 17%, tahun 2017 sebesar 61%, tahun 2018 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 89%, tahun 2020 sebesar 95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Indikator Persentase sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang memadai pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 80%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 45%, dan tahun 2017 sebesar 100%.

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 60%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 24%, tahun 2018 sebesar 52%, tahun 2019 sebesar 56.40%, tahun 2020 sebesar 77.10%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Indikator Rasio sarana jaringan irigasi yang baik pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 31.64%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 37.39%, tahun 2017 sebesar 48.84%, tahun 2018 sebesar 60.43%, tahun 2019 sebesar 73.02%, tahun 2020 sebesar 86.46%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase embung yang terbangun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD

2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Persentase pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 9.87%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 9.87%, tahun 2017 sebesar 79%, tahun 2018 sebesar 89%, dan tahun 2019 sebesar 100%.

Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 43.12%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 52.60%, tahun 2017 sebesar 62.08%, tahun 2018 sebesar 71.56%, tahun 2019 sebesar 81.04%, tahun 2020 sebesar 90.52%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Infrastruktur Kawasan cepat tumbuh pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3.74%, tahun 2017 sebesar 12.99%, tahun 2018 sebesar 22.24%, tahun 2019 sebesar 31.49%, tahun 2020 sebesar 40.75%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 50%.

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan terdapat sebanyak 2 dokumen, dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 2 dokumen, tahun 2017 sebanyak 6 dokumen, tahun 2018 sebanyak 6 dokumen, tahun 2019 sebanyak 3 dokumen, tahun 2020 sebanyak 3 dokumen, pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebanyak 3 dokumen, dan indikator jumlah dokumen pemanfaatan ruang sesuai aturan dengan target kinerja tahun 2018 menunjukkan terdapat sebanyak 1 dokumen.

Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 20%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 20%, tahun 2017 sebesar 0%, tahun 2018 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 50%, tahun 2020 sebesar 75%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Indikator Persentase sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang baik pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 26.72%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 30.18%, tahun 2017 sebesar 44.14%, tahun 2018 sebesar 58.11%, tahun 2019 sebesar 72.07%, tahun 2020 sebesar 86.04%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi bidang penataan ruang terdiri atas: Program Perencanaan Tata Ruang yaitu dengan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dengan capaian 1 dokumen, dan survey serta pemetaan dengan capaian sebanyak 1 dokumen.

4. Bidang Lingkungan Hidup

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar lingkungan hidup terdiri atas: Persentase Sampah yang Tertangani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 30%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 33%, tahun 2017 sebesar 37%, tahun 2018 sebesar 42%, tahun 2019 sebesar 47%, tahun 2020 sebesar 52%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 60%.

Indikator Persentase Usaha/Kegiatan yang Terawasi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 20%, tahun 2017 sebesar 30%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Lahan Kritis pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 50.80%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 50.60%, tahun 2017 sebesar 47.80%, tahun 2018 sebesar 44.30%, tahun 2019 sebesar 40.30%, tahun 2020 sebesar 35.30%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 30.30%. Persentase Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 11.18%, tahun 2017 sebesar 26.04%, tahun 2018 sebesar 41.20%, tahun 2019 sebesar 58.89%, tahun 2020 sebesar 78.48%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Pengendalian Sumber Polusi Bergerak Yang Terpantau pada kondisi kinerja dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 1.00%, tahun 2017 sebesar 2.30%, tahun 2018 sebesar 5.17%, tahun 2019 sebesar 8.62%, tahun 2020 sebesar 12.46%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 16.67%. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dari Luas Kabupaten Bangli pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 5.00%, tahun 2017 sebesar 7.00%, tahun 2018 sebesar 14.00%, tahun 2019 sebesar 21%, tahun 2020 sebesar 28.00%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 35.00%.

b. Realisasi Program

Realisasi program bidang lingkungan hidup terdiri atas: Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan capaian kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah sebanyak 1 dokumen, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 4 jenis, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dana sarana persampahan sebanyak 4 jenis, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebanyak 149 lokasi.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan capaian kegiatan yaitu koordinasi penilaian kota sehat/Adipura sebanyak 1 kota, pemantauan kualitas lingkungan sebanyak 4 dokumen, pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup sebanyak 45 usaha, koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih sebanyak 4 sungai, penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebanyak 45 sekolah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup sebanyak 45 sekolah. Berikutnya program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan capaian kegiatan penataan RTH sebanyak 150 pohon, dan pemeliharaan RTH sebanyak 5 jenis.

5. Bidang Perencanaan dan Pembangunan

a. Target

Indikator Kinerja terdiri atas: Persentase Jumlah Kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 16%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 16%, tahun 2017 sebesar 16%, tahun 2018 sebesar 18%, tahun 2019 sebesar 20%, tahun 2020 sebesar 22%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 24%.

jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 18.75%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 18.75%, tahun 2017 sebesar 18.75%, tahun 2018 sebesar 19.38%, tahun 2019 sebesar 20.00%, tahun 2020 sebesar 20.63%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 21.25%.

Peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Jumlah Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 16%, tahun 2017 sebesar 13%, tahun 2018 sebesar 14%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 17%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 23%.

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 6.69%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.69%, tahun 2017 sebesar 26.39%, tahun 2018 sebesar 15.24%, tahun 2019 sebesar 16.73%, tahun 2020 sebesar 16.73%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 18.33%.

Berikutnya persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 19.86%, dengan target

kinerja tahun 2016 sebesar 19.86%, tahun 2017 sebesar 13.70%, tahun 2018 sebesar 13.70%, tahun 2019 sebesar 17.12%, tahun 2020 sebesar 17.12%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 18.49%. Persentase jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam pada kondisi kinerja dengan target tahun 2017 sebesar 29.41%, tahun 2018 sebesar 24.60%, tahun 2019 sebesar 34.71%, tahun 2020 sebesar 45.24%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 66.04%.

b. Realisasi

Realisasi bidang perencanaan dan pembangunan terdiri atas: Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah terealisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 49.54%, Program perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari penyusunan RPJMD realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 73.44%, penyusunan rancangan RKPD realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93/97%, penyelenggaraan Musrenbang RKPD realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84.76, monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70.71%, penyusunan analisa standar belanja (ASB) realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68.64%, penyusunan kebijaksanaan umum APBD dan PPAS Kabupaten Bangli realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 33.83%, koordinasi pelaksanaan DAK dan tugas pembantu Kabupaten Bangli realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80.55%, penyusunan rencana program investasi infrastruktur jangka menengah Kabupaten Bangli realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84.80%, koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah realisasi fisik sebesar 85.00% dan realisasi keuangan sebesar 69.00%, koordinasi sistem informasi pembangunan daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 71.10%, operasional pembinaan perencanaan umum daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.57%, kegiatan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77.95%, kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 66.04%, dan kegiatan penyusunan review dokumen perencanaan daerah realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 41.08%.

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 36.72%, dan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan ekonomi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90.42%. Program perencaan pembangunan sosial budaya terealisasi mencapai 100% secara fisik dan realisasi keuangan mencapai 63.55%, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang sosial budaya realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan mencapai 87.06%, dan koordinasi penanggulangan kemiskinan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 79.90%.

6. Bidang Perumahan dan Pemukiman

a. Target

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Perumahan dan pemukiman terdiri atas Persentase Pengembangan Perumahan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.13%, tahun 2017 sebesar 17.44%, tahun 2018 sebesar 36.64%, tahun 2019 sebesar 57.37%, tahun 2020 sebesar 75.76%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Lingkungan Sehat Perumahan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2017 sebesar 19%, tahun 2018 sebesar 41%, tahun 2019 sebesar 61%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Indikator Persentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.56%, tahun 2017 sebesar 17.32%, tahun 2018 sebesar 34.45%, tahun 2019 sebesar 54.93%, tahun 2020 sebesar 75.79%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2017 sebesar 16%, tahun 2018 sebesar 34%, tahun 2019 sebesar 54%, tahun 2020 sebesar 76%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi bidang perumahan dan pemukiman terdiri atas: Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah realisasi mencapai 6 paket dari tahun 2015-2021.

7. Bidang Kepemudaan dan Olah raga

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Kepemudaan Dan Olah raga terdiri atas: Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan sebesar 63%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 63%, tahun 2017 sebesar 65%, tahun 2018 sebesar 74%, tahun 2019 sebesar 75%, tahun 2020 sebesar 79%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebanyak 80%. berikutnya Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan sebesar 68%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 70%, tahun 2018

sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 83%, tahun 2020 sebesar 91%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebanyak 90%.

b. Realisasi

Realisasi program terdiri atas: Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terealisasi mencapai 86%, program peningkatan peran serta kepemudaan terealisasi mencapai 69%, dan program pembinaan peningkatan kreatifitas pemuda dan olahraga terealisasi mencapai 67%.

8. Bidang penanaman Modal

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Penanaman Modal terdiri dari Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan sebanyak 218 investor, dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 268 investor, tahun 2017 sebanyak 293 investor, tahun 2018 sebanyak 318 investor, tahun 2019 sebanyak 343 investor, tahun 2020 sebanyak 368 investor, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebanyak 393 investor. Untuk Indikator Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan sebesar 103 M, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 105 M, tahun 2017 sebesar 108.5 M, tahun 2018 sebesar 111 M, tahun 2019 sebesar 113 M, tahun 2020 sebesar 116 M, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 118.5 M.

b. Realisasi

Realisasi program terdiri atas: Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah sebanyak 2 dokumen, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebanyak 3 sektor, peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha sebanyak 10 kali, penyelenggaraan pameran investasi sebanyak 1 kali, dan penyusunan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) sebanyak 1 dokumen. Berikutnya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan capaian kegiatan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebanyak 5 jenis, dan monitoring, evaluasi serta pelaporan sebanyak 20 perusahaan.

Program penataan pelayanan terpadu satu pintu dengan capaian kegiatan yaitu penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan sebanyak 1 unit, penyelenggaraan informasi, pendaftaran dan penyerahan perizinan sebanyak 637 permohonan izin, monitoring dan pengawasan perizinan sebanyak 12 kali, penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 5 pengaduan, dan pelayanan pemrosesan dan penertiban perizinan sebanyak 635 izin.

9. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas: Persentase Peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 17.09%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 18.63%, tahun 2017 sebesar 20.16%, tahun 2018 sebesar 21.69%, tahun 2019 sebesar 23.22%, tahun 2020 sebesar 24.76%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 26.29%. Untuk Indikator Persentase Peningkatan Jumlah UMKM memiliki kewirausahaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.65%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.73%, tahun 2017 sebesar 1.10%, tahun 2018 sebesar 1.47%, tahun 2019 sebesar 1.83%, tahun 2020 sebesar 2.20%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 2.57%.

Indikator Persentase Peningkatan Jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 1.06%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 1.46%, tahun 2017 sebesar 1.87%, tahun 2018 sebesar 2.27%, tahun 2019 sebesar 2.67%, tahun 2020 sebesar 3.07%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 3.47%. sedangkan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif dan Berkualitas Kabupaten Bangli pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 88.72%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 92.01%, tahun 2017 sebesar 92.80%, tahun 2018 sebesar 93.63%, tahun 2019 sebesar 94.42%, tahun 2020 sebesar 95.55%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 98.52%.

b. Realisasi

Realisasi terdiri atas: Program penciptaan iklim usaha kecil menegah yang kondusif terealisasi dari tahun 2016-2018 mencapai 96.93%, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah terealisasi mencapai 97.31%, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM terealisasi mencapai 88.10% dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi terealisasi mencapai 88.12%.

10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: Persentase Penataan Administrasi Kependudukan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 51.80%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 51.80%, tahun 2017 sebesar 54.80%, tahun 2018 sebesar 57.57%, tahun 2019 sebesar 60.80%, tahun 2020 sebesar 63.80%, dan pada kondisi

kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 66.80%.

b. Realisasi

Realisasi program adalah: Pelayanan administrasi penduduk pindah datang dari tahun 2016-2018 terealisasi mencapai 100%, pendataan penduduk rentan/ non permanen terealisasi mencapai 100%, penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identitas anak terealisasi mencapai 100%, pelayanan langsung/keliling pendaftaran penduduk/KTP terealisasi mencapai 100%, dan pelayanan langsung/ keliling pendaftaran penduduk/kartu keluarga terealisasi mencapai 100%.

Realisasi dari bidang catatan sipil yang terdiri dari pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan capaian fisik sebesar 132% dan capaian keuangan 98%, penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 91%, Pelayanan langsung/ keliling pencatatan sipil/tahun kelahiran dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 90%, pelayanan langsung/ keliling pencatatan sipil/ atau perkawinan dan perceraian dengan capaian fisik sebesar 100% dan capaian keuangan 96%, pelayanan langsung/ keliling pencatatan sipil/akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian dengan capaian fisik 100% dan keuangan 81%, sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan capaian fisik 100% dan keuangan 95%, dan pembentukan fasilitasi percepatan penerbitan dokumen kependudukan dengan capaian fisik dan keuangan sebesar 100%.

11. Bidang Ketenagakerjaan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Ketenagakerjaan adalah: Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.67%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 66.67%, tahun 2017 sebesar 67.32%, tahun 2018 sebesar 67.96%, tahun 2019 sebesar 68.59%, tahun 2020 sebesar 69.21%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 69.82%.

Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 97.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 97.50%, tahun 2017 sebesar 98.00%, tahun 2018 sebesar 98.50%, tahun 2019 sebesar 99.00%, tahun 2020 sebesar 99.50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Untuk Indikator Cakupan Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 48.83%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 51%, tahun 2017 sebesar 51%, tahun 2018 sebesar 54%, tahun 2019 sebesar 56%, tahun 2020 sebesar 58%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 60%.

b. Realisasi

Realisasi bidang ketenagakerjaan periode 2016-2018 adalah: Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan capaian sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan sebesar 99,19%, dan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar 97,77%. Berikutnya program peningkatan kesempatan kerja dengan capaian penyiapan tenaga kerja siap pakai sebesar 78,03%, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan sebesar 92,46%, dan pengembangan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda sebesar 93,47%.

12. Bidang Ketahanan pangan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Ketahanan Pangan terdiri atas: Persentase Ketersediaan Beras pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 64%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 66%, tahun 2017 sebesar 67%, tahun 2018 sebesar 68%, tahun 2019 sebesar 69%, tahun 2020 sebesar 71%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 72%. Untuk Indikator Persentase skor pola pangan harapan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 87.90%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 88.05%, tahun 2017 sebesar 88.10%, tahun 2018 sebesar 88.20%, tahun 2019 sebesar 88.30%, tahun 2020 sebesar 88.40%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 88.50%.

b. Realisasi

Realisasi bidang ketahanan pangan periode 2016-2018 adalah: Penanganan daerah rawan pangan dengan capaian 97,01%, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dengan capaian 99,94%, pendataan pasokan dan harga pangan pokok dengan capaian 98,63%, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan capaian sebesar 79,80%, pengembangan diversifikasi tanaman dengan capaian sebesar 88,81%, penyusunan laporan dewan ketahanan pangan dengan capaian sebesar 93,41%, bimbingan teknis kapasitas lumbung pangan dengan capaian 95,26%, sosialisasi konsumsi beragam, bergizi, berimbang dan aman dengan capaian 99,97%, sosialisasi tentang ketahanan pangan dengan capaian sebesar 89,97%, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian dengan capaian 98,93%, penyusunan data statistik pertanian, perkebunan dan perhutanan dengan capaian 86,73%, pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan capaian 32,32%, dan pengamatan serta peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan capaian 86,84%.

13. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Cakupan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 1.14% dan 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 39% dan 10%, tahun 2017 sebesar 39.8% dan 20%, tahun 2018 sebesar 40% dan 30%, tahun 2019 sebesar 40% dan 40%, tahun 2020 sebesar 40% dan 50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 40% dan 50%. Untuk Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 100%, dengan target kinerja tahun 2016 - 2020 sebesar 100%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

Persentase KDRT dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.011% dan 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.003% dan 0%, tahun 2017 sebesar 0.003% dan 48%, tahun 2018 sebesar 0.002% dan 50%, tahun 2019 sebesar 0.002% dan 50%, tahun 2020 sebesar 0.002% dan 50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 0.002% dan 50%. Sedangkan indikator Jumlah orang yang terdidik dan terlatih peningkatan peran serta dan kesetaraan gender pada target kinerja tahun 2017-2021 sebanyak 50 orang.

b. Realisasi

Realisasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak periode 2016-2018 tersebut terdiri atas: Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan capaian kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dengan capaian fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 99,56% serta kegiatan pengembangan Kabupaten layak anak dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 71, 90%. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan capaian kegiatan advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 75,19%, kegiatan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dengan capaian fisik 100% dan keuangan 90,84% dan kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan capaian fisik 100% dan keuangan 97,66%. Selanjutnya program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan capaian kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, dengan capaian fisik 100% dan keuangan 96,11%.

14. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah: Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 1.07%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 1.07%, tahun 2017 sebesar 1.07%, tahun 2018 sebesar 1.07%, tahun 2019 sebesar 1.06%, tahun 2020 sebesar 1.06%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 1.05%. Berikutnya adalah: Persentase angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan ASFR 42/1000, dengan target kinerja tahun 2016 ASFR 42/1000, tahun 2017 ASFR 42/1000, tahun 2018 ASFR 40/1000, tahun 2019 ASFR 38/1000, tahun 2020 ASFR 38/1000, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar ASFR 38/1000.

Persentase KB MKPJ pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan 0.4101%. Berikutnya Indikator Jumlah Kampung KB yang terbentuk mulai dari tahun 2017-2021 menunjukkan masing-masing sebanyak 2 kampung KB. Untuk Persentase AKI dan AKB pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan AKI 144/100.000 kelahiran dan AKB 7/1.000 kelahiran, sedangkan tahun 2016-2020 menunjukkan AKI 102/100.000 kelahiran dan AKB 7/1.000 kelahiran. Berikutnya Indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I menunjukkan dari tahun 2015-2017 sebesar 5%, dan dari tahun 2018-2021 menunjukkan sebesar 3%.

b. Realisasi

Realisasi program tersebut terdiri atas: Kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 89,21%, kegiatan pelayanan KIE (pelaksanaan sosialisasi pengentasan pra KS) dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 91,69%, kegiatan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 94,87%, kegiatan operasional tim KB keliling dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 94,87%, kegiatan dan tujuan operasional Keluarga Berencana dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 24%, dan kegiatan bantuan pembinaan kelompok tribina dengan capaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 93,18%.

15. Bidang Perhubungan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Perhubungan terdiri atas: Persentase Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 7.69%, dengan

target kinerja tahun 2016 sebesar 7.69%, tahun 2017 sebesar 76.02%, tahun 2018 sebesar 91.86%, tahun 2019 sebesar 94.57%, tahun 2020 sebesar 97.29%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Untuk indikator Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 6.24%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.24%, tahun 2017 sebesar 28.63%, tahun 2018 sebesar 46.94%, tahun 2019 sebesar 64.86%, tahun 2020 sebesar 84.68%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Sedangkan Indikator Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 6.24%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.24%, tahun 2017 sebesar 28.63%, tahun 2018 sebesar 46.94%, tahun 2019 sebesar 64.86%, tahun 2020 sebesar 84.68%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi bidang perhubungan periode 2016-2018 adalah: Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan dengan capaian sebanyak 1 dokumen, peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan capaian 200 kali dengan pengawasan dan pengendalian penyeberangan Danau Batur. Berikutnya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan capaian rehabilitasi sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 unit dan pemeliharaan traffic light sebanyak 3 unit. Berikutnya program peningkatan pelayanan angkutan dengan capaian pembinaan juru parkir sebanyak 50 orang yang dan lomba Wahana Tata Nugraha tingkat nasional sebanyak 1 kali. Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas dengan capaian pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1 jenis, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 4 jenis, dan kegiatan pengamanan lalu-lintas sebanyak 125 kali. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan capaian pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari buku uji sebanyak 5000 buah, stiker tanda samping sebanyak 7300 set, plat uji (peneng) sebanyak 1000 keeping, kartu induk sebanyak 1000 lembar, form pendaftaran sebanyak 5000 lembar, form pemeriksaan sebanyak 5000 lembar dan buku kwitansi sebanyak 60 buah.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Komunikasi dan Informatika adalah: Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 4.47%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 4.47%, tahun 2017 sebesar 25.26%, tahun

2018 sebesar 46.98%, tahun 2019 sebesar 66.52%, tahun 2020 sebesar 82.95%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Untuk Indikator Persentase Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi pada kondisi kinerja dengan target tahun 2017 sebesar 100%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Sedangka indikator Persentase Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 60%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Untuk Persentase Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 3.54%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3.54%, tahun 2017 sebesar 49.06%, tahun 2018 sebesar 60.61%, tahun 2019 sebesar 71.23%, tahun 2020 sebesar 85.38%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi program adalah: Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa dengan capaian pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebanyak 8 SKPD, pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan capaian sebanyak 1 web, dan penataan serta pembinaan Tower seluler sebanyak 70 tower/dokumen. berikutnya program kerjasama informasi dengan Mas Media dengan capaian penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah sebanyak 1 kali, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 12 bulan, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat sebanyak 4 kecamatan/dokumen.

17. Bidang pertanahan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar bidang pertanahan tahun 2016-2021 terdiri dari Cakupan Pemanfaatan Tanah pada kondisi kinerja dengan target tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 60%, dan tahun 2018 sebesar 100%. Sedangkan untuk Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah pada kondisi kinerja dengan target kinerja tahun 2017 sebesar 50%, tahun 2018 sebesar 75%, dan tahun 2019 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi program tahun 2016-2018 adalah: Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kegiatan pendataan dan legalisasi tanah pemerintah pada tahun 2016-2021 dengan capaian sebesar 65,05%. Dan peningkatan

kapasitas sumber aparatur dengan kegiatan penyuluhan/pembinaan pertanahan pada tahun 2016-2021 dengan capaian 24,50%.

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Target

Program kegiatan yang dilaksanakan pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2016-2021 terdiri atas program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan program pendidikan politik masyarakat.

b. Realisasi

Realisasi program adalah: peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan capaian operasional Kominda Kabupaten Bangli sebanyak 68 desa dan penyelesaian konflik sosial sebanyak 5 kasus. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan capaian pemantapan wawasan kebangsaan sebanyak 175 orang, pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan sebanyak 80 orang, pembauran bangsa sebanyak 150 orang, dan kesadaran bela negara sebanyak 100 orang. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan capaian pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 1 kabupaten. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan capaian penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol sebanyak 6 parpol, dan pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Program pendidikan politik masyarakat dengan capaian koordinasi forum-forum diskusi politik sebanyak 100 orang.

19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Keuangan adalah: Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 90%, dengan target tahun 2016-2020 sebesar 90% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 90%.

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Kepegawaian adalah: Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 9%, dengan target tahun 2016 sebesar 14%, tahun 2017-2019 sebesar 15%, tahun 2020 sebesar 16% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 16%.

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Persandian terdiri

atas: Rasio Dokumen Persandian Terhadap Kebutuhan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2017 sebesar 90%, tahun 2018 sebesar 90%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 90%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 90%.

b. Realisasi

Realisasi Bidang Otonomi Daerah periode 2016-2018 dengan capaian kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah mencapai 4 kecamatan. Untuk Bidang Pemerintahan Umum periode 2016-2018 dengan capaian program pelaksanaan upacara nasional daerah, dan keagamaan dalam kegiatan pelaksanaan hari daerah yang mencapai 83.87% dan pelaksanaan peringatan hari nasional mencapai 92.09%. program peningkatan administrasi pemerintahan dalam kegiatan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dengan capaian Rp 17.036.010, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian Rp 17.940.000, dan sosialisasi serta fasilitas pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dengan capaian Rp 6.800.000.

Realisasi Bidang Kepegawaian periode 2016-2018 dengan capaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 5 orang, sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 100 orang, dan pelantikan pejabat struktural sebanyak 1 kali. Berikutnya program pembinaan pengembangan aparatur dengan kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah sebanyak 5400 orang, pemberkasan calon pegawai negeri sipil sebanyak 45 orang, penyeleggaraan usul pensiun pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 45 orang, penyelenggaraan usul pensiun PNS sebanyak 126 orang, penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS sebanyak 909 orang, optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai sebanyak 490 orang, pembinaan dan pengawasan disiplin PNS sebanyak 50 unit, dan penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/ Kota sebanyak 149 orang. Realisasi Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2016-2018 dengan capaian kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100%.

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah: Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 60%, dengan target tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 70%, tahun 2018 sebesar 75%, tahun 2019 sebesar 80%, tahun 2020 sebesar 85%, dan pada kondisi kinerja akhir

periode RPJMD 2021 sebesar 90%. Untuk Indikator Persentase Peningkatan Ekonomi Pedesaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 86%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 87%, tahun 2017 sebesar 88%, tahun 2018 sebesar 89%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 91%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 92%.

Sedangkan Indikator Persentase Penguatan SDM Desa dan Banjar pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 84%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 85%, tahun 2017 sebesar 86%, tahun 2018 sebesar 87%, tahun 2019 sebesar 88%, tahun 2020 sebesar 89%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 90%. Untuk Indikator Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 86%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 87%, tahun 2017 sebesar 88%, tahun 2018 sebesar 89%, tahun 2019 sebesar 90%, tahun 2020 sebesar 91%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 92%.

b. Realisasi

Realisasi tersebut terdiri dari program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan capaian periode 2016-2018 sebesar 100%, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan capaian kegiatan sebesar 100%, dan program penguatan SDM Desa dan banjar dengan capaian kegiatan sebesar 100%.

21. Bidang Sosial

a. Target

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan layanan dasar Sosial adalah: Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 35%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 36.53%, tahun 2017 sebesar 44.14%, tahun 2018 sebesar 50.97%, tahun 2019 sebesar 57.8%, tahun 2020 sebesar 64.63%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 75.14%. untuk Indikator Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 56.25%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 56.65%, tahun 2017 sebesar 56.74%, tahun 2018 sebesar 56.84%, tahun 2019 sebesar 57.11%, tahun 2020 sebesar 57.22%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 57.34%.

Indikator Cakupan pembinaan anak terlantar pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.45%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 5.18%, tahun 2017 sebesar 10.09%, tahun 2018 sebesar 14.73%, tahun 2019 sebesar 19.10%, tahun 2020 sebesar 23.20%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 57.03%. sedangkan indikator Cakupan pembinaan para penyandang

cacat dan eks trauma pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.45%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 5.75%, tahun 2017 sebesar 5.97%, tahun 2018 sebesar 6.19%, tahun 2019 sebesar 6.41%, tahun 2020 sebesar 6.63%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 6.83%.

Indikator Cakupan peningkatan peranan Panti Asuhan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.45%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 5.45%, tahun 2017 sebesar 10.36%, tahun 2018 sebesar 15.00%, tahun 2019 sebesar 19.37%, tahun 2020 sebesar 23.47%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 27.27%. untuk indikator Cakupan pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 15.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 15.00%, tahun 2017 sebesar 17.00%, tahun 2018 sebesar 25.17%, tahun 2019 sebesar 25.45%, tahun 2020 sebesar 25.57%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 25.69%. sedangkan indikator Cakupan berfungsinya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 100%, dengan target kinerja tahun 2016-2020 sebesar 100%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi bidang sosial periode 2016-2018 adalah: program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya dengan kegiatan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya sebanyak 13 orang, pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 40 orang, dan perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin sebanyak 40 orang. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 40 orang, penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sebanyak 25 kali, pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia sebanyak 350 orang, peningkatan kualitas pelayanan pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS sebanyak 112 orang, koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, dan pendataan PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial sebanyak 80 dokumen.

Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar sebanyak 10 orang. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 41 orang. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebanyak 2 forum, jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat sebanyak 60 orang dan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 5 lembaga.

22. Bidang Kebudayaan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Kebudayaan terdiri atas: Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Budaya pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 40%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 40%, tahun 2017 sebesar 48%, tahun 2018 sebesar 53%, tahun 2019 sebesar 57%, tahun 2020 sebesar 62%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 67%. Berikutnya Persentase Pelaksanaan Pelatihan, Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 27%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 27%, tahun 2017 sebesar 32%, tahun 2018 sebesar 37%, tahun 2019 sebesar 42%, tahun 2020 sebesar 47%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 52%. Persentase Sekee/Sanggar/Group dalam pengelolaan budaya pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 28%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 28%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 43%, tahun 2019 sebesar 50%, tahun 2020 sebesar 58%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 60%. Persentase Penunjang Kegiatan Berkesenian pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 30%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 40%, tahun 2019 sebesar 45%, tahun 2020 sebesar 50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 55%.

b. Realisasi

Realisasi bidang kebudayaan periode 2016-2018 adalah: Program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan capaian Rp 169.478.750. program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan capaian Rp 97.427.500, pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala dengan capaian Rp 76.583.125, dan pembinaan/evaluasi dan lomba subak dengan capaian Rp 38.160.000. program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah dengan capaian Rp 163.131.750, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan capaian 422.982.350, dan pesta kesenian bali dengan capaian Rp 1.829.455.000. Program pengembangan seni budaya daerah dengan kegiatan pelaksanaan lomba Kesenian tradisional Bali dengan capaian Rp 37.541.250.

23. Bidang Statistik

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Bidang Statistik terdiri atas: Ketersediaan data informasi/statistik daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 55%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 61%, tahun 2017 sebesar 67%, tahun 2018 sebesar 74%, tahun 2019 sebesar 82%, tahun 2020 sebesar 91%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi bidang statistik periode 2016-2018 adalah: program pengembangan data/informasi dengan kegiatan penyusunan profil daerah terealisasi mencapai 25 buku periode tahun 2016-2021.

24. Bidang Kearsipan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Kearsipan yaitu: Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengacu kepada peraturan perundang-undangan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 70%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 70%, tahun 2017 sebesar 72%, tahun 2018 sebesar 74%, tahun 2019 sebesar 76%, tahun 2020 sebesar 78%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 80%. Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 3.35%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 4.60%, tahun 2017 sebesar 5.86%, tahun 2018 sebesar 7.11%, tahun 2019 sebesar 8.37%, tahun 2020 sebesar 9.62%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 10.88%.

Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 3%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3%, tahun 2017 sebesar 3%, tahun 2018 sebesar 3%, tahun 2019 sebesar 20%, tahun 2020 sebesar 50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi tahun 2016-2018 dalam bidang kearsipan tersebut adalah: program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan kegiatan akuisisi arsip sebanyak 3 OPD. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan dengan capaian 5 instansi. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan

kearsipan dengan capaian 50 orang, dan penelusuran arsip statis dengan capaian sebanyak 30 arsip statis.

25. Bidang Perpustakaan

a. Target

Indikator Kinerja yang tidak berkaitan dengan layanan dasar Perpustakaan adalah: Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.54%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 33.63%, tahun 2017 sebesar 51.34%, tahun 2018 sebesar 63.51%, tahun 2019 sebesar 75.67%, tahun 2020 sebesar 87.83%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Untuk persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum di Kabupaten Bangli pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 34.40%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 37.60%, tahun 2017 sebesar 42.60%, tahun 2018 sebesar 47.60%, tahun 2019 sebesar 52.60%, tahun 2020 sebesar 57.60%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 62.60%.

b. Realisasi

Realisasi bidang perpustakaan periode 2016-2018 adalah: program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan yang di capai yaitu kegiatan perpustakaan keliling dengan capaian 3000 orang, kegiatan pelaksanaan hari kunjung perpustakaan dengan capaian 340 orang, kegiatan mengirim peserta lomba dengan capaian 6 orang, kegiatan Bangli membaca sebanyak 2000 lembar, kegiatan Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolah dengan capaian 50 orang, dan kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah dengan capaian 10 sekolah. Berikutnya Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan kegiatan pendataan dan penyalinan lontar dengan capaian 15 lontar. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan penerjemahan lontar dengan capaian 15 lontar, dan kegiatan penghimpun koran dengan capaian 70 jilid. Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dengan kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dengan capaian 500 buah.

8.3 Urusan Pilihan 2016-2021

1. Bidang Peternakan dan Perikanan

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 yaitu: Persentase Produksi Perikanan Budidaya pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 70.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 72%, tahun 2017 sebesar 74%, tahun 2018

sebesar 76%, tahun 2019 sebesar 78%, tahun 2020 sebesar 79%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 81%.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan bidang Perikanan periode tahun 2016-2018 yang terdiri atas program pengembangan budidaya perikanan dengan capaian 91.36%. berikutnya pelaksanaan bidang Peternakan periode 2016-2018 terdiri atas program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan capaian 99.11%, program peningkatan produksi hasil peternakan dengan capaian 99%, dan program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan capaian 93.27%.

2. Bidang Pertanian

a. Target

Indikator Kinerja Pertanian tahun 2016-2021 terdiri atas: Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 1.15%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 30.03%, tahun 2017 sebesar 6.43%, tahun 2018 sebesar 3.96%, tahun 2019 sebesar 3.38%, tahun 2020 sebesar 3.38%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 3.38%. berikutnya Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 4.83%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 4.83%, tahun 2017 sebesar 4.91%, tahun 2018 sebesar 4.98%, tahun 2019 sebesar 5.05%, tahun 2020 sebesar 5.14%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 5.18%.

Persentase Promosi Produk Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 25.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.67%, tahun 2017 sebesar 8.89%, tahun 2018 sebesar 8.89%, tahun 2019 sebesar 8.89%, tahun 2020 sebesar 8.89%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 8.89%. selanjutnya Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 5.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 5.00%, tahun 2017 sebesar 8.51%, tahun 2018 sebesar 12.02%, tahun 2019 sebesar 3.51%, tahun 2020 sebesar 3.51%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 3.51%.

Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan per hektar pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.27%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.27%, tahun 2017 sebesar 0.29%, tahun 2018 sebesar 0.32%, tahun 2019 sebesar 0.35%, tahun 2020 sebesar 0.39%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 0.44%. berikutnya indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh pada kondisi kinerja awal periode RPJMD

2015 menunjukkan angka 30.00%, dengan target kinerja tahun 2016-2020 sebesar 10.42%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 10.42%.

Produktivitas Tanaman Holtikultura Unggulan Per Hektar pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 125 hektar, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 125 hektar, tahun 2017 sebesar 129 hektar, tahun 2018 sebesar 133 hektar, tahun 2019 sebesar 137 hektar, tahun 2020 sebesar 141 hektar, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 143 hektar. Selanjutnya persentase Tingkat Kesakitan Hewan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 7.00%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 6.50%, tahun 2017 sebesar 6.00%, tahun 2018 sebesar 5.50%, tahun 2019 sebesar 5.00%, tahun 2020 sebesar 4.50%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 4.00%.

Persentase Populasi Ternak Meningkat pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 1.50%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3.00%, tahun 2017 sebesar 4.50%, tahun 2018 sebesar 6.00%, tahun 2019 sebesar 7.50%, tahun 2020 sebesar 9.00%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 10.50%. berikutnya Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Ternak dan Ikan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 20%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 30%, tahun 2018 sebesar 35%, tahun 2019 sebesar 40%, tahun 2020 sebesar 45%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 50%.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan bidang Pertanian periode 2016-2018 adalah: program peningkatan kesejahteraan petani terealisasi 82.75%, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan terealisasi 88.37%, program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan terealisasi 84.58%, program pengembangan agribisnis terealisasi 92.03%, dan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan terealisasi 57.65%.

3. Bidang Kehutanan

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan bidang Kehutanan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: Persentase Pengurangan Kerusakan Kawasan Hutan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 23.08%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 24.02%, tahun 2017 sebesar 24.04%, tahun 2018 sebesar 24.07%, tahun 2019 sebesar 24.10%, tahun 2020 sebesar 24.13%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 24.16%. untuk persentase Pemahaman Masyarakat Tentang Dampak Perusakan Hutan pada kondisi

kinerja dengan target capaian tahun 2016 sebesar 16.67%, tahun 2017-2020 sebesar 13.33% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 13.33%.

b. Realisasi

Program di bidang kehutanan telah mencapai seluruh target yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan target pada penyusunan program.

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral/Alam

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral/Alam Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 terdiri atas: Cakupan Pengawasan Perlindungan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2017 sebesar 16.19%, tahun 2018 sebesar 34.29%, tahun 2019 sebesar 54.29%, tahun 2020 sebesar 76.19%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan bidang energi dan sumber daya mineral periode 2016-2018 adalah: program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dengan capaian 15 kali.

5. Bidang Pariwisata

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 atas: Kunjungan Pariwisata pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sejumlah Rp 610.349, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar Rp 1,2 juta, tahun 2017 sebesar Rp 1.988.279, tahun 2018 sebesar Rp 3.366.209, tahun 2019 sebesar Rp 4.744.140, tahun 2020 sebesar Rp 6.122.070, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar Rp 7,5 juta. Berikutnya Persentase Pelaku Promosi dan Pelaku Pariwisata pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sebanyak 4%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 4%, tahun 2017 sebesar 16%, tahun 2018 sebesar 21%, tahun 2019 sebesar 25%, tahun 2020 sebesar 35%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 55%. Selanjutnya Persentase Daya Tarik Wisata yang tertangani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sebanyak 25%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 36%, tahun 2018 sebesar 47%, tahun 2019 sebesar 58%, tahun 2020 sebesar 73%, dan pada kondisi

kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 84%.

Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Pariwisata dan Budaya pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sebanyak 10%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 36%, tahun 2018 sebesar 45%, tahun 2019 sebesar 26%, tahun 2020 sebesar 65%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 70%. Untuk Persentase Geosite yang tertangani pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sebanyak 9%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 9%, tahun 2017 sebesar 19%, tahun 2018 sebesar 38%, tahun 2019 sebesar 55%, tahun 2020 sebesar 73%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 90%. Sedangkan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Wisata pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan capaian sebanyak 0%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 60%, tahun 2019 sebesar 70%, tahun 2020 sebesar 80%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 90%.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pariwisata periode 2016-2018 adalah: program pengembangan destinasi pariwisata dengan capaian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Rp509.260.500, pengembangan daerah tujuan wisata Rp Rp 94.410.000, pendataan potensi pariwisata Rp 34.883.500, pengelolaan ODTW yang telah berkembang Rp 3.127.656.400, penataan kawasan wisata Rp 193.058.500, penyusunan DED daya tarik wisata Rp 327.320.750, dan kegiatan Batur Enduriu Chalenge Rp 196.010.000. berikutnya program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan yang dicapai peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Rp 75.086.250, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Rp 525.000, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Rp 125.256.437, pelatihan pemandu wisata terpadu Rp 171.612.000, pelaksanaan festival pariwisata Rp 59.244.000, dan pembuatan kalender Wisata Adat dan Budaya Rp 43.205.000. berikutnya program pengembangan kemitraan dengan capaian kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya, pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Rp 63.000, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Rp 171.325.625, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Rp 108.078.000, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Rp 101.539.000. berikutnya program penguatan keberadaan Geopark Kaldera Batur dengan capaian kegiatan pembangunan TIC/Pesanggrahan Rp 646.594.000, penguatan jejaring Batur UNESCO Global Geopark Rp 122.514.170, dan pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan Rp 261.876.250.

6. Bidang Industri dan Perdagangan

a. Target

Indikator Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan bidang Industri terdiri atas: Persentase Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 10.34%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 13.79%, tahun 2017-2020 sebesar 17.24%, dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 17.24%.

Persentase Pembinaan Perajin Industri Kecil dan Menengah pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 29.01%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 29.51%, tahun 2017 sebesar 30.51%, tahun 2018 sebesar 31.61%, tahun 2019 sebesar 32.71%, tahun 2020 sebesar 33.91% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 35.11%. Untuk persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.71%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.87%, tahun 2017 sebesar 1.03%, tahun 2018 sebesar 1.19%, tahun 2019 sebesar 1.35%, tahun 2020 sebesar 1.51% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 1.67%. berikutnya Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri (IKM) pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 9.70%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 10.68%, tahun 2017 sebesar 11.90%, tahun 2018 sebesar 13.12%, tahun 2019 sebesar 14.34%, tahun 2020 sebesar 15.56% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 16.78%.

Untuk Kinerja utama pada urusan pemerintahan pilihan bidang Perdagangan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 terdiri dari Persentase Pembinaan Pedagang pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 78.27%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 78.39%, tahun 2017 sebesar 80.24%, tahun 2018 sebesar 85.18%, tahun 2019 sebesar 90.12%, tahun 2020 sebesar 95.06% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 100%. Sedangkan untuk Pertumbuhan Eksport Bersih Perdagangan Pertahun pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.90%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 1.12%, tahun 2017 sebesar 1.27%, tahun 2018 sebesar 1.42%, tahun 2019 sebesar 1.58%, tahun 2020 sebesar 1.74% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 1.90%.

Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 40.62%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 40.62%, tahun 2017 sebesar 62.49%, tahun 2018 sebesar 71.79%, tahun 2019 sebesar 81.09%, tahun 2020 sebesar 90.39% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 99.69%. sedangkan untuk Persentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 menunjukkan angka 0.19%, dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 0.38%, tahun

2017 sebesar 0.55%, tahun 2018 sebesar 0.73%, tahun 2019 sebesar 0.93%, tahun 2020 sebesar 1.14% dan pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD 2021 sebesar 1.37%.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan periode 2016-2018 terdiri atas program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan fasilitasi kemasan dan labeling produk olahan pangan dengan capaian Rp 28.420.000, dan pembinaan serta pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun Rp 13.255.000. Berikutnya adalah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan Rp 55.029.200, Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengn capaian Rp 39.765.000, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan capaian Rp 14.549.422.255, Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan capaian Rp 19.400.000, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan capaian Rp 41.675.000, Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan capaian Rp 368.293.700, dan Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan capaian Rp 74.381.301.

Pelinggih di Danau Batur, Bangli

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari isi buku D*inamika Pembangunan Bangli tahun 2011-2020* adalah sebagai berikut.

1. Visi Kabupaten Bangli yang termuat dalam RPJMD Kab. Bangli Tahun 2010-2015 adalah **Terwujudnya Masyarakat Bangli Yang GITA SANTI (gigih, iklas, taqwa, aspiratif, sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah) berdasarkan Tri Hita Karana**.

2. **Misi** Kab. Bangli Tahun 2010-2015 yaitu :
   1) Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti: pangan, sandang dan papan.
   2) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
   3) Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
   4) Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
   5) Mengembangkan menejemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) program pembangunan.
   6) Meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha

kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

7) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien dan efektif serta mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada.

8) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, dan indah atau SANTI.

3. Sebagai upaya mencapai Visi tersebut, maka rencana program yang disusun meliputi 25 bidang urusan wajib, yaitu: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan dan pembangunan, perumahan dan pemukiman, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan inormatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan. Sedangkan untuk urusan pilihan meliputi 6 bidang, yaitu: peternakan perikanan, pertanian, kehutanan, energi sumber daya alam, pariwisata, serta industri dan perdagangan.

4. Untuk periode pemerintahan tahun 2016-2021, rencana program urusan wajib sama dengan periode tahun 2010-2016, namun perbedaannya adalah untuk ttahun 2016-2021 adanya pemisahan antara program kearsipan dan perpustakaan yang sebelumnya menjadi satu. Selain itu tidak ada program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. sedangkan program urusan pilihan sama dengan periode sebelumnya.

5. Seluruh program yang direncanakan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli, baik untuk periode tahun 2010-2016 maupun periode tahun 2016-2021 untuk urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu alokasi dana yang direncakan mengalami peningkatan setiap tahunnya maupun antar periode pemerintahan untuk seluruh bidang kegiatan yang direncanakan, hanya satu bidang yang tidak memiliki anggaran pada periode tahun 2016-2021 yaitu energi dan sumber daya mineral.

6. Dari seluruh program kerja pada periode pemerintahan tahun 2010-2016, seluruh program telah mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan

baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun sebagian program belum mencapai realisasi capaian 100 persen. Demikian juga untuk periode pemerintahan tahun 2016-2021 baik dari sisi target maupun realisasi mengalami kecenderungan yang meningkat dari periode pemerintahan sebelumnya, namun belum seluruh program yang direncanakan mencapai realisasi 100 persen, baik untuk urusan wajib maupun urusan pilihan.

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada point 9.1 selanjutnya disampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bangli perlu meningkatkan kinerja untuk memacu capaian realisasi program sehingga mencapai 100 persen, terutama untuk periode sisa pemerintahan periode tahun 2016-2021, yaitu selama 2 tahun periode berikutnya. Mengingat belum seluruh program mencapai realisasi 100 persen.
2. Program yang perlu ditingkatkan kinerjanya meliputi seluruh bidang program yang direncanakan sesuai dengan uraian pada Bab target dan capaian yang telah diuraikan sebelumnya.

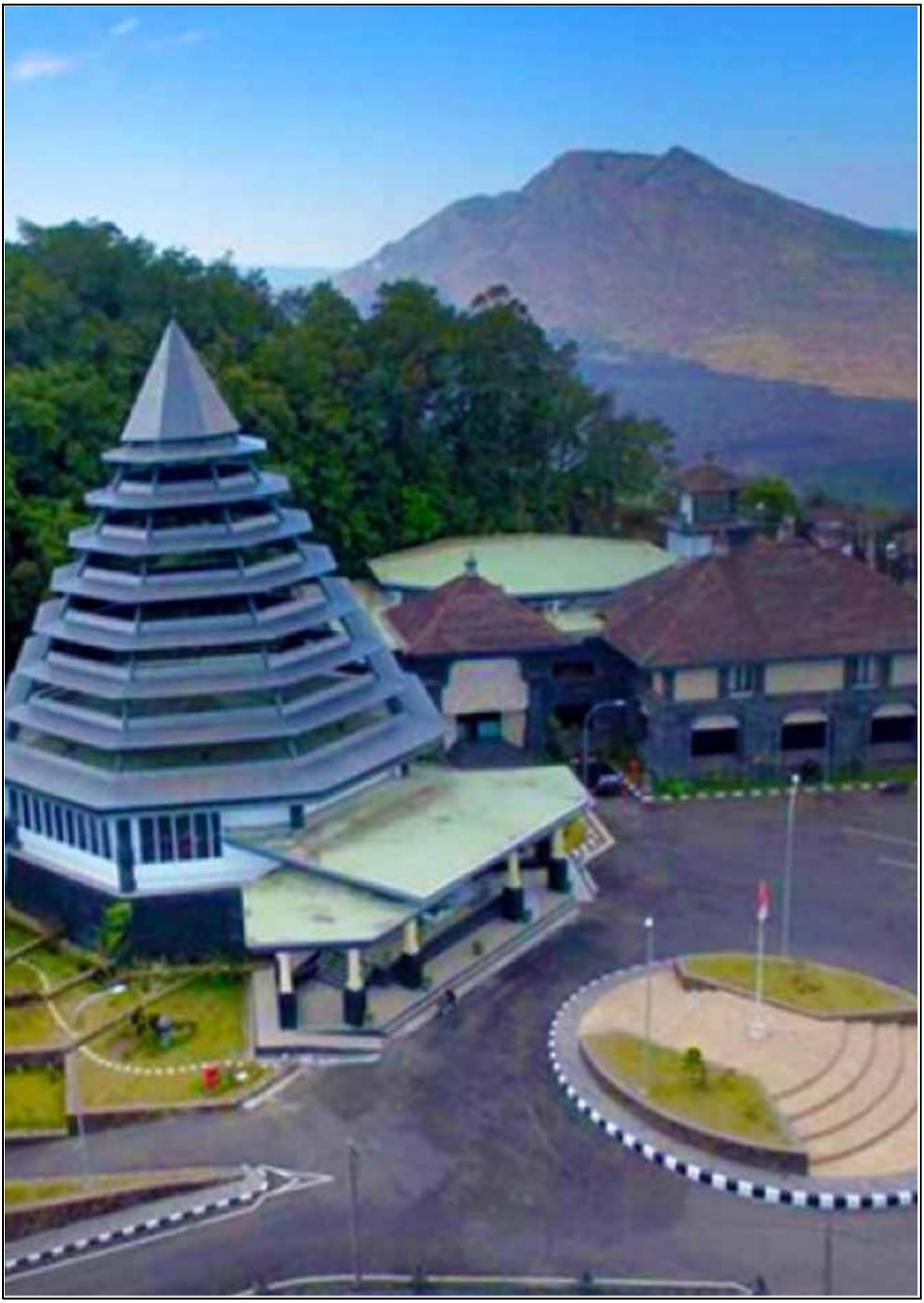

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Anonim, *Kabupaten Bangli dalam Angka 2018*.

Ardika, I Wayan. 1998. *Pemahaman dan Pelestarian Tinggalan Arkeologi Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Orasi Ilmiah Universitas Udayana Denpasar.

Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Geius)*. Jakarta: Duta Pustaka Jaya.

Bappeda Kabupaten Bangli. 2018. *Kajian Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Bangli.

Bisma, I. D., & Susanto, H. (2010, Desember). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. GaneÇ Swara Edisi Khusus, 4 (3), 75-86.

Goris, R. 1930. *Sifat Religiusitas: Masyarakat Pedesaan di Bali.* Publikasi ulang karya-karya lepas Goris. Denpasar: Udayana University Press.

Goris, R. 1948. *Sejarah Bali Kuna*. Singaraja: Bali Museum.

Geriya, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.

Halim, Abdul. 2004. Bunga RampaI Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Ife, Jim. 2002. *Community Development, Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Longman Pearson Educations.

Kaplan, D. & R.A. Manner. 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kempers, A.J Bernet. 1956. *Bali Purbakala: Petunjuk tentang Peninggalan Purbakala di Bali.* Djakarta: Penerbit "Ichtiar".

Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koswara, E. 2005. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Pariba.

Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (terj. Cecep Rhendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Mirsa, I Gusti Ngurah, dkk. 1986. *Sejarah Bali*. Denpasar: Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2014. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata.* Penerjemah: Jean Couteau dan Warih Wiratsana. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Presiden Republik Indonesia. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sibarani, Robert. 2015. *Pembentukan Karakter Langkah-Langkah Berbasis Kearifan Lokal*. Cetakan kedua. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).

Sita Laksmi, AAR., I Made Mardika,Ketut Sudrama. 2011. *Cagar Budaya Bali: Menggali Kearifan Lokal dan Model Pelestariannya*. Denpasar: Warmadewa University Press.

United Nations. (2003, May). My Analitics. Retrieved from Myworld Survey: http:// data.myworld2015.org/

INDEKS

A
Abang Batudinding 17
Abang Songan 17
agroforestry 13
agroindustri 13, 103, 160
agrowisata 14
Alokasi Dana Desa 1
angka partisipasi kasar 27
angka partisipasi murni 27
ASEAN 68, 72
Australia 68, 199

B
Badung 7, 25, 72, 204
Bali 1, 3, 7, 8, 9, 19, 24-28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 53, 63, 64, 66-70, 72, 73, 76, 89, 90, 93-96, 144, 149, 151, 161, 185, 199, 200, 203, 204
Bali Mandara 64
Banjar 91, 106, 145, 150, 183
bantuan operasional kesehatan 104
Barong Landung 70
Batam 153
Belantih 10, 39
Beratan 9
bonus demografi 67, 68
Buahan 17
Budiono 58, 59
Bukit Payang 10
Buleleng 7, 25
Buyan 9

C
Catur 10, 39
Cina 70
civil service 1
clean government 71

D
Danau Batur 7, 9, 15, 16, 34, 40, 45, 67, 70, 73, 179
Denpasar ii, 25, 148, 153, 199, 200, 203
DPR 77
DPRD 98, 144

E
eco tourism 73
e-government 141

G
Geopark Batur 44, 128
Gianyar v, 7, 8, 25, 64, 71, 75, 204
Gunung Batur 7, 8, 9, 10, 18, 20, 45, 70

H
Hindu 31, 64, 70, 73, 85

I
I. B. Mantra 72
I Made Gianyar v, 64, 71
I Made Mangku Pastika 64
Indonesia 4, 5, 26, 44, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 87, 94, 121, 129, 153, 163, 199, 200, 204
I Nyoman Arnawa 71
IPTEK 92, 132
I Wayan Koster 68

J
Jakarta 26, 73, 153, 199, 200, 204
Jaminan Kesejahteraan Sosial 148
Jayapangus 69, 70
Jepang 68
Jimbaran 72
Jokowi 69
Joko Widodo 56, 58, 61
Jusuf Kalla 56, 58, 61

K
Kajian Lingkungan Hidup Strategis 71
Kang Cing Wei 70
Karangasem 7, 25
Kawasan Ekonomi Khusus 60
kearifan lokal 3, 78, 81, 85, 93, 196
Kedisan 17, 40, 73
Keramba Jaring Apung 67
kesetaraan gender 101, 105
Ketut Marjana 73
Kintamani 7, 8, 10, 12, 17, 21, 32, 33, 39,

40, 65, 66, 70, 73, 89, 127, 160
Klungkung 7, 8, 25
komunitas adat terpencil 102, 106, 184
Korea 68
Kuta 72

L
labor supply 67
Latengaya 18
Listibya 93

M
mass tourism 72
masyarakat berpenghasilan rendah 71, 94, 95, 96, 172
Millenium Development Goals 26, 59

N
Nawa Cita 61, 94
niskala 64
Nusa Dua 72

O
Orde Baru 68

P
Pancasila 3, 63, 72, 142, 181
PDRB 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 65, 80
Pegawai Negeri Sipil 143
pendapatan asli daerah 2, 47, 48, 51, 78, 80, 83, 88, 195
Penelokan 10, 19, 39, 41
Pengajaran 10
pengarusutamaan gender 101
Penglipuran 45, 89
Penulisan vi, 8, 10, 39
penyandang masalah kesejahteraan sosial 102, 106, 146, 147, 183, 184
Produk Domestik Regional Bruto 65
program keluarga harapan 148
program Nawacita 56
Pura Ulun Danu 73

R
reformasi agraria 56
Reformasi Birokrasi Nasional 61
Reksohadiprodjo 47
Rencana Kerja Pemerintah 57
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5, 57, 200
Rencana Tata Ruang Wilayah 71
Revolusi mental 63, 69
ruang terbuka hijau 104, 125, 170

S
Sang Nyoman Sedana Arta 71
Sarbagita 9
sekala 64
Seked 18
Siladan 69
Singapura 68
sistem informasi profil daerah 129
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4, 57
Songan A 17, 18
Songan B 17, 18
subak 11, 12, 13, 14, 66, 154, 185
sumber daya manusia 2, 26, 58, 67, 68, 69, 78, 79, 82, 84, 90, 191, 195
Susilo Bambang Yudhoyono 58
Susut 7, 8, 10, 11, 21, 39, 40, 65, 66
Suter 17

T
Taman Bali 39, 69
Tamansari 18
Tanjung Benua 72
Tembuku 7, 8, 10, 11, 21, 39, 40, 65, 66
Tentara Manunggal Masuk Desa 2
Toyabungkah 10
Tri Hita Karana 2, 64, 75, 76, 78, 81, 84
Trunyan 17, 39, 40, 70

U
UMKM 83, 92, 93, 96, 114, 133, 134, 174
Undang-Undang No. 26 tahun 2007 71
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 4, 57
UNESCO 89, 191
UUD 45 142

W
Wayan Rena Wardana 73

Y
Yeh Mampeh 16, 18

Z
Zona Ekonomi Ekslusif 61

TENTANG PENULIS

Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si. adalah Budayawan dan Dosen Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Denpasar. Menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Arkeologi di Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1985; S-2 di Program Pascasarjana UNHI Denpasar tahun 2008; dan S-3 Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2015. Sejak tahun 2016 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar.

Sejak tahun 2018 menjadi Konsultan Desa Wisata Kabupaten Badung dan dipercaya sebagai konsultan desa binaan Dusun Siladan, Taman Bali, Bangli. Dalam Karya Seni, Memberi Ide Cerita Tari Kebesaran Pascasarjana Unwar 2017 dan Tari Kebesaran DPRD Bali 2018. Dipercaya PHDI Pusat mentransformasi Nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk Ukiran Panil Kayu untuk Istana Presiden.

Penulis juga dikenal sebagai guru, penulis, seniman Bali yang telah melahirkan begitu banyak cipta dan berkontribusi pada pengembangan seni dan budaya Bali di berbagai pentas nasional maupun internasional. Aktif mengikuti dan menjadi pemakalah seminar nasional dan Internasional. Karya ilmiahnya telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional, seperti *e-journal of Cultural Studies*, *Pusaka Budaya*, *Sudamala*, dan *Jurnal Kajian Bali*. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan, antara lain *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bunga Pucuk Bang dan Buah Manggis* (2013), *Raja Udayana Warmadewa: Bab VII Kesenian "Seni pada Zaman Udayana"* (2014), *Pura Kahyangan Jagat Masceti Gianyar* (2015), *Purana Pura Masceti* (2015), *Branding Kabupaten Gianyar* (2015), *Calon Arang Dalam Kebudayaan Bali* (2015), *Pura Penataran Sasih Kahyangan Jagat Bali* (2016), *Pesta Kesenian Bali XXXVIII: Karang Awak, Mencintai Tanah Kelahiran* (2016); *Pura Sri Kesari Warmadewa* (2016), *Biografi "Menapak Jejak Perjalanan Hidup Sri Begawan Soma Putra Pura Soma Negara Pejeng"* (2017), *Bali Perspektif Budaya dan Pariwisata* (2017), *Wisata Gastronomi Ubud - Gianyar* (2018), *Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk* (2018), dan *Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali* (2019).

Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si. lahir di Singaraja 2 September 1963, adalah ahli ekonomi pembangunan. Menyelesaikan S1, S2 dan S3 pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana pada bidang ilmu ekonomi pembangunan. Jabatan yang pernah diemban diantaranya: Pembantu Dekan III FE Unwar, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan dan saat ini sebagai Ketua Prodi Magister Manajemen Universitas Warmadewa serta ketua redaksi jurnal ekonomi dan bisnis Jagadhita MM Unwar (terakreditasi Shinta 4). Karya buku yang telah ditulis adalah: berbisnis dengan modal sosial capital dan Dinamika Pembangunan Bangli. Jabatan dalam organisasi kemahasiswaan dan sosial yang pernah diemban: ketua senat FE Udayana 1985-1987, ketua unit Perisai Diri UNUD tahun 1983-1987, ketua club study ekaprasetya FE Unud 1985-1987, ketua Yayasan Bunga Sepasang 2010-2010, Bendahara IPSI Bali 1998-2000, Team Ahli Tematik Kemiskinan Pemda Provinsi Bali 2019. Email: putungurahsuyatna@yahoo.com.

Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si. adalah dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Warmadewa, Bali, dan Pengelola *Jurnal Ilmu Politik Sarathi-AIPI* Bali. Ia menyelesaikan studi Sarjana Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (1990), Magister Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (1997) dan Doktor Kajian Budaya Unud (2008). Berminat pada bidang kajian tata pemerintahan, manajemen pelayanan publik dan demokrasi. Pernah meraih hibah penelitian dari Dikti, seperti kajian wanita, fundamental dan strategis nasional. Salah satu hasil penelitiannya, "Transformasi Otonomi dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Badung" dimuat dalam *Jurnal Ilmu Politik-AIPI* Pusat Jakarta Edisi 21, 2010. Email: suacana@gmail.com.

Made Yaya Sawitri S.HI., M.A. adalah dosen Magister Manajemen Administrasi Publik Universitas Warmadewa Etika Administrasi Publik. Menyelesaikan S-1 Hubungan Internasional di President University tahun 2015 dan S-2 Antropologi Pembangunan dan Transformasi Sosial di University of Sussex tahun 2017.

Penelitian yang pernah dilakukan, yaitu "Moral Selving in Volunteer Work: The Case of Indonesia" (2017) dan "Pengaruh Aktor Eksternal Dalam Desa Wisata Wisata Terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Actor Network Theory (Studi Kasus: Desa Pakraman Tegenungan dan Desa Pekraman Blangsinga di Gianyar, Bali)" (2019). Aktif menulis di jurnal dan mengikuti pertemuan Ilmiah/Seminar, seperti Forum of Indonesian Scholar International Convention (ISIC) di University of Warwick, United Kingdom tahun 2017, dan International Conference on Indonesian Development (ICID) di Erasmus University, The Netherlands tahun 2019.

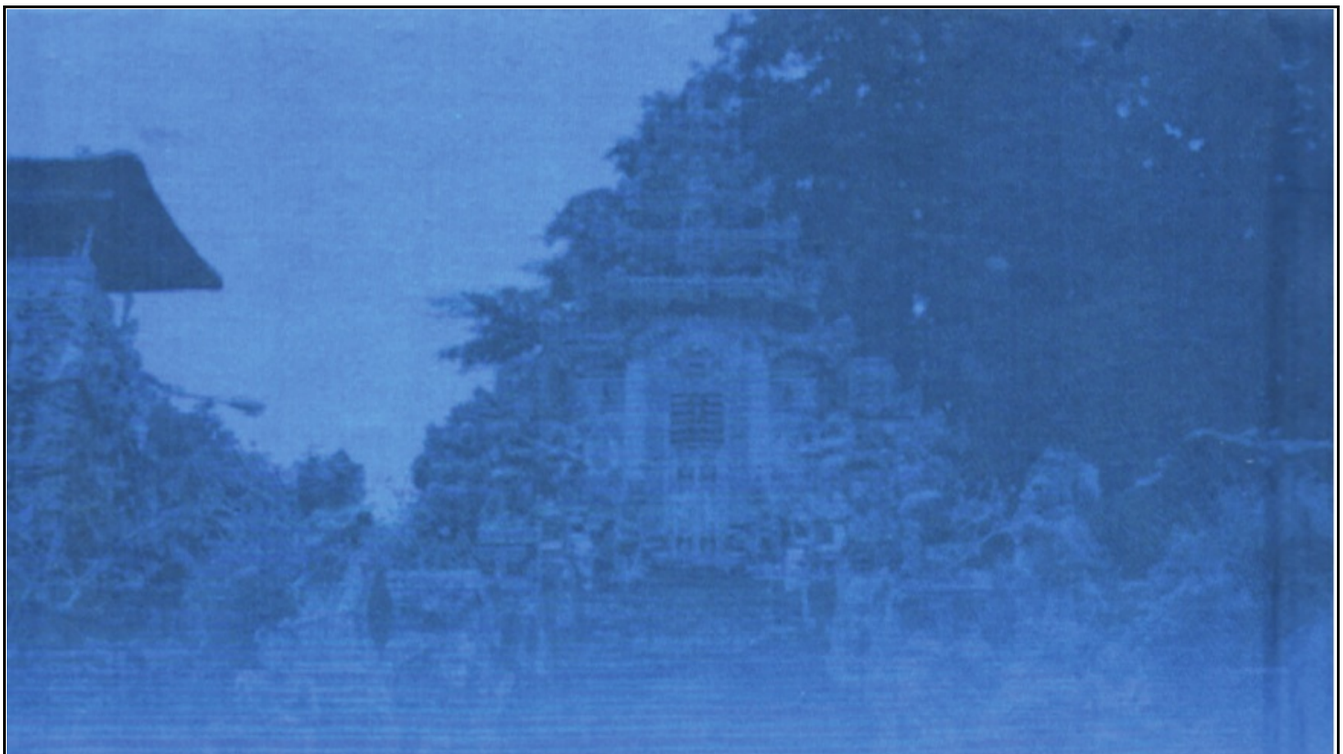

Buku *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011 -- 2021* ini merupakan sebuah dokumen yang menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah kabupaten pada dua periode pembangunan di Kabupaten Bangli. Buku ini memuat secara lengkap engenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan, rencana program dan pendanaan, serta indikator target dan capaian pembangunan di Kabupaten Bangli. Terbitnya buku ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Bupati Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama dua periode pemerintahan yaitu tahun 2011 s.d 2021, terhadap seluruh stakeholder yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan sehingga seluruh rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan progres yang cenderung mengalami kemajuan yang signifikan sesuai dengan data dan fakta yang telah diungkap dan diuraikan oleh team penulis.

I Made Gianyar

Bupati Bangli

ISBN 978-623-7575-09-2

9 786237 575092

CAKRA MEDIA UTAMA

Pemerintah Kabupaten Bangli

Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011— 2020

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

15%

★ banglikab.go.id

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		